

**PERAN WALI BLOK DALAM MENANGGULANGI
GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS
KHUSUS NARKOTIKA JAKARTA**

TESIS

HADI WIJAYA

NPM. 0706308686



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA, TAHUN 2009**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN WALI BLOK DALAM MENANGGULANGI
GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS
KHUSUS NARKOTIKA JAKARTA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

HADI WIJAYA

NPM. 0706308686



UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

PROGRAM PASCASARJANA

JAKARTA, TAHUN 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan :

Nama : HADI WIJAYA

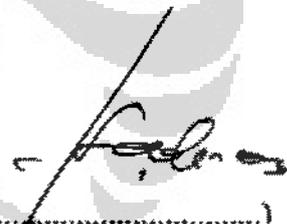
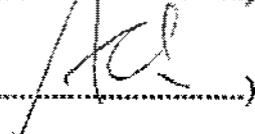
Nomor Mahasiswa : 0706308686

Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian

Judul Tesis : Peran Wali Blok Dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I	: DR. Hadiman, MBA	(..... 
Pembimbing II	: Drs. Johannes Sutoyo, MA	(..... 
Penguji	: Drs. Eddy Ichwanto, M Si	(..... 
Penguji	: Prof. Adrianus Meliala, PhD	(..... 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan :

Nama : HADI WIJAYA

Nomor Mahasiswa : 0706308686

Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian

Judul Tesis : Peran Wali Blok Dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Keterlibatan di Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : DR. Hadiman, MBA (.....)

Pembimbing II : Drs. Johannes Sutoyo, MA (.....)

Penguji : Drs. Eddy Ichwanto, M Si (.....)

Penguji : Prof. Adrianus Meliala, PhD (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dari peneliti, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) Kajian Ilmu Kepolisian Kekhususan *Manajemen Security*, Universitas Indonesia.

Peneliti sangat menyadari dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna, karena terbatasnya waktu, kemampuan dan terdapatnya berbagai hambatan yang dimiliki, maka peneliti membuka diri dan mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi, selaku Ketua Program Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia;
2. DR. Hadiman, MBA, selaku dosen pembimbing I dan Drs. Johannes Sutoyo, MA, selaku dosen pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
3. Prof. Adrianus Meliala, PhD dan Drs. Eddy Ichwanto, M Si, selaku tim penguji tesis ini dan telah memberikan banyak sekali kritik dan saran untuk kebaikan tesis ini;

4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Sekretariat Program Pascasarjana, Program Kajian Ilmu Kepolisian yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan bantuan selama perkuliahan;
5. Semua rekan sejawat mahasiswa Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian kekhususan Manajemen Security;
6. Pejabat dan staf pada Lapas Khusus Narkotika Jakarta yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini;
7. Istriku, anakku, serta seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan semangat, dorongan dan do'a, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik;
8. Semua pihak lainnya yang tidak dapat peneliti cantumkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti,

Hadi Wijaya

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hadi Wijaya
NPM : 0706308686
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Wali Blok Dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Keterlibatan di Lapas Khusus Narkotika Jakarta

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/fotmatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 desember 2009

Yang menyatakan


(HADIWIJAYA)

ABSTRAK

Nama : HADI WIJAYA
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : Peran Wali Blok Dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan lapas, dimana harmonisasi hubungan sosial penghuninya dapat berlangsung dengan baik, adalah tujuan bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat tercipta salah satunya dengan berjalannya mekanisme pengamanan lapas dengan baik. Pendekatan pengamanan yang baik tentu saja tidak hanya sekedar pendekatan yang represif saja akan tetapi dengan pendekatan persuasif oleh petugas pengamanan, yaitu Wali Blok, dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan narapidana.

Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian terdiri dari informan kunci 1 orang, informan penting sebanyak 6 orang dan informan sebanyak 2 orang.

Tesis ini menemukan bahwa peran Wali Blok kurang efektif dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta. Indikatornya adalah bahwa komunikasi yang terbangun masih satu arah dan Wali Blok tidak pro aktif dalam mendeteksi masalah-masalah yang dihadapi narapidana sehingga banyak permasalahan di blok yang tidak diketahui oleh Wali Blok. Penelitian juga menemukan bahwa penunjukkan Wali tidak didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur. Kendala pelaksanaan peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban adalah kendala sumber daya manusia petugas dan kendala sarana prasarana yang tidak berorientasi pada pendekatan teknologi.

Kata Kunci : Narapidana, Wali Blok, Komunikasi, Gangguan Keamanan dan Ketertiban

ABSTRACT

Name : HADI WIJAYA
 Study Program : Police Science Studies
 Title : *THE ROLE OF WALI BLOK IN TACKLING INTERFERENCE IN ORDER AND SAFETY IN SPECIAL NARCOTICS PENITENTIARY JAKARTA*

Establishing security and order in the prison environment, where inhabitants harmonization of social relations can be run well, is the goal for every Penitentiary. This one can be created with the passage of a prison security mechanisms well. A good approach to security, of course, not just a repressive approach alone but with a persuasive approach by security officers, Wali Blok, in a way to build good communication with the inmates.

In this study two research questions to be answered is how the Wali Blok's role in overcoming interference block security and order in prisons Special Narcotics Jakarta and whether the constraints faced in implementation of the Wali Blok task in tackling problems of security and order in prisons Special Narcotics Jakarta. The method used is a qualitative method with juridical managerial approach. Data collection technique is done by using the interview guidelines. Research informants consisted of the 1 key informants, key informants as 6 people and informants as much as 2 people.

This thesis found that the role of Wali Blok is less effective in tackling problems of security and order in prisons Special Narcotics Jakarta. The indicators are that the communication was one-way awoke and Wali Blok are not pro-active block in detecting the problems faced by prisoners, so many problems in the blocks that are not known by the Wali Blok. The study also found that the appointment of Wali Blok are not based on clear criteria and measurable. Obstacles block the implementation of the Wali Blok's role in tackling problems of security and order is a constraint of human resource officers and infrastructure constraints that are not technology-oriented approach.

Keywords: Prisoners, Wali Blok, Communications, Security and Public Order Disturbance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metode Penelitian	36
H. Tata Urut Tesis.....	43
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
 KHUSUS NARKOTIKA JAKARTA	45
A. Sejarah, Lokasi Dan Kondisi	45
B. Sumber Daya Petugas Lapas Khusus Narkotika Jakarta.....	50
C. Jumlah dan Keadaan Penghuni Lapas Khusus Narkotika Jakarta ...	53
D. Kegiatan Pembinaan Narapidana.....	56

BAB III	PELAKSANAAN PERAN WALI BLOK DALAM MENANGGULANGI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS KHUSUS NARKOTIKA JAKARTA.....	62
	A. Gambaran Informan Penelitian	62
	B. Kehidupan di dalam Lapas Khusus Narkotika Jakarta	64
	C. Komunikasi Antara Wali Blok dan Narapidana di Lapas Khusus Narkotika Jakarta	76
	D. Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di Lapas Khusus Narkotika Jakarta	82
BAB IV	ANALISIS PERAN WALI BLOK DALAM MENANGGULANGI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS KHUSUS NARKOTIKA JAKARTA.....	90
	A. Komunikasi Antara Wali Blok dan Narapidana di Lapas Khusus Narkotika Jakarta	90
	A.1. Proses Komunikasi antara Wali Blok dan Narapidana.....	91
	A.2. Alur Komunikasi Narapidana dengan Wali.....	100
	B. Peran Wali Blok dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta.....	105
	C. Kendala Pelaksanaan Peran Wali Blok dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta	108
BAB V	PENUTUP	117
	A. Kesimpulan	117
	B. Saran/Rekomendasi	119

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Gangguan Keamanan dan ketertiban dalam Lapas/Rutan	5
Tabel 1.2 : Pengaduan Gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam Lapas/Rutan.....	6
Tabel 2.1 : Data Jumlah Karyawan Lapas Khusus Narkotika Jakarta Berdasarkan Golongan (Juni 2009).....	50
Tabel 2.2 : Data Jumlah Karyawan Lapas Khusus Narkotika Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin (Juni 2009).....	51
Tabel 2.3 : Data Jumlah Karyawan Lapas Khusus Narkotika Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Juni 2009).....	51
Tabel 2.4 : Data Jumlah Karyawan Lapas Khusus Narkotika Jakarta Berdasarkan Jabatan (Juni 2009)	52
Tabel 2.5 : Isi Penghuni Lapas Khusus Narkotika Jakarta (Juni 2009)	53
Tabel 2.6 : Data Penghuni Lapas Khusus Narkotika Jakarta Berdasarkan Kasus (Juni 2009)	54
Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan Narapidana Lapas Khusus Narkotika Jakarta.....	69
Tabel 3.2 : Jumlah Hukuman Disiplin Lapas Khusus Narkotika Jakarta 2004 s/d 2009.....	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Tahapan Perubahan Organisasi	21
Gambar 1.2 : Proses Komunikasi.....	23
Gambar 1.3 : Komunikasi Organisasi sebagai faktor Perantara antara Sumber Daya Manusia dan Berfungsinya Organisasi dan Hasil Organisasi	30
Gambar 1.4 : Kerangka Pemikiran Komunikasi dalam Lapas.....	36
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Lapas Klas IIA	47
Gambar 3.1 : Protap Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan	66
Gambar 3.2 : Protap Pelaksanaan Mapenaling	72
Gambar 3.3 : Bagan Proses Pemasarakatan.....	76
Gambar 3.4 : Protap Surat Menyurat	77
Gambar 3.5 : Protap Kunjungan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan	78
Gambar 3.6 : Protap Tindakan Disiplin	83
Gambar 3.7 : Protap Hukuman Disiplin.....	86
Gambar 3.8 : Protap Penanggulangan Gangguan kamtib	88
Gambar 3.9 : Peran Wali Blok di Lapas Khusus Narkotika Jakarta	89
Gambar 4.1 : Alur Komunikasi Wali dengan Narapidana	100
Gambar 4.2 : Pentingnya Komunikasi dalam Lapas.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Judul tesis ini adalah Peran Wali Blok dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas, dengan lokasi penelitian di Lapas Khusus Narkotika Jakarta. Tulisan ini ingin menganalisis bagaimana peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di lapas sehingga tercipta kondisi lapas yang aman dan tertib. Penghuni lembaga pemasyarakatan umumnya terdiri dari dua bagian yaitu tahanan/narapidana yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (*virgin arrest*), dan yang kedua adalah mereka yang sudah lebih dari satu kali masuk penjara yang biasa disebut dengan residivis (*residivist*). Mereka semuanya ditempatkan dalam satu lingkungan dalam seminggu pertama di blok hunian penampungan atau sering kita sebut masa pengenalan lingkungan (*mapenaling*). Selanjutnya, mereka akan dimutasikan ke blok hunian dan digabung bersama para penghuni yang lainnya setelah masa orientasi selesai dilewati.

Pembauran antara narapidana dengan tahanan diharapkan mampu menciptakan suasana keakraban di kalangan penghuni lapas. Namun ternyata pembauran ini sangat berpengaruh pada proses hubungan sosial mereka, dimana biasanya seseorang yang sudah berstatus narapidana sering memberikan informasi

yang kadangkala kurang rasional dan menakutkan bagi para pendatang baru, khususnya bagi mereka yang baru pertama sekali masuk penjara. Keadaan ini menimbulkan ketidaknyamanan para pendatang baru sehingga jalinan sosial diantara mereka menjadi terganggu.

Sebagaimana diutarakan oleh Tubagus Rony (2000 : 71-73), interaksi yang terjadi antara kedua warga binaan ini setiap harinya menyebabkan dua hal yang penting. Pertama, jika interaksi yang hasilnya positif maka yang terjadi adalah saling membutuhkan satu sama lainnya sehingga terjadilah tukar pendapat (*sharing*) diantara mereka. Kedua, adalah interaksi yang hasilnya negatif akan menyebabkan terjadinya gesekan perilaku, karena adanya kepentingan (perebutan wilayah kekuasaan, perdagangan narkoba, masalah perekonomian, dan lain-lain) sehingga hal tersebut dapat menjadi pemicu kerusuhan ditengah-tengah keterbatasan ruang gerak hidup mereka.

Interaksi sosial antara penghuni lembaga pemasyarakatan selain karena perbedaan status secara hukum, juga dipengaruhi oleh dampak psikologis pemidanaan yang mereka alami, khususnya bagi mereka yang baru pertama kali masuk penjara, dimana mereka mengalami *stress* berkepanjangan, perasaan depresi, dan berbagai pengalaman traumatik yang membuat mereka merasa cemas secara berlebihan. Oleh sebab itulah Goffman (1992 : 13) menggambarkan bahwa karakteristik kehidupan yang ada dalam lingkungan penjara adalah sama dengan kehidupan dalam lingkungan Rumah Sakit Jiwa dan Organisasi Militer, dimana institusi secara total merampas dan mengatur hidup mereka dalam keseragaman.

Hilangnya kemerdekaan hidup dalam lingkungan yang tertutup dengan dunia luar dan terbatasnya ruang gerak kehidupan para tahanan dan narapidana secara nyata mempengaruhi pola tingkah laku mereka dalam keseharian. Perilaku para penghuni kelihatannya cenderung sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya selain dikarenakan sempitnya ruang gerak hidup juga dipengaruhi oleh perubahan situasi lingkungan. Hal ini menurut Sarlito W. Sarwono (2001 : 21) adalah suatu proses alamiah dimana kondisi lingkungan akan mempengaruhi perilaku individu. Jika dikaitkan dengan kehidupan para tahanan dan narapidana tersebut, maka perubahan menuju situasi lingkungan kehidupan yang baru di dalam penjara membuat mereka mengalami beragam perubahan perilaku dan keyakinan.

Perubahan perilaku dan keyakinan dalam kehidupan tahanan dan narapidana dalam penjara, lazimnya disebut dengan perubahan sistem nilai, dimana nilai pribadi individu mengalami suatu pergeseran karena tekanan-tekanan dari orang atau kelompok di lingkungannya. Sebagaimana dikatakan oleh Kiesler & Kiesler yang dikutip oleh Sarlito W. Sarwono (2001 : 21), bahwa untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan, dapat terjadi melalui suatu proses konformitas yakni proses perubahan perilaku atau keyakinan karena adanya tekanan dari kelompok, baik yang sungguh-sungguh ada maupun yang hanya dibayangkan saja.

Tekanan kelompok dan sulitnya proses penyesuaian diri para tahanan dan narapidana dalam lingkungan lapas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat berdampak positif dan berdampak negatif dalam kehidupan mereka, tetapi

sebagai makhluk sosial para penghuni tersebut terdorong untuk membentuk atau bergabung dalam suatu kelompok. Namun demikian, disinyalir bahwa pembentukan dan pertumbuhan serta perkembangan kelompok ini nampaknya memicu terjadinya pertentangan yang mengarah pada kerusuhan sosial. Adanya pertentangan kepentingan dan keinginan antara seseorang dengan orang lain dan atau kelompok menurut Sarlito W Sarwono (2001 : 21) adalah menjadi sumber terjadinya konflik yang mengarah pada kerusuhan sosial.

Pertentangan antar kelompok dalam lingkungan para tahanan dan narapidana yang mengarah pada kerusuhan sosial dan berbagai pertentangan ataupun pelanggaran tata tertib yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam lingkungan di dalam lapas adalah suatu persoalan yang harus segera ditangani secara serius. Hal ini dikarenakan bahwa apabila kerusuhan dan pelanggaran serta pertentangan terus berkejolak dalam kehidupan para tahanan dan narapidana akan menghambat proses pemasyarakatan serta dapat membahayakan nyawa petugas juga warga binaan itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ricard C (1995 : 317-329) bahwa munculnya tindakan agresifitas pada narapidana sebagai akibat adanya perasaan tertekan dan teraniaya selama di penjara akan dapat mengganggu pencapaian tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Hasil laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2008, menyebutkan faktor-faktor penyebab gangguan kamtib di lapas/rutan sebagai berikut :

- a. Kelebihan daya tampung dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang sangat tinggi.

- 1) pola perlakuan : cenderung *top down*, *mass treatment*, dan *security approach*.
 - 2) kurangnya pengawasan dan pengendalian : segala kejadian dalam lapas tidak terpantau dan terkendalikan setiap waktu secara maksimal, dan atau tidak terpantau seluruhnya.
- b. Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai HAM tidak merata : pelaksanaan tugas cenderung berdasarkan kebiasaan, dan kurang *respect* terhadap kebutuhan narapidana.
 - c. Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan dan memungkinkan terjadinya suap : perbedaan perlakuan, persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial.
 - d. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan : perilaku apatis, malas, tidak patuh, dan sebagainya.

Berdasarkan data yang tercatat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga tahun 2007 terjadi gangguan kamtib berupa perkelahian, pemberontakan hingga kerusuhan di lapas/rutan sebagai berikut (DitjenPas : 2008) :

1. Gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam Lapas/Rutan.

Perkelahian/Pemberontakan/kerusuhan.

Tabel 1.1

Gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam Lapas/Rutan

TAHUN	JUMLAH KERUSUHAN
2001	8
2002	13
2003	4
2004	14
2005	12
2006	25
2007	14

Sumber : Ditjenpas, 2008

2. Pengaduan

Tabel 1.2
Jumlah Pengaduan Gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam
Lapas/Rutan

TAHUN	JUMLAH PENGADUAN
Tahun 2001	18
Tahun 2002	18
Tahun 2003	25
Tahun 2004	12
Tahun 2005	35
Tahun 2006	49
Tahun 2007	31

Sumber : Ditjenpas, 2008

Materi Pengaduan (contoh tahun 2007)

- Korupsi/pungli : 9 kasus
- Diskriminasi perlakuan : 5 kasus
- Arogansi petugas : 5 kasus
- Penganiayaan : 5 kasus
- Perampasan/pemerasan : 3 kasus.
- Peredaran narkoba : 4 kasus

Tesis tentang kebijakan dan manajemen pencegahan serta penyelesaian konflik antar etnis narapidana dan berbagai macam tindak kekerasan lain di dalam penjara, dimana narapidana terlibat sebagai pelakunya, pernah dilakukan oleh Samsun (2005 : 152-154). Hasil studi yang dilakukan Samsun menemukan sebuah kesimpulan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh narapidana di dalam penjara terjadi karena di dalam Lapas tersebut rentan akan terjadinya konflik kelompok. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitiannya tentang fakto-faktor yang

menjadi pemicu konflik (Studi kasus di Lapas Klas I Cipinang). Selanjutnya, Slamet Prihantara (2005 : 129) juga pernah melakukan penelitian tesis tentang dampak kelebihan daya tampung dan pengamanan di Rutan Klas I Jakarta Pusat, dimana didalam tesis tersebut dikatakan bahwa masalah yang timbul sebagai akibat kelebihan daya tampung antara lain adalah:

1. penghuni merasa tidak nyaman, tingkat stress yang tinggi dan mudah sekali terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik;
2. terbatasnya sumber-sumber kebutuhan primer manusia seperti persediaan air bersih, makanan yang bergizi, tempat berlindung(tempat tidur) yang berpotensi terjadinya konflik antar sesama penghuni;
3. pengawasan terhadap penghuni dan pengunjung yang datang sangat terbatas karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah penghuni yang ada. Dengan demikian sering terjadi penyelhundupan barang-barang terlarang seperti narkoba, minuman keras, dan senjata tajam. Selain itu juga sering terjadi pemerasan dan sebagainya;
4. rentan terjadinya pengelompokan atau *geng-geng* berdasarkan kesukuan, dan asal wilayah penangkapan, sehingga bila terjadi gesekan-gesekan sedikit saja dapat menimbulkan kerusuhan

Kondisi diatas sebenarnya dapat dicegah dan diantisipasi lebih awal oleh petugas lapas, khususnya Wali Blok. Sebagaimana diketahui, Wali Blok memiliki waktu atau porsi lebih dalam berhubungan dengan warga binaan. Hubungan yang intens ini menciptakan hubungan yang cukup bagi Wali Blok untuk mendeteksi

setiap perilaku warga binaan yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Setiap aspirasi yang muncul dalam suatu blok hunian menjadi tanggung jawab wali blok yang ditunjuk, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di blok hunian dapat segera diselesaikan.

Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan lapas, dimana harmonisasi hubungan sosial penghuninya dapat berlangsung dengan baik, adalah impian bagi setiap Unit Pelaksana Teknis manapun, hal ini dapat tercipta salah satunya dengan berjalannya mekanisme pengamanan lapas dengan baik. Pendekatan pengamanan yang baik tentu saja tidak hanya sekedar pendekatan yang represif saja akan tetapi juga dengan pendekatan persuasif oleh petugas pengamanan melalui mekanisme penciptaan komunikasi yang baik antara Wali Blok dengan narapidana. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana komunikasi yang baik antara petugas dengan narapidana yang dapat menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas melalui penelitian tentang; *"Peran Wali Blok dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta"*.

B. Perumusan Masalah

Kondisi fisik lapas yang rawan terhadap kerusuhan sebagai akibat bercampurnya berbagai jenis tindak pidana dan over kapasitasnya penghuni, maupun minimnya sarana dan prasarana keamanan maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya sangat memungkinkan menjadi pemicu berbagai peristiwa kerusuhan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan menempatkan narapidana di lingkungan yang terbatas dan pola kehidupan yang dipaksakan akan menimbulkan tekanan-tekanan yang bersifat non fisik. Dengan ditematkannya narapidana di lembaga pemasyarakatan akan menyebabkan perubahan corak kehidupan dari yang bersangkutan, paling tidak merubah kehidupan yang bebas pada masyarakat kepada alam kehidupan yang serba terbatas dan dipaksakan dalam lingkup masyarakat narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Adanya gesekan konflik antara tahanan dan narapidana maupun tahanan/narapidana dengan petugas harus dapat dianalisis sebagai sebuah kondisi yang mau tidak mau akan dihadapi dalam kondisi yang serba terbatas.

Peran Wali Blok yang mampu menciptakan jalinan komunikasi yang baik antara tahanan dan narapidana serta antara tahanan dan narapidana dengan Wali Blok sangat diperlukan dalam hal ini. Wali Blok dituntut baik secara verbal maupun non verbal menciptakan arah dan alur komunikasi yang secara psikologis menempatkan tahanan dan narapidana sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki rasa kepercayaan diri untuk bangkit menjadi manusia yang lebih baik. Dengan demikian, mereka akan dengan tulus dan ikhlas mengikuti setiap program pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak lapas, yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi lapas yang kondusif dan aman.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta;
2. Merumuskan kendala-kendala yang dihadapi Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Jakarta.

E. Kegunaan Penelitian

1. *Secara Akademis*; dapat menjadi bahan kajian ilmiah dalam masalah penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas serta peran petugas khususnya Wali Blok dalam mendeteksi, mencegah dan menangani gangguan keamanan dan ketertiban di lapas;
2. *Secara Praktis*; dapat menjadi pedoman bagi petugas lapas dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas.

F. Kerangka Pemikiran

Hubungan antara petugas pemasyarakatan dengan narapidana merupakan hubungan yang harus terbina dengan baik untuk membentuk peri kehidupan yang aman dan tertib di dalam lapas. Kondisi kehidupan lapas yang serba penuh dengan

keterbatasan memerlukan sebuah wahana agar dengan kondisi yang ada narapidana tidak semakin tertekan yang pada akhirnya berujung pada perselisihan, perkelahian yang mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban.

Untuk lebih memahami konsep peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di lapas akan diuraikan secara sistematis tentang konsep peran, kehidupan di dalam lapas, gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan pengertian komunikasi itu sendiri.

1. Peran

Makna peran, menurut Suhardono (1993 :3), dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Pengertian peran dalam kelompok pertama di atas merupakan pengertian yang dikembangkan oleh paham strukturalis di mana lebih berkaitan antara peran-peran sebagai unit kultural yang mengacu kepada hak dan kewajiban yang secara normatif telah dicanangkan oleh sistem budaya. Sedangkan pengertian peran

dalam kelompok dua adalah paham interaksionis, karena lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran.

Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peran sosial. Menurut Horton dan Hunt (1993 : 129-130), peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968 : 41-45) dinamakan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.

Abu Ahmadi (1982 : 50) mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Meninjau kembali penjelasan tentang peran secara historis, Bilton, et al. (1981 : 18) menyatakan,

peran sosial mirip dengan peran yang dimainkan seorang aktor, maksudnya orang yang memiliki posisi-posisi atau status-status tertentu dalam masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam cara-cara tertentu yang bisa diprediksikan, seolah-olah sejumlah "naskah" (scripts) sudah disiapkan untuk mereka. Namun harapan-harapan yang terkait dengan peran-peran ini tidak hanya bersifat satu-arah. Seseorang tidak hanya diharapkan memainkan suatu peran dengan cara-cara khas tertentu, namun orang itu sendiri juga mengharapkan orang lain untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap dirinya. Seorang dokter dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sangat pribadi kepada pasien dan mengharapkan pasiennya menjawab dengan jujur. Sebaliknya si pasien mengharapkan dokter untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan informasi yang bersifat pribadi ini ke pihak lain. Jadi peran sosial itu melibatkan situasi saling-mengharapkan (mutual-expectations).

Harapan-harapan terpenting yang melingkupi peran sosial bukanlah sekedar pernyataan-pernyataan tentang apa yang sebenarnya terjadi, tentang apa yang akan dilakukan seseorang, di luar kebiasaan, dan seterusnya, tapi norma-norma yang menggarisbawahi segala sesuatu, di mana seseorang yang memiliki status diwajibkan untuk menjalankannya. Jadi, peran-peran itu secara normatif dirumuskan, sedangkan harapan-harapan itu adalah tentang pola perilaku ideal, terhadap mana perilaku yang sebenarnya hanya bisa mendekati. Dalam kaitannya dengan peran yang harus dilakukan, tidak semuanya mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak

jarang terjadi kurangberhasilan dalam menjalankan perannya. Dalam ilmu sosial, ketidakberhasilan ini terwujud dalam *role conflict* dan *role strain*.

Menurut Hendropuspito (1989 : 105-107), konflik peran (*role conflict*) sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati suatu pola, seseorang harus melanggar pola lain. Setidaknya ada dua macam konflik peran. Yakni, konflik antara berbagai peran yang berbeda, dan konflik dalam satu peran tunggal. Pertama, satu atau lebih peran (apakah itu peran independen atau bagian-bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. Kedua, dalam peran tunggal mungkin ada konflik inheren.

Role Strain diartikan sebagai adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran yang sama. Satu hal yang menyebabkan terjadinya *role strain* adalah karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan berbagai status lain yang berbeda. Sampai tingkatan tertentu, masing-masing interaksi ini merumuskan peran yang berbeda, karena membawa harapan-harapan yang berbeda pula. Maka, apa yang tampak sebagai satu peran tunggal mungkin dalam sejumlah aspek sebenarnya adalah beberapa peran. Misalnya, status sebagai karyawan bagian pemasaran (*sales*) eceran di sebuah perusahaan, dalam arti tertentu sebenarnya membawa beberapa peran: sebagai bawahan (terhadap atasan

di perusahaan itu), sebagai sesama pekerja (terhadap karyawan-karyawan lain di perusahaan itu), dan sebagai penjual (terhadap konsumen dan masyarakat yang ditawarkan produk perusahaan tersebut).

2. Lembaga Pemasyarakatan

Dunia penjara yang kini dikenal dengan nama lapas merupakan tempat berlangsungnya salah satu bentuk kehidupan yang tidak banyak dikenal orang. Selama ini orang hanya mengenalnya sebagai sebuah tempat bagi para penjahat atau pelaku kejahatan di masyarakat, sebagai bentuk imbalan dari perbuatannya yang merugikan masyarakat. Goffman (1961 : 13) menggambarkan bahwa karakteristik yang terdapat dalam lingkungan penjara tradisional adalah sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer menjadi satu institusi total (*total institutions*) yang menampung dan mengatur hidup orang banyak di dalamnya secara seragam.

Kehidupan di lapas oleh Snarr (1996 : 65) digambarkan sebagai suatu komunitas yang unik, karena terdiri dari orang-orang yang dengan alasan yang sama (melanggar hukum), ditempatkan pada tempat yang sama dalam jangka waktu tertentu. Situasi inilah yang menimbulkan banyak tantangan dalam mengelola sebuah komunitas penjara, termasuk dalam hal ini masalah keamanan, keselamatan, dan kenyamanannya sebagai tempat tinggal. Hal ini memunculkan sikap negatif narapidana, mulai dari masa bodoh, tidak mau mengikuti program pembinaan, walaupun mau mengikuti kegiatan lebih karena terpaksa, tidak mau

bekerja, frustrasi, melawan petugas, pelarian bahkan melakukan kerusuhan dan pemberontakan (*prison riot*).

Suasana kehidupan di Lapas memang sangat berbeda dengan suasana kehidupan di luar lapas. Pertama, di dalam lapas hampir semua aspek kehidupan dilakukan di tempat yang sama. Kedua, kehidupan dalam lapas sifatnya hampir monoton. Ketiga, kehidupan di lapas diatur oleh suatu aturan yang sangat ketat. Keempat, semua aktivitas di dalam lapas selalu diatur berdasarkan ketentuan yang telah digariskan secara birokrasi dari atas (Dalil Adi Subroto : 1995).

Hampir semua narapidana menjalani kehidupan dalam penjara dengan penuh keterpaksaan, karena pada umumnya lingkungan penjara bukanlah lingkungan yang menyenangkan. Untuk dapat menjalani masa pidananya sampai selesai, maka setiap narapidana harus mampu beradaptasi dengan suasana lapas.

Menurut Davis (1995 : 283-284), bagaimana narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan lapas tergantung pada beberapa faktor seperti :

1. **Pengalaman sebelumnya**
Jika mereka sebelumnya sudah memiliki pengalaman di penjara, mereka akan memiliki pemahaman terhadap kehidupan penjara. Hal ini akan membuat mereka lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan lapas.
2. **Kondisi hubungan dengan dunia di luar penjara**
Kehilangan kontak dan hubungan dengan dunia luar akan membawa pengaruh bagi narapidana. Perasaan tidak nyaman dan penderitaan akan timbul jika mereka memikirkan tentang kehidupan di luar, rumah dan keluarganya.
3. **Sikap terhadap hukuman yang dijalani**
Faktor lain adalah sikap mereka terhadap hukuman yang mereka jalani. Beberapa orang merasa bersalah dan malu, namun ada juga yang tidak menunjukkan penyesalan.

Namun demikian, tidak ada satu faktor yang tetap tentang bagaimana reaksi narapidana terhadap kehidupan dalam penjara. Berbagai riset menunjukkan adanya berbagai perilaku adaptasi yang berbeda. John Irwin mengemukakan bahwa ada tiga reaksi yang menjadi karakteristik narapidana, yang biasanya muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi dalam penjara, yaitu (Davis, 1995 : 284) :

1. *Jailing*

Merupakan karakteristik yang paling banyak terdapat pada sebagian besar narapidana. Narapidana biasanya masih membawa perilaku dari kehidupan sebelumnya sewaktu mereka masih di luar penjara, serta tahu bagaimana cara memanfaatkan kesempatan dalam keseluruhan lembaga untuk mencapai keuntungan maksimal dan status lewat keributan dan “gang-gang”.

2. *Doing time*

Mereka dalam penjara hanya berpikir untuk melewati masa pidananya secepat mungkin. Mereka ini biasanya tidak akan tertarik untuk ikut program rehabilitasi yang diselenggarakan institusi, kecuali jika hal tersebut lebih memudahkan kehidupannya di penjara atau membuatnya lebih cepat keluar dari penjara.

3. *Gleaning*

Merupakan tipe narapidana yang memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengikuti pendidikan, konseling, terapi, dan program kerja untuk meningkatkan kesempatan mendapat kebebasan bersyarat dan untuk merubah kehidupan mereka.

Proses adaptasi tersebut akan membawa pengaruh terhadap kondisi kehidupan dalam lapas, termasuk dalam segi keamanan maupun pembinaan. Sebagai tempat pemidanaan bagi narapidana, secara umum lapas memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas pengamanan terhadap narapidana. Standar pengamanan dalam setiap lapas ditentukan oleh jenis lapas, dimana lapas dengan sistem

Maximum Security memiliki penanganan keamanan yang lebih ketat dibandingkan dengan lapas yang lain.

3. Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di Lapas

Gangguan keamanan dan ketertiban di lapas bukanlah hal baru dan bahkan tidak asing lagi kita dengar. Banyak faktor yang memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas. Faktor laten pemicu gangguan keamanan dan ketertiban yang selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut gangguan kamtib dapat dilihat pada dua paradigma, yaitu :

Two paradigms are frequently used to explain serious prison violence. In one, violence is said to result from psychological tensions induced by crowded conditions (see, e.g., Cox et al., 1984). In the second, violence is seen as one among several important control mechanisms deeply rooted in the authoritarian, economic, sexual, and racial order of prison (see, e.g., Sykes, 1958; McCleery, 1961; Irwin, 1980).

(Crowding, Social Control, and Prison Violence: Evidence from the Post-Ruiz Years in Texas Author(s): Sheldon Ekland-Olson Source: Law & Society Review, Vol. 20, No. 3 (1986), pp. 389-421 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Law and Society Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3053581>)

Terjemahan bebas :

Dua paradigma yang seringkali menjadi penyebab serius kekerasan dalam penjara adalah tekanan psikologi karena kondisi kelebihan penghuni. Kedua, mekanisme kontrol yang terlalu ketat, secara ekonomi, seksual, dan rasial.

Dua hal diatas menjadi ciri khas dari kehidupan dalam lapas. Narapidana dan tahanan selama di dalam lapas wajib mengikuti aturan yang berlaku dalam Lapas, jadwal hidup yang diatur oleh peraturan melalui pengawasan yang ketat

dari petugas. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Thomas (1987 : 114)

bahwa :

Total institutions as "a place of residence and work where a large number of like situated individuals, cut of from the wider society for an appreciable period of time together lead an enclosed, formally administrered round of life.

Terjemahan bebas :

Penjara adalah sebagai tempat tinggal dan bekerja dimana kebanyakan seperti keadaan individu dapat menghargai waktu yang singkat, bersama pemimpin ditutup, bentuk resmi yang diatur seputar kehidupan mereka.

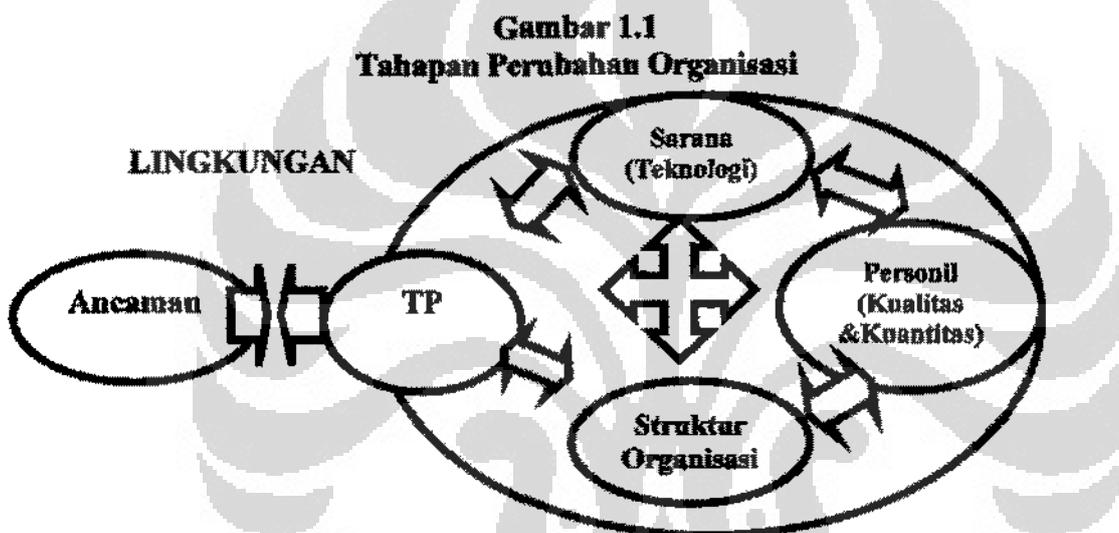
Penerapan sistem peraturan yang kaku dan keras dipercaya sebagai penyebab munculnya perkelahian kelompok. Karena dengan kondisi tertekan yang semakin tinggi membuat para narapidana terpacu melakukan pemberontakan tanpa terencana. Kondisi lain dari timbulnya suatu gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Lapas secara tidak langsung mengakitkan kondisi struktur sosial yang ada di Lapas sebagai penyebab timbulnya kerusuhan. Asumsinya adalah munculnya kekerasan baik secara individu maupun kelompok merupakan akibat adanya penyimpangan dari struktur normative yang berlaku, pola perilaku maupun budaya kerja yang ada di lembaga tersebut, secara sistem aturan penempatan penghuni berlaku. Adanya perlakuan yang tidak sama, kesenjangan pemberian hak-hak diantara narapidana karena latar belakang status sosial maupun status kepemimpinan di kelompok narapidana. selain itu perubahan sistem penjagaan yang diperketat dan kaku dapat mengganggu keseimbangan hubungan antara petugas dengan narapidana, karena narapidana semakin menjadi berani melawan karena perasaan tertekannya (Corkle, 1995 :317-329).

Pada sisi lain kekerasan dan kerusuhan di dalam lingkungan Lapas ditinjau dari manajemen konflik memberikan asumsi bahwa apapun yang menjadi pemicu gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan Lapas secara pasti menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem penjara tersebut. Baik kekerasan secara individu maupun kelompok merupakan hasil dari adanya kegagalan dalam sistem manajemen penjara, seperti adanya sistem keamanan yang kurang akurat, tingginya frekuensi keluar masuk karyawan/petugas dari luar dan kurangnya disiplin diantara petugas keamanan, sehingga terjadi penjagaan pintu keamanan yang ceroboh, pengecekan narapidana yang tidak secara menyeluruh serta banyaknya kerumunan yang dibiarkan. (Corkle, 1995 : 317-329).

Menurut peneliti dengan gambaran diatas secara langsung menjelaskan bahwa diperlukan perbaikan dalam manajemen pengelolaan Lapas. Sebagai organisasi Lapas memerlukan identifikasi kekuatan dan kelemahannya sehingga mampu menanggulangi setiap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan narapidana. Leavitt (1992 : 21) menyatakan bahwa organisasi dapat diubah melalui pengubahan struktur, teknologi dan atau orang-orangnya. Pendekatan struktur adalah yang menyangkut aplikasi prinsip-prinsip perancangan organisasi yang misalnya: desentralisasi, tanggung jawab jabatan, garis wewenang yang tepat, penciptaan pembagian kerja dan lainnya. Pendekatan teknologi berkaitan dengan diubahnya teknik-teknik yang dipakai dengan teknologi baru; perubahan ini dapat membawa konsekuensi pula pada perubahan struktur organisasi (menjadi pendekatan tekno-struktur). Bila pendekatan struktural dan teknik bermaksud untuk memperbaiki prestasi kerja organisasi melalui pengubahan situasi kerja

yang tepat, maka pendekatan- pendekatan orang dimaksudkan untuk mengubah secara langsung perilaku karyawan melalui pemusatan dan ketrampilan, sikap, persepsi dan pengharapan mereka sehingga diharapkan akan melaksanakan tugas dengan lebih efektif

Secara ringkas tahapan perubahan dalam organisasi menurut Leavitt diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : JH Leavitt, Psikologi Manajemen

3. Komunikasi Antara Wali Blok dengan Narapidana /Tahanan

Salah satu upaya konkret yang dapat dilakukan oleh pihak lapas dalam menanggulangi gangguan kamtib adalah dengan menciptakan hubungan komunikasi yang baik antara petugas dan narapidana. Dengan komunikasi yang baik akan diketahui akar permasalahan yang bisa memicu gangguan kamtib sehingga penyelesaiannya pun dilakukan dengan komunikasi yang baik pula.

Hubungan antara petugas dan narapidana bahkan secara khusus diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.UM.04.11-447

tahun 1987 tentang hubungan antara petugas dengan narapidana, anak Negara/anak sipil, tahanan dan klien masyarakat. Surat edaran tersebut intinya mengatur antara lain :

1. Hubungan antara petugas dengan mereka yang dibina berdasarkan Pancasila dan tercermin dalam hubungan yang manusiawi sebagai sesama makhluk tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang wajib dihormati;
2. Petugas harus selalu ingat bahwa tugas utamanya ialah membina sesama manusia yang sehat agar selama dan terutama setelah lepas atau bebas menjalani pidana/tindakan dapat menjadi warga Negara yang baik dan berguna;
3. Melakukan komunikasi yang aktif :
 - Tegur sapa yang pantas;
 - Mengetahui kesulitan-kesulitan/keluhan-keluhan, hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dan pemecahannya.

Inti dari hubungan yang diatur dalam surat edaran tersebut adalah terciptanya hubungan komunikasi yang baik antara Pembina dalam hal ini Wali Blok dan yang dibina (narapidana) sehingga setiap pesan program yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan dalam aplikasinya sesuai dengan yang diharapkan.

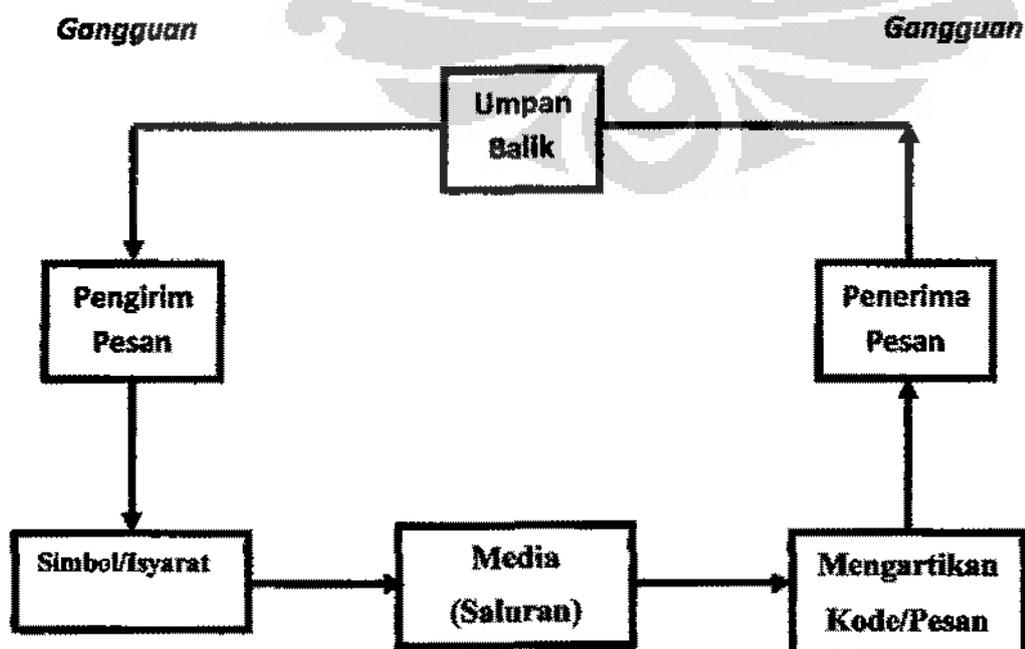
Komunikasi adalah transfer informasi dan pemahaman dari satu orang ke orang lain. Ini merupakan suatu jalan untuk mencapai pada ide, fakta, pikiran, dan

nilai-nilai yang lain. Komunikasi dapat menjadi jembatan untuk mencapai suatu pengertian antar individu dengan mereka berbagi apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui (Davis dalam Citroboto, 1982 : 1). Dengan jembatan ini orang dapat merasa aman untuk mengatasi ketidaktahuan yang menjadi penyebab terbatasnya satu individu dengan individu yang lain. Komunikasi adalah apa yang dipahami oleh penerima, bukan apa yang diucapkan oleh pengirim.

Selama penerima belum mampu memahami pesan yang disampaikan oleh pengirim, maka sebenarnya belum terjadi komunikasi antara keduanya.

Dengan demikian komunikasi memiliki komponen-komponen dasar sehingga kedua belah pihak yang berkomunikasi dapat saling mengerti. Komponen-komponen tersebut adalah pengirim pesan, penerima pesan dan pesan itu sendiri. Proses komunikasi dapat dilihat pada skema berikut ini :

Gambar 1.2
Proses Komunikasi



1. Pengirim pesan (sender) dan isi pesan/materi

Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Pesan dapat verbal atau non verbal dan pesan akan efektif bila diorganisir secara baik dan jelas.

Materi pesan dapat berupa :

- a. Informasi
- b. Ajakan
- c. Rencana kerja
- d. Pertanyaan dan sebagainya

2. Simbol/isyarat

Pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seorang manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan, (tangan, kepala, mata dan bagian muka lainnya). Tujuan penyampaian pesan adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku atau menunjukkan arah tertentu.

3. Media/penghubung

Adalah alat untuk penyampaian pesan seperti ; TV, radio surat kabar, papan pengumuman, telepon dan lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi dsb.

4. Mengartikan kode/isyarat

Setelah pesan diterima melalui indera (telinga, mata dan seterusnya) maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol/kode dari pesan tersebut, sehingga dapat dimengerti /dipahaminya.

5. Penerima pesan

Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari sipengirim meskipun dalam bentuk code/isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim

6. Umpan Balik (feedback)

Umpan Balik adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Tanpa umpan balik seorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap sipenerima pesan Hal ini penting bagi manajer atau pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima dengan pemahaman yang benar dan tepat. Umpan balik dapat disampaikan oleh penerima pesan atau orang lain yang bukan penerima pesan. Umpan balik yang disampaikan oleh penerima pesan pada umumnya merupakan balikan langsung yang mengandung pemahaman atas pesan tersebut dan sekaligus merupakan apakah pesan itu akan dilaksanakan atau tidak

Umpan balik yang diberikan oleh orang lain didapat dari pengamatan pemberi umpan balik terhadap perilaku maupun ucapan penerima pesan. Pemberi umpan balik menggambarkan perilaku penerima pesan sebagai reaksi dari pesan yang diterimanya. Umpan balik bermanfaat untuk memberikan informasi, saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan membantu untuk memunculkan

kepercayaan serta keterbukaan diantara komunikan, juga umpan balik dapat memperjelas persepsi.

7. Gangguan

Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi akan tetapi mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi, karena pada setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Gangguan adalah hal yang merintang atau menghambat komunikasi sehingga penerima salah menafsirkan pesan yang diterimanya.

Pada dasarnya komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktifitas hubungan antara manusia atau kelompok. Jenis komunikasi terdiri dari:

1. **Komunikasi Verbal** mencakup aspek-aspek berupa ;
 - a. **Perbendaharaan Kata-kata (Vocabulary)**. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, karena itu olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi.
 - b. **Kecepatan (Racing)**. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat.
 - c. **Intonasi suara**: akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proposional merupakan hambatan dalam berkomunikasi.

- d. *Humor*: dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Dugan (1989), memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stress dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis dan harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi.
- e. *Singkat dan jelas*. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti.
- f. *Timing* (waktu yang tepat) adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan.

2. Komunikasi Non Verbal

Komunikasi non verbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata dan komunikasi non verbal memberikan arti pada komunikasi verbal.

Yang termasuk komunikasi non verbal :

- a. *Ekspresi wajah*
Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang.
- b. *Kontak mata*, merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan

untuk memperhatikan bukan sekedar mendengarkan. Melalui kontak mata juga memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengobservasi yang lainnya

- c. **Sentuhan** adalah bentuk komunikasi personal mengingat sentuhan lebih bersifat spontan dari pada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan.
- d. **Postur tubuh dan gaya berjalan.** Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya.
- e. **Sound (Suara).** Rintihan, menarik nafas panjang, tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Bila dikombinasikan dengan semua bentuk komunikasi non verbal lainnya sampai desis atau suara dapat menjadi pesan yang sangat jelas.
- f. **Gerak isyarat,** adalah yang dapat mempertegas pembicaraan . Menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi seperti mengetuk-ngetukan kaki atau mengerakkan tangan selama berbicara menunjukkan seseorang dalam keadaan stress bingung atau sebagai upaya untuk menghilangkan stress

Komunikasi mempunyai empat fungsi utama di dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu sebagai kendali (kontrol atau pengawasan), motivasi,

pengungkapan emosional, serta informasi. Keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut (Robbins, 1996 :310) :

- a. Komunikasi menjalankan fungsi kontrol jika komunikasi tersebut bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam kelompok atau organisasi. Setiap organisasi mempunyai hirarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh para karyawan. Bila karyawan, misalnya diminta untuk terlebih dulu mengkomunikasikan setiap keluhan yang berkaitan dengan pekerjaan kepada atasan langsungnya sesuai dengan uraian tugasnya, atau sesuai dengan kebijakan perusahaan, berarti komunikasi itu menjalankan suatu fungsi kontrol.
- b. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar.
- c. Komunikasi dapat digunakan sebagai pengungkapan emosional dari setiap karyawan dengan jalan menggunakan komunikasi tersebut untuk menunjukkan kekecewaan atau rasa puas mereka terhadap perusahaan.
- d. Komunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data guna mengenali dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Fungsi ini dapat berhubungan dengan peran komunikasi untuk mempermudah pengambilan keputusan.

Davis dan Newstorm mengemukakan bahwa komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu organisasi, komunikasi menjadi faktor yang sangat vital. Organisasi tidak akan dapat bertahan tanpa komunikasi. Jika tidak ada komunikasi, karyawan tidak akan tahu apa yang harus dilakukannya, apa yang dilakukan oleh atasannya, atasan tidak akan mendapat masukan dari bawahan, serta atasan juga tidak akan dapat menyampaikan instruksi kepada bawahannya. Koordinasi kerja tidak mungkin terjadi, dan organisasi mungkin akan ambruk jika tidak ada komunikasi. Kerjasama menjadi sangat tidak mungkin, karena orang tidak akan dapat mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan dan rasakan kepada orang lain. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu dari komunikasi akan mempengaruhi jalannya organisasi. Uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.3

Komunikasi Organisasi Sebagai Faktor Perantara Antara Sumber Daya Manusia dan Berfungsinya Organisasi dan Hasil Organisasi



Sumber : Pace dan Faules (ed) Mulyana, 2001 : 386

Menurut Onong Uchjana Effendi (1997 :76), komunikasi dalam suatu organisasi berlangsung dalam tiga bentuk, yakni horizontal, vertikal dan diagonal. Masing-masing bentuk komunikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari atas ke bawah (*downward communication*) dan dari bawah ke atas (*upward communication*). Ini maksudnya komunikasi yang berasal dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik. Komunikasi vertikal dalam manajemen sangat penting sekali, oleh karena jika hanya satu arah saja dari pimpinan ke bawahan, proses manajemen besar kemungkinan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

b. Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal adalah komunikasi antara seseorang dengan seseorang lainnya yang sama kedudukannya. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, maka komunikasi horizontal seringkali berlangsung dalam suasana sedang istirahat, sedang pulang atau sedang berekreasi.

c. Komunikasi Diagonal

Komunikasi diagonal sering juga dinamakan komunikasi silang, yakni komunikasi yang berlangsung antara seseorang dengan seseorang lainnya dalam kedudukan yang berbeda dan unit yang berbeda. Orang-orang yang terlibat dalam komunikasi diagonal pada umumnya tidak menampakkan kekuatan seperti halnya pada komunikasi vertikal, dan juga tidak menunjukkan keakraban sebagaimana halnya pada komunikasi horizontal.

Menurut Furtwengler (2002 : 67), minimal ada enam kunci untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, yakni :

1. Kelengkapan Komunikasi

Biasanya komunikasi yang tidak lengkap tidaklah salah. Pembicara hanya percaya pendengarnya memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada dirinya. Tidak adanya maksud buruk tidaklah mengubah kenyataan bahwa asumsi ini memiliki potensi untuk menciptakan banyak masalah. Dampak kesalahan tersebut terhadap hubungan antara kedua belah pihak. Pendengar mungkin merasa dihianati, dikambinghitamkan, meskipun tanpa unsur-unsur kesengajaan. Sikap ini mudah menular. Pendengar memberi tahu anggota tim yang lain mengenai pengkhianatan itu dan memperingatkan mereka untuk berhati-hati sehingga hal tersebut tidak terjadi pada mereka. Dampak pada moral sangatlah efektif.

2. Mendengarkan

Pendengar yang kurang percaya diri tidak akan sering mengajukan pertanyaan. Mereka takut kelihatan bodoh. Sebaliknya mereka akan mengulangi apa yang dikatakan. Demikian pula pendengar yang terlalu percaya diri juga tidak akan mengajukan pertanyaan. Masalahnya adalah karena tidak memikirkan pendekatan yang akan digunakan dan semata-mata hanya bertindak.

3. Hormat

Dalam hal berkomunikasi hendaknya setiap karyawan dapat menghormati kemampuan orang lain, memiliki kemampuan untuk belajar dengan cepat, memiliki minat terhadap kesejahteraan orang lain, mengakui bahwa gagasan orang lain berharga dan mencoba untuk mengangkat derajat orang lain.

4. Gaya

Terdapat empat jenis gaya yang secara umum terjadi dalam berkomunikasi, yaitu diktator, kooperatif, patuh dan parental. Gaya diktator merupakan gaya yang mendominasi percakapan dan meminta agar gagasan-gagasan diterima. Diktator cenderung mudah jengkel, frustrasi dan menghasut teman kerjanya untuk membuat kerusuhan. Gaya kooperatif ditunjukkan dengan suara yang dapat menyegarkan jiwa pada waktu terjadi ketidaksepakatan sehingga tim dapat terus maju. Gaya patuh adalah lawan dari spektrum gaya diktatorial. Karyawan yang lebih menyukai gaya ini seringkali pendiam dan membiarkan orang lain memaksakan kehendak mereka pada dirinya. Dan terakhir adalah gaya parental, yaitu gaya dalam berkomunikasi yang mengharuskan bertindak sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang tua. Hal ini baik jika seseorang masih dalam usia anak-anak dan tidak memiliki banyak pengalaman.

5. Suasana Hati

Seseorang yang dalam keadaan normal bersuasana hati positif dan suportif, pada hari yang jelek akan menjadi kasar, tidak sensitif dan kadang-kadang suka bertengkar dalam komunikasinya. Orang yang terbiasa dengan suasana hati yang jelek akan menunjukkan sikap kasar, tidak sensitif, dan suka bertengkar serta menghambat komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan kesalahan, ketinggalan *deadline* dan penurunan efektivitas tim. Suasana hati yang jelek juga menular dan jika tidak segera diambil tindakan, dapat menyebabkan tingkat absensi yang semakin meningkat, sikap *can do* berubah menjadi *can't do* dan penurunan tajam pada produktivitas karyawan.

6. Nada

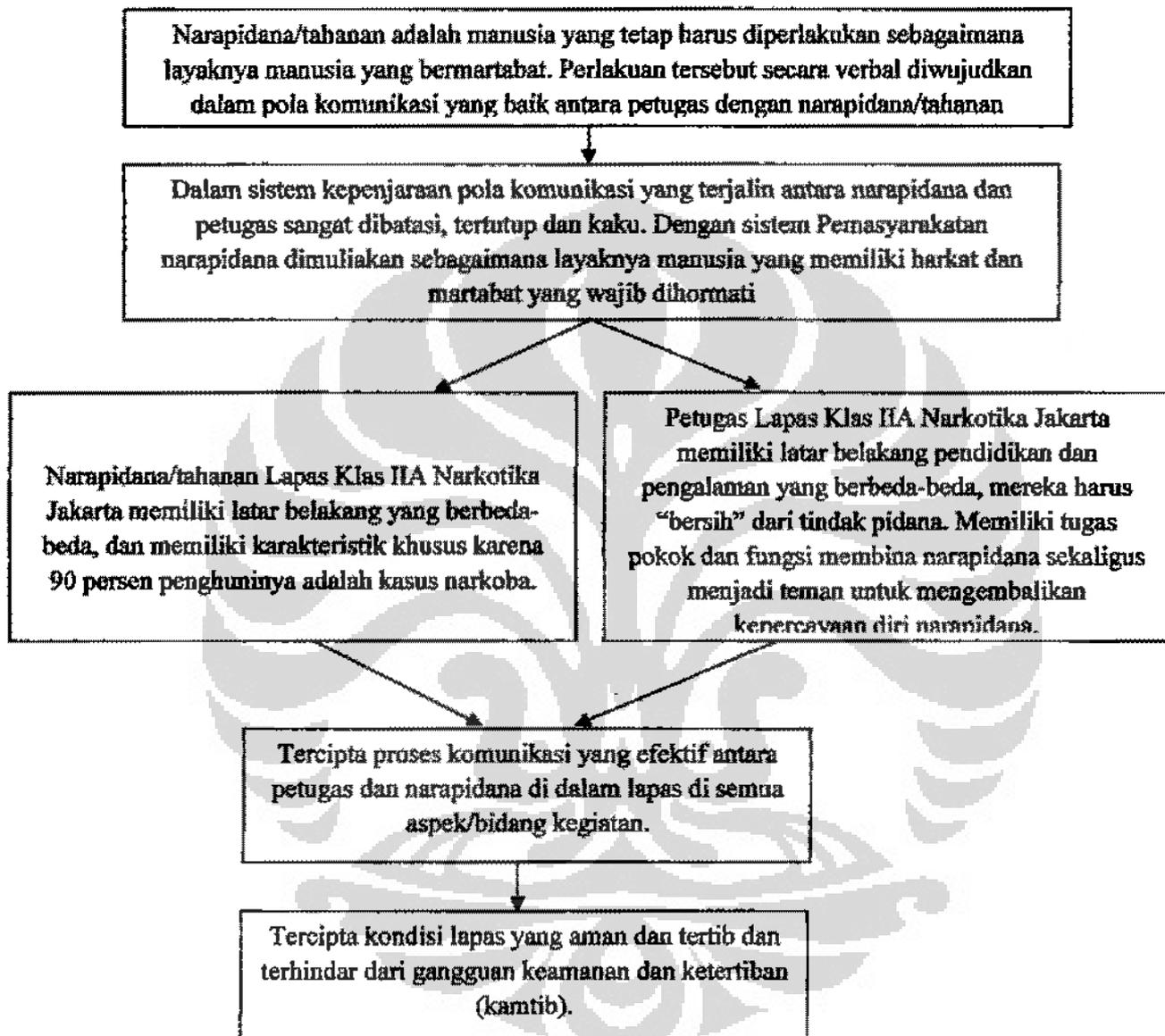
Nada yang secara umum muncul dalam komunikasi diantaranya adalah nada positif, menyemangati, faktual, tidak emosional, mencela. Tentu nada yang positif, tidak emosional dan yang menyemangati akan memiliki dampak positif pada kinerja karena dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Komunikasi merupakan aktivitas dasar setiap manusia. Dengan komunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik di lingkungan rumah tangga, lingkungan pekerjaan, masyarakat atau dimana saja manusia berada. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidak dapat dipungkiri. Begitu pula dengan organisasi, komunikasi juga merupakan kebutuhan yang sangat mendasar,

karena dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Dale Furtwenger (2002 : 73) bahwa komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan kesalahan, ketinggalan *deadline* dan penurunan efektivitas tim. Penurunan efektivitas tim tersebut disebabkan oleh kinerja anggota-anggota tim yang tidak sesuai dengan tuntutan tugas sebagai akibat dari adanya komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi dalam rangka mewujudkan kinerja tim secara optimal.

Demikian juga dalam kehidupan di lembaga pemasyarakatan komunikasi yang baik akan menjadikan organisasi lapas secara keseluruhan menjadi efektif karena setiap pesan baik keluhan, saran, sosialisasi aturan dan sebagainya tersampaikan dengan baik. Secara ringkas kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran Komunikasi dalam Lapas



G. Metode Penelitian

G.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang

(subjek) itu sendiri. Mengenai penelitian kualitatif ini, Cresswell (2002 : 39) menyatakan bahwa :

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang dipergunakan sebagai cara atau sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, kemudian tercipta suatu gambaran holistik (menyeluruh) dalam pengolahan kalimat yang terdiri dari kata-kata, selanjutnya informasi yang diperoleh dari informan secara terperinci dibuat sebagai bahan laporan yang disusun dalam sebuah latar alamiah.

Pendekatan penelitian adalah yuridis manajerial yaitu pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku, dan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk bidang antropologi budaya. Disebut juga metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif .

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa tesis ini bertujuan untuk mengetahui peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta, maka dalam upaya menggali informasi tentang topik tersebut, peneliti juga melakukan pengumpulan

data yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan topik dimaksud. Hal lain yang bertalian dengan topik penelitian ini adalah proses komunikasi antara Wali Blok dengan narapidana atau sebaliknya, termasuk mekanisme penyelesaian masalah yang dilakukan apabila terjadi tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, merupakan aspek-aspek yang juga peneliti gali dari beberapa informan. Penggalan informasi atau data yang relevan dengan hal tersebut diungkap melalui melalui pendekatan kualitatif.

Pemilihan metode penelitian kualitatif ini, peneliti lakukan dengan suatu pertimbangan bahwa dalam mengetahui situasi proses sosial atau gejala-gejala sosial yang ada ataupun yang dibuat dan dibentuk melalui interaksi sosial diantara penghuni Lapas dapat tergali secara realistis. Kemudian data-data alamiah yang ditemukan atau yang terkumpul disortir dan disusun secara sistematis dalam rangkaian kalimat tanpa adanya rekayasa pemikiran peneliti dalam memanipulasi data-data temuan di lapangan. Dengan kata lain data-data temuan lapangan di deskripsikan (dipaparkan) secara jujur.

Selanjutnya penelitian yang peneliti rancang ini diperuntukkan menggali informasi dari informan kunci, informan penting maupun informan tambahan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti dalam penyusunan tesis ini, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi mengenai peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta.

2. Menggali informasi tentang kondisi penghuni terutama tentang potensi konflik yang bisa berakibat pada gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta.
3. Menggali dan mengumpulkan data-data faktual mengenai fakta-fakta atau kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan narapidana baik secara individu, maupun kelompok di Lapas Khusus Narkotika Jakarta, kemudian menyusun data tersebut secara sistematis dalam uraian kalimat tanpa melakukan rekayasa.
4. Melakukan pengukuran dengan cermat dalam mengembangkan konsep yang relevan, namun bukan untuk melakukan pengujian fakta ataupun suatu hipotesa, yaitu dengan melakukan pendekatan yang dapat diterapkan sebagai peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam melakukan analisis terhadap hasil tesis ini, peneliti dapat melakukannya dengan lebih leluasa, namun bukan melebar ke aspek yang tidak relevan atau menyimpang dari topik penelitian. Analisis secara leluasa dalam hal ini adalah bahwa peneliti dapat mengungkapkan kenyataan yang ditemukan di lapangan secara lebih lengkap dan alamiah. Oleh karena itu dalam penelitian tentang peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta, peneliti dapat menganalisa data yang terkumpul dari lapangan melalui teknik wawancara mendalam dan menyajikan data temuan lapangan tersebut secara lebih leluasa dan lebih menyeluruh.

G.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, peneliti ikut tergabung dalam kegiatan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang sedang berlangsung, peneliti berada bersama Wali Blok dan narapidana, untuk lebih memahami keadaan atau perasaan subjek yang diteliti. Dengan demikian peneliti dapat melihat langsung kondisi penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban oleh Wali Blok di Lapas Khusus Narkotika Jakarta. Meskipun demikian peneliti menyadari agar terhindar dari subjektivitas maka peneliti perlu membatasi diri dengan tidak ikut menjadi bagian dari kelompok yang ada.

b. Wawancara

Akurasi dari pengumpulan data penelitian ini digali melalui wawancara langsung kepada subjek yang terkait langsung dengan peran penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas. Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka dilakukan wawancara secara triangulasi kepada subjek penelitian. Subjek tersebut adalah informan, yang menangani langsung bidang yang diteliti, subjek yang merasakan langsung dampak dari proses yang tengah diteliti, dan selanjutnya dilakukan pemilihan informan yang sekiranya dapat memberikan

informasi secara lugas, luas, terpercaya dan mendalam mengenai topic penelitian.

Selanjutnya dalam upaya menggali informasi yang lengkap tentang topik penelitian ini, maka peneliti membuat suatu panduan wawancara agar terfokus atau terarah dan berstruktur kepada pihak *informan* yang dilakukan secara acak pertanyaan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Informan yang dijadikan narasumber terbagi menjadi informan kunci yaitu Kepala Lapas Khusus Narkotika Jakarta, Informan Penting yaitu petugas pengamanan, Wali Blok dan narapidana, dan informan tambahan yaitu mantan narapidana dan keluarga narapidana.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan sebagai alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk menyelusuri dengan cara membaca buku-buku, kebijakan, peraturan dokumen, hasil penelitian, maupun tulisan-tulisan artikel yang mendukung dan berkaitan dengan tulisan ini.

G.3. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah penelitian maka peneliti hanya membatasi ruang lingkup lokasi penelitian di Lapas Khusus Narkotika Jakarta saja. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah Lapas Khusus Narkotika Jakarta memiliki struktur bangunan blok hunian bertingkat yang mendukung keamanan serta dilengkapi dengan sarana prasarana keamanan yang memadai, dimana 90 persen penghuni adalah narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kondisi

tersebut semakin membuat kondisi lapas semakin ketat dalam aturan dan komunikasi dengan pihak luar, sehingga peran Wali Blok dalam konteks penyelesaian masalah narapidana baik menyangkut keamanan dan pembinaan sangat diperlukan. Dengan dasar tersebut peneliti tertarik meneliti bagaimana peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta.

G.4. Cara Penyajian Data

Penyajian data-data yang dikumpulkan dari lapangan dilakukan secara sistematis melalui suatu proses analisis yang tersaji dalam untaian kalimat yang terdiri dari kata-kata, sebagai ciri penyajian penelitian dengan metode kualitatif. Dengan demikian data yang telah terkumpul diproses ataupun diolah, disajikan setelah diedit terlebih dahulu untuk memeriksa dan meyakinkan apakah data yang diperoleh cukup mampu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya dan selanjutnya dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah.

G.5. Analisis Data

Dalam hal analisis data, peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, catatan di lapangan maupun dari studi literatur. Selanjutnya data-data tersebut menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sebagai hasil penelitian tesis. Dalam penelitian tesis ini

analisis data dilakukan dari sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan terus berlangsung sampai didapatkan kesimpulan hasil penelitian tesis.

H. Tata Urut Tesis

Dalam penulisan tesis ini akan dibagi dalam lima bab, tujuan dan maksud dari sistematika penulisan adalah untuk mempermudah memberikan gambaran secara garis besar dari bab- perbab, dengan penjelasan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, pertanyaan penelitian tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan tata urutan tesis.
- BAB II** : Berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yaitu Lapas Khusus Narkotika Jakarta. Berisi tentang organisasi dan tata kerja Lapas Khusus Narkotika Jakarta, tujuan, visi dan misi organisasi, kekuatan personel dan data pendukung lainnya.
- BAB III** : Pelaksanaan Peran Wali Blok Dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta. Dalam bab ini akan dibahas bagaimana komunikasi yang terjadi antara Wali Blok dengan

narapidana dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas.

BAB IV : Analisis. Pembahasan penelitian dikaitkan dengan teori dan praktek yang dilakukan berdasarkan konsepsional teori yang ada dipadukan dengan temuan dilapangan, berisi tentang komentar dari data bab III dengan kerangka pemikiran, serta pembuktian komentar dengan data dan temuan dilapangan.

BAB V : Penutup. Berisi kesimpulan penelitian berdasarkan data dan teori yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Kemudian peneliti memberikan saran-saran baik terhadap instansi Lapas Khusus Narkotika Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan pihak terkait lainnya dalam kerangka penanggulangan gangguan kamtib di lapas.

BAB II

GAMBARAN UMUM

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA JAKARTA

A. Sejarah, Lokasi dan Kondisi Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Lapas Khusus Narkotika Jakarta terletak di Jalan Raya Bekasi No. 170A, dimana dulunya merupakan bagian dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang kemudian dibangun Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Lapas ini diresmikan oleh Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 30 Oktober 2003 merupakan salah satu lapas yang berfungsi sebagai tempat pemidanaan bagi tindak kriminal khusus kasus narkoba. Pendirian lapas ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematang Siantar Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura.

Lapas Khusus Narkotika Jakarta adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tugas pokok dari Lapas Narkotika adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik pengguna narkoba dan obat terlarang lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas Narkotika mempunyai fungsi :

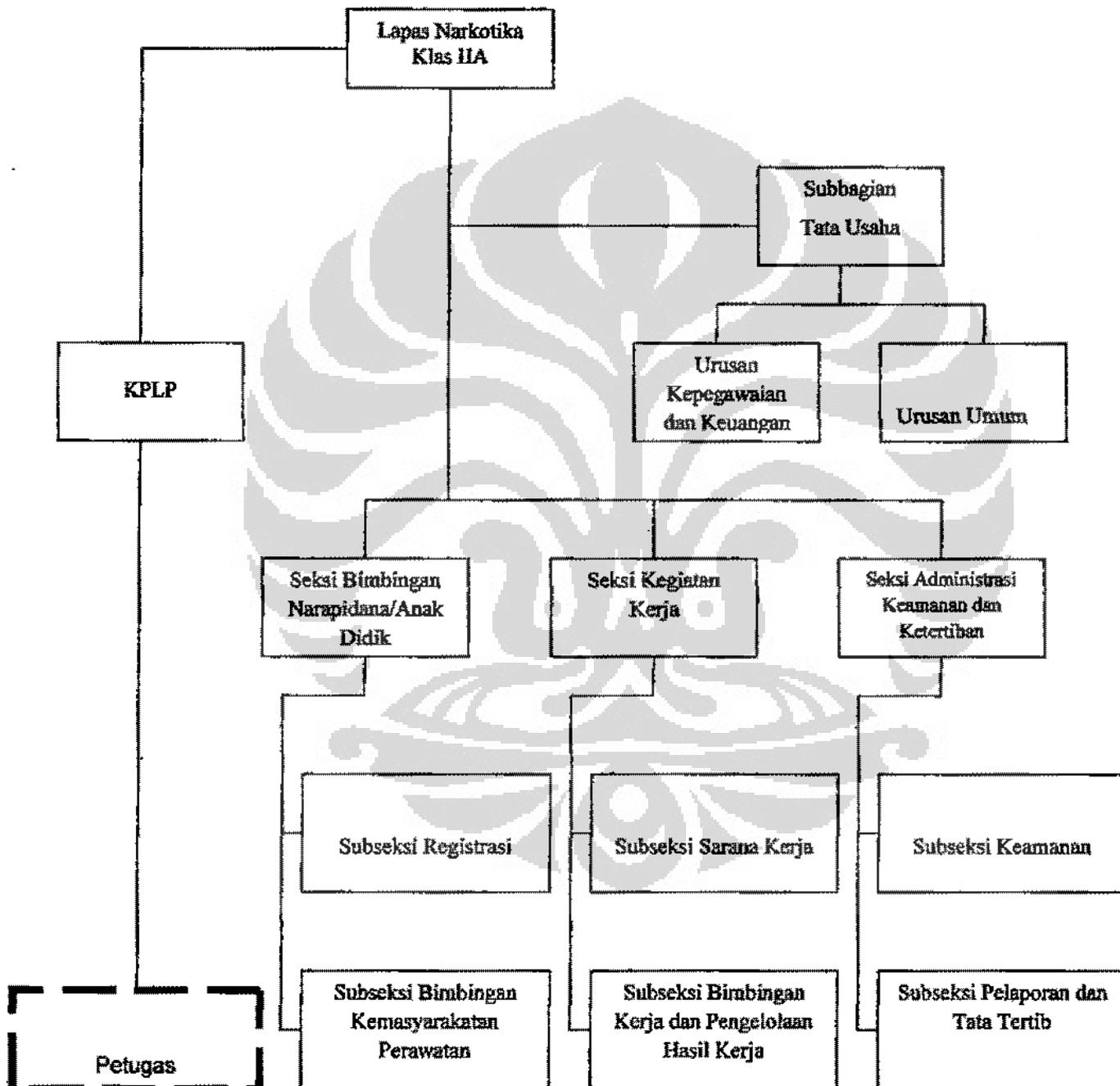
1. Melaksanakan pembinaan narapidana / anak didik kasus narkoba.
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana / anak didik kasus narkoba.
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang membawahi :

1. Sub bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Urusan Umum
2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik, terdiri dari:
 - a. Subseksi Registrasi
 - b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Perawatan
3. Seksi Kegiatan Kerja, terdiri dari:
 - a. Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
 - b. Subseksi Sarana Kerja
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari:
 - a. Subseksi Keamanan
 - b. Subseksi Pelaporan dan Tata tertib
5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari petugas-petugas pengamanan antara lain Rupam dan Ruport.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta, 2009

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terdiri dari 3 (tiga) gedung perkantoran dan 4 (empat) blok hunian.

- a. Gedung I (gedung utama) terdiri dari 3 lantai, yang merupakan gedung pegawai bagian non teknis (sub. Bagian tata usaha dan ruang kalapas);
- b. Gedung II terdiri dari 2 lantai dan merupakan gedung pegawai teknis dan sarana kegiatan pembinaan narapidana;
- c. Gedung III terdiri dari 2 lantai dan merupakan gedung khusus bagi pegawai dan kepala KPLP.

Blok Hunian terdiri dari 4 (empat) blok dengan perincian sebagai berikut :

- Blok A

Jumlah kamar yang ada di blok A adalah 60 (enam puluh) kamar, dengan tiap kamar isinya 7 (tujuh) orang. Kapasitas isi blok 420 (empat ratus dua puluh) orang. Blok A berlantai 3 (tiga). .Penghuni lanta 2 dan lantai 3 Blok A biasanya dihuni oleh warga binaan kelas menengah dan atas, dilantai dasar dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai status sebagai tamping.

- Blok B

Blok B dipakai sebagai tempat tutupan sunyi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran maupun membuat masalah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Lamanya tutupan sunyi tergantung dari kebijakan dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga

Pemasyarakatan, berapa minggu dia harus di Blok B lantai 3 (tiga). Blok B juga dipakai untuk karantina warga binaan pemasyarakatan apabila warga binaan pemasyarakatan tersebut sakit parah dan supaya tidak menular maka warga binaan pemasyarakatan tersebut di karantina juga di Blok B lantai 3 (tiga) sayap kiri depan.

- Blok C

Blok C berlantai 3 (tiga). Kapasitas isi 3 (tiga) orang = 48 (empat puluh delapan) kamar. Kapasitas isi 5 (lima) orang = 36 (tiga puluh enam) kamar. Kapasitas penghuni 324(tiga ratus dua puluh empat) orang, Blok C di huni oleh warga binaan pemasyarakatan kelas menengah.

- Blok Isolasi

Blok Isolasi mempunyai kapasitas 16 (enam belas) kamar, kapasitas isi kamar 1 (satu) orang. Saat ini Blok Isolasi hanya dihuni oleh 2 (dua) orang warga binaan pemasyarakatan. Mereka ditempatkan di Blok Isolasi karena mereka bukan kasus narkoba tetapi kasus GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan kasus pembunuhan. Dulunya Blok Isolasi hanya dipakai untuk orang-orang warga negara asing. Warga negara asing khususnya orang Nigeria saja. Namun penempatan warga negara asing semua berkulit hitam ditempatkan di Blok Isolasi, namun akhirnya mereka juga dipindahkan dengan alasan bahwa Blok Isolasi akan dijadikan sebagai tempat penghuni para warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai kasus teroris, pembunuhan, Sedangkan warga negara asing khususnya yang berkulit hitam ditempatkan untuk membaur dengan warga negara Indonesia

lainnya dan warga negara asing selain mereka yang memiliki kulit hitam. Orang Nigeria akhirnya di tempatkan di Blok B lantai 3 (tiga) dan lantai 2 (dua) sayap kiri.

B. Sumber Daya Petugas Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Dalam mendukung fungsi organisasi dan kelancaran operasional kegiatan, Lapas Khusus Narkotika Jakarta memiliki sejumlah petugas yang menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Data mengenai jumlah petugas tersebut sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.1
Data Jumlah Karyawan Lapas Khusus Narkotika Jakarta
Berdasarkan Golongan (Juni 2009)

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	126
3	Golongan III	70
4	Golongan IV	1
Total		197

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Tabel 2.2

**Data Jumlah Karyawan Lapas Khusus Narkotika Jakarta
Berdasarkan Jenis Kelamin (Juni 2009)**

No	Golongan	Jumlah
1	Laki-laki	150
2	Perempuan	47
Total		197

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Tabel 2.3

**Data Jumlah Karyawan Lapas Khusus Narkotika Jakarta
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Juni 2009)**

No	Golongan	Jumlah
1	SLTA	86
2	Sarjana Muda	25
3	S1	75
4	S2	11
Total		197

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Tabel 2.4
Data Jumlah Karyawan Lapas Khusus Narkotika Jakarta
Berdasarkan Jabatan (Juni 2009)

No	Golongan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	12
2	Staf Umum	11
3	Staf Kepegawaian dan Keuangan	8
4	Staf Bimkemaswat	29
5	Staf Registrasi	6
6	Staf Kegiatan Kerja	8
7	Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban	9
8	Staf KPLP	16
9	Petugas Penjagaan	98
Total		197

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Dengan jumlah petugas sebanyak 197 orang, diharapkan dapat efektif menangani jumlah penghuni yang selalu bertambah setiap minggunya. Kapasitas maksimal penghuni yang dapat ditampung oleh lapas ini adalah sejumlah 1084 orang, dan pada saat penelitian ini dilakukan (Juni 2009) jumlah narapidana/tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta berjumlah 2.239 orang.

C. Jumlah dan Keadaan Penghuni Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Sebagian besar tindak pidana yang dilakukan terpidana yang kini berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta sangat beragam dan mereka berasal dari berbagai daerah. Dan untuk melakukan program pembinaan dituntut suatu kejelian dari petugas agar pembinaan yang diberikan tepat sasaran.

Dibawah ini peneliti sajikan tabel isi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta bulan Juni 2009.

Tabel 2.5

Isi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta (Juni 2009)

No	Pidana	Jumlah	Keterangan
<u>Narapidana</u>			
1	Hukuman Mati	-	-
2	Seumur Hidup	4	-
3	B I	1.612	Pidana diatas satu tahun
4	B II A	36	Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun
5	B II B	-	Pidana tiga bulan ke bawah
6	B III S	79	Pidana Pengganti Denda/Subsida
Jumlah Narapidana		1.731	
<u>Tahanan</u>			
1	A.I	-	Tingkat penyidikan
2	A.II	232	Tingkat Penuntutan
3	A.III	253	Tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri

4	A.IV	13	Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi
5	A.V	10	Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung
	Jumlah Tahanan	508	
Total Keseluruhan 2.239 Orang			

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika adalah lapas yang dikhususkan bagi pembinaan narapidana/tahanan kasus narkoba, sehingga mayoritas penghuni lapas ini adalah narapidana/tahanan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berikut tabel data penghuni berdasarkan jenis kasusnya :

Tabel 2.6
Data Penghuni Lapas Khusus Narkotika Jakarta
Berdasarkan Kasus (Juni 2009)

No	Tindak Pidana	Jumlah
1	Narkotika :	
	– Pengedar	645
	– Pemakai	769
	Jumlah	1.414
2	Psikotropika :	
	– Pengedar	379
	– Pemakai	424
	Jumlah	803
3	Lain-lain :	22
	Total	2.239

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Khusus Narkotika Jakarta.

Tindak pidana lain-lain yang dimaksud pada tabel 2.6 diatas adalah tindak pidana selain tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Di Lapas Khusus Narkotika Jakarta terdapat 22 kasus diluar tindak pidana narkoba, yaitu antara lain kasus penganiayaan, perampokan, pemalsuan dan sebagainya. Umurnya narapidana/tahanan dengan kasus tersebut merupakan mutasi dari lapas lain akibat tindakan/hukuman disiplin atau sesuatu yang mengakibatkan pengamanannya maximum security.

Dengan jumlah penghuni sebanyak 2.239 orang sudah melebihi daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Kondisi akan terus mengalami perubahan, baik bertambah ataupun berkurang. Perubahan (berkurang dan bertambah) ini disebabkan oleh antara lain :

- Pemindahan (mutasi) narapidanan ke Lembaga Pemasyarakatan;
- Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan lain-lain.
- Bebas tuntutan Hukum
- Bebas Murni.

D. Kegiatan Pembinaan Narapidana

Sistem pembinaan yang dilaksanakan didasarkan pada Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai Proses, akan tetapi sebagai lapas khusus narkoba yang berfungsi sebagai tempat pemidanan dan pembinaan bagi narapidana kasus narkoba, maka Lapas Khusus

Narkotika Jakarta memiliki kegiatan pembinaan yang agak berbeda dengan lapas-lapas pada umumnya.

Beberapa program pembinaan yang telah dilaksanakan di Lapas ini adalah :

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan sikap prososial, sehingga mereka nantinya dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindakan penyalahgunaan narkoba setelah mereka bebas.

2. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis dilaksanakan oleh dokter dan perawat. Bentuk kegiatannya :

- a) Pemeriksaan Kondisi Kesehatan dan status narapidana baru.
- b) Identifikasi penyakit yang diderita.
- c) Detoksifikasi.
- d) Dokumentasi pemakai IDU dan non IDU.
- e) Pemeriksaan Urine bagi pegawai dan narapidana.
- f) Kontrol dokter ke blok-blok penghuni.
- g) Kegiatan rawat inap dan rawat jalan.

3. Pembinaan Mental Rohani.

Pembinaan mental dan rohani bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian, seperti kegiatan kerohanian Islam yang berupa pengajian rutin, dzikir bersama, sholat berjamaah. Selain itu juga kegiatan gereja secara rutin, kegiatan vihara, termasuk juga kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan.

4. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan.

Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan seminar, pemberdayaan perpustakaan, dan berbagai kegiatan penyuluhan lain. Sedangkan pembinaan wawasan kebangsaan dimaksudkan untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air dan NKRI. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah diadakannya pendidikan baris berbaris (PBB) dan upacara setiap tanggal tujuh belas.

5. Pembinaan olahraga dan kesenian

a. Olahraga. Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari, pagi dan sore sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari pagi, senam pagi massal, sepak bola, bola voli, tenis meja, dan catur.

b. Kesenian. Kegiatan kesenian dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat-bakat seni narapidana, sehingga mereka dapat

menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Kegiatan kesenian yang dilaksanakan antara lain vokal group, group band.

6. Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja

Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja dimaksudnya untuk meningkatkan kemampuan residen dan mengembangkan bakat residen. Kegiatan yang dilakukan antara lain sablon, menjahit, peternakan dan perikanan.

Untuk prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lapas Khusus Narkotika Jakarta ini tidak jauh berbeda dengan pola pembinaan di lapas lain yang ada di Indonesia. Akan tetapi, ada satu perbedaan yang dimiliki oleh lapas ini, yaitu adanya program terapi dan rehabilitasi bagi narapidananya yang mengalami ketergantungan narkoba, yang disebut dengan *Therapeutic Community* (TC). Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan adalah sebagai berikut :

1. Mapenaling

Mapenaling, atau singkatan dari masa pengenalan lingkungan merupakan program awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke Lapas Khusus Narkotika Jakarta ini. Narapidana menjalani program ini selama 1 minggu, dimana selama masa tersebut narapidana akan mendapatkan pembekalan tentang kondisi lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok, dan sebagainya.

2. Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan

Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara, serta melatih disiplin narapidana. Program ini dijalani oleh narapidana setelah mereka selesai menjalani program mapenaling. Bentuk kegiatannya antara lain berupa Pelatihan Peraturan Baris Berbaris (PBB), serta pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 dan upacara hari-hari besar nasional.

3. Program terapi dan rehabilitasi (T & R)

Sebagai lapas yang diharapkan dapat menjadi OSC (One Stop Center) untuk penanggulangan narkoba, maka pelaksanaan Program T & R ini mencakup adanya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Kegiatan pelayanan rehabilitasi medis dilakukan langsung oleh tim medis Lapas Narkotika Jakarta. Kegiatan-kegiatan medis yang dilakukan yaitu pemeriksaan rutin, pemeriksaan berkala, serta program seminar kesehatan. Sedangkan untuk rehabilitasi sosial dilakukan dengan metode TC dan Criminon. Rehabilitasi sosial ini juga mencakup program pembinaan intelektual, dan pembinaan mental spiritual.

4. Program pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja

Setelah menjalani program terapi dan rehabilitasi, maka selanjutnya narapidana yang telah memenuhi syarat dapat diajukan ke sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) untuk mulai bekerja pada bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuannya.

Narapidana pekerja tersebut biasa dikenal dengan istilah tamping. Mereka dapat ditempatkan di kegiatan menjahit, sablon pertamanan, tempat ibadah, maupun membantu pekerjaan-pekerjaan petugas yang lain.

Selain itu narapidana/tahanan juga diberi kesempatan pula untuk mengisi waktu mereka dengan berbagai kegiatan antara lain :

1. Kegiatan olah raga yang terdiri dari :

- Olah raga sepak bola
- Olah raga bola Volley
- Lari pagi dan Jalan santai

2. Kegiatan Kerohanian

Kegiatan kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terdiri dari :

- Kegiatan Kerohanian di Masjid
- Kegiatan Kerohanian di Vihara
- Kegiatan Kerohanian di Gereja

3. Kegiatan Rekreasi

Kegiatan rekreasi untuk warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terdiri dari :

- Bermain musik bersama di Gasebo
- Bermain Band

4. Kegiatan dapur

5. Kegiatan pembuatan taman

6. Kegiatan bengkel kerja

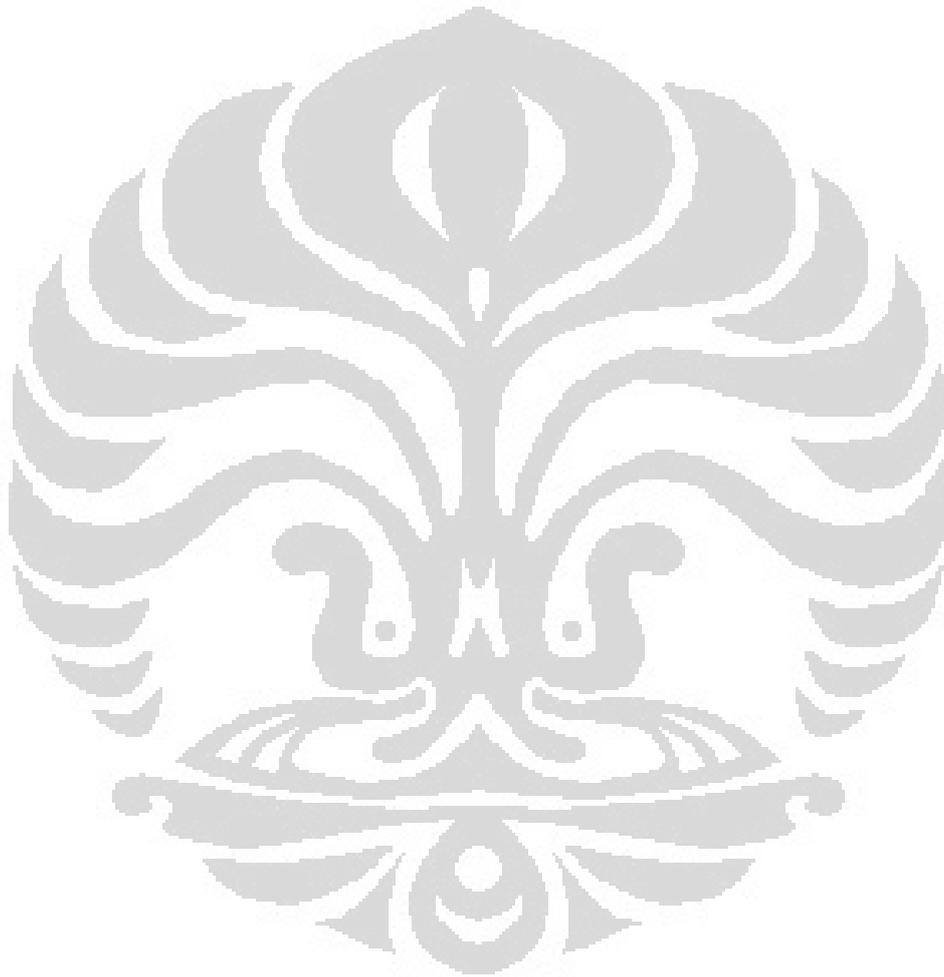
Kegiatan bengkel kerja terdiri dari :

- Kegiatan pembuatan patung
- Kegiatan sablon
- Kegiatan jahit menjahit
- Kegiatan Servis motor

7. Kegiatan Senam

Kegiatan senam warga binaan pemasyarakatan meliputi :

- Senam pagi massal setiap hari Senin dan Rabu.
- Senam Aerobic bersama para petugas dan warga binaan



BAB III

PELAKSANAAN PERAN WALI BLOK DALAM MENANGGULANGI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS KHUSUS NARKOTIKA JAKARTA

A. Gambaran Informan Penelitian Tesis

Informan penelitian dalam tesis ini terdiri dari informan kunci, informan penting dan informan tambahan. Informan kunci yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, dalam penelitian ini adalah untuk memberikan perijinan terhadap segala bentuk penelitian yang peneliti lakukan di lokasi penelitian sehingga penelitian dapat berlangsung dengan baik. Informan penting merupakan informan utama dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada, sementara informan tambahan merupakan informan yang dipilih untuk klarifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh informan utama sehingga data menjadi lengkap dan berimbang.

Informan penting terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu :

1. **Abdul Rahman *al* Alex (AR)**; terpidana kasus narkotika dengan masa hukuman 14 tahun (bebas murni tahun 2018) dan telah menjalani masa pidananya selama 5 tahun. Abdul Rahman *al* Alex saat ini dipercaya menjadi Tamping ruang KPLP, yaitu bertugas membersihkan ruangan dan membantu pekerjaan staf KPLP;

2. **Marjohan al Jack (MJ)**; terpidana kasus narkoba dengan masa hukuman 18 tahun (bebas murni tahun 2022) dan telah menjalani masa pidananya selama 5 tahun. Saat ini Marjohan al Jack diberikan tugas sebagai Pemuka Taman, yang membawahi beberapa tamping pekerja taman dan bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan taman di lingkungan lapas;
3. **Samsul Komar al Samko (SK)**; terpidana narkoba dengan masa hukuman 5 tahun (bebas murni tahun 2012) dan telah menjalani masa pidananya selama 2 tahun 3 bulan;
4. **Heru Yuswanto, AMd. IP, SH (HY)**, sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP);
5. **Agus Imam Taufik, AMd. IP, SH (AI)**, sebagai Komandan Regu Pengamanan (danrupam) sekaligus sebagai Wali Blok berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapas Khusus Narkoba Jakarta Nomor : W7.Es-1702-PK.04.10 tahun 2009 tentang Pengangkatan Wali Blok.
6. **Sarwono, AMd. IP, S. Sos (SW)**, sebagai staf KPLP sekaligus sebagai Wali Blok berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapas Khusus Narkoba Jakarta Nomor : W7.Es-1702-PK.04.10 tahun 2009 tentang Pengangkatan Wali Blok.

Wawancara terhadap informan penelitian dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2009 hingga 29 Agustus 2009. Untuk informan narapidana wawancara

dilakukan pada saat jam dinas dengan lokasi di ruang Gazebo Lapas Khusus Narkotika Jakarta, sementara untuk wawancara dengan informan petugas dilakukan setelah jam dinas informan yang bersangkutan sehingga tidak mengganggu pekerjaan utama dari informan penelitian.

Informan tambahan terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :

1. **Tasyaya Purnama (TP)**, Mantan Narapidana Lapas Khusus Narkotika Jakarta, yang bebas pada tanggal 13 Juli 2008, saat ini bekerja pada sebuah perusahaan swasta sebagai akuntan;
2. **Keluarga Narapidana**, khusus wawancara terhadap keluarga narapidana, peneliti lakukan pada saat jam berkunjung dan memilih dua keluarga narapidana, yaitu keluarga narapidana Abdul Rahman *al* Alex (AR) dan keluarga narapidana Marjohan *al* Jack (MJ).

B. Kehidupan di dalam Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Lapas Khusus Narkotika Jakarta merupakan salah satu lapas yang dilengkapi dengan sistem pengamanan yang bersifat *maximum security*, yaitu sistem pengamanan yang sangat ketat. Hal ini terlihat dari kondisi bangunan fisik lapas yang berupa tembok tinggi dan dikelilingi dengan pagar berdinding tebal dan kawat berduri, pintu jeruji yang berlapis-lapis, sistem penjagaan yang dilengkapi dengan kamera monitor, sistem pembukaan dan penguncian blok yang ketat, serta sistem pengeledahan dan pemeriksaan yang ketat baik terhadap narapidana maupun pengunjung.

Penerapan sistem pengamanan yang bersifat *maximum security* tersebut terlihat melalui:

1. Arus keluar masuk tamu, petugas dan narapidana harus melewati pintu portir yang dilengkapi dengan peralatan *x-ray* dan *walk through* serta melarang barang-barang bawaan tamu tidak boleh masuk ke dalam blok
2. Narapidana hanya boleh dikunjungi oleh keluarga yang masih mempunyai hubungan segaris (istri, anak, orangtua, saudara sekandung)
3. Adanya penerapan *sterile area* dalam lapas, dengan memberlakukan ketentuan bahwa:
 - a. Hanya petugas tertentu yang boleh memasuki wilayah steril area dengan prosedur dan ijin yang ketat dari Kalapas atau Kepala KPLP
 - b. Penerapan *sterile area* ini juga didukung oleh sistem peralatan elektronik yang dapat mengacak alat komunikasi *handphone* (*blank spot area*)
 - c. Pegawai Lapas Narkotika tidak diperkenankan membawa barang-barang di wilayah *sterile area*, kecuali untuk keperluan dinas
 - d. Pegawai lapas tidak diperkenankan menerima tamu di wilayah *sterile area*
4. Dibentuk regu pengamanan yang bertanggung jawab menciptakan kondisi aman dan tertib dalam lapas
5. Regu pengamanan bertugas selama 24 jam, dengan mendapat tugas waktu jaga secara rotasi/bergiliran
6. Apel dan penghitungan isi narapidana dalam blok dilakukan secara tertib setiap harinya, pada waktu pagi, siang, dan sore hari.

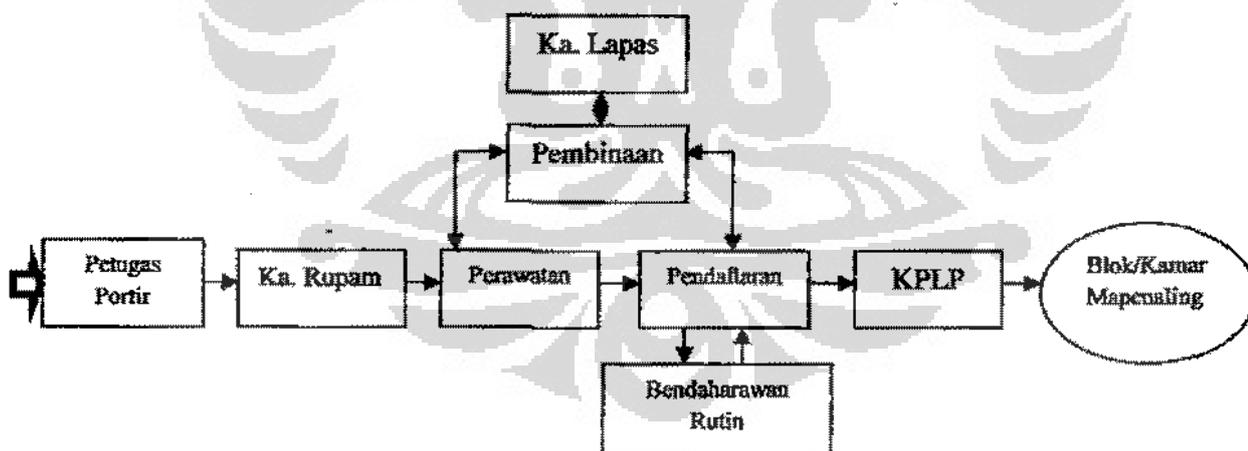
7. Narapidana tidak boleh meninggalkan blok tanpa seijin regu jaga blok

Kehidupan seorang narapidana di lapas diawali dengan proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan narapidana untuk selanjutnya menjalani masa pidananya hingga akhirnya bebas. Hidup di dalam lapas narapidana dihadapkan pada aturan-aturan yang ketat sesuai dengan prosedur tetap yang ada, aturan tersebut berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis.

Tahapan prosedur tetap (Protap) penerimaan, pendaftaran, dan penempatan narapidana ketika masuk lapas dapat digambarkan pada bagan berikut ini :

Gambar 3.1

Protap Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan



Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan

Gambar diatas menunjukkan alur dimulainya kehidupan narapidana baru di lapas. Mulai saat itu mereka akan dihadapkan pada turan-aturan di lapas, memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kehidupan

mereka secara tidak langsung dikontrol oleh petugas. Di dalam lapas setiap narapidana diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan dan aturan keamanan yang diterapkan oleh pihak lapas berdasarkan Sistem Pemasyarakatan.

Pada tahapan proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan narapidana, bentuk-bentuk komunikasi yang disampaikan oleh petugas terhadap narapidana baru umumnya berlangsung kaku karena dalam suasana yang tegang.

"pada saat kita masuk lapas ini, selain kita dicek badan sama petugas, kita juga ditanya tentang identitas, kasus, lama pidana, sesuai dengan yang ada di berkas, kalo kita salah jawab,,kita dimarah sama petugas,, kadang-kadang suka ga kedengaran karena rame dan petugas banyak...jadi kita malah ga denger apa yang ditanya bapaknya....."

(Samsul Komar *al* Samko)

"pengalaman saya dan juga mungkin temen-temen semua pasti mengalaminya, waktu pertama kali masuk lapas narkoba ini,, petugasnya kn masih muda-muda, jadi mereka kalau nanya suka agak kasar dan kalau salah jawab ya dibentak..kalau kebangetan ya digampar...jadi apa yang ditanya mesti dijawab dengan benar..padahal kita kan dah stress duluan dengan kondisi yang baru itu.."

(Tasyaya Purnama, Mantan Narapidana)

Berdasarkan penelitian terhadap informan dan melihat kondisi secara langsung di lokasi penelitian, perikehidupan di Lapas Khusus Narkotika Jakarta tergolong cukup kondusif sebagai tempat pembinaan narapidana, hal ini dapat dilihat dengan berjalan dengan baiknya setiap program pembinaan yang dijalankan di lapas, pemenuhan hak dan kewajiban dasar bagi narapidana dan tingkat disiplin petugas dalam menjalankan tugas. Pendapat senada juga

disampaikan oleh semua informan yang menilai kondisi lapas dengan sebutan "baik-baik" atau "biasa-biasa saja".

Demikian pula dengan hubungan antar sesama narapidana lain, tergolong baik walaupun juga kerap diwarnai dengan selisih paham, dan perkelahian antar narapidana, karena dianggap merupakan hal yang biasa dalam kehidupan di dalam lapas yang serba dengan keterbatasan.

"...pernah perselisihan antar mulut ajak pak, tidak sesuai pendapat"
(Abdul Rahman *al* Alex)

"...biasa-biasa saja harmonis, tapi yah kadang-kadang kehidupan pasti ada perselisihan" (Samsul Komar *al* Samko)

"hubungan dengan sesama narapidana baik, perselisihan umumnya pendapat aja, dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan"
(Marjohan *al* Jack)

Hal diatas juga diakui oleh informan petugas, bahwa perselisihan, gesekan antar narapidana merupakan hal yang tak terelakkan, layaknya manusia yang juga hidup diluar lapas karena lapas merupakan miniatur masyarakat luas sehingga apa yang terjadi di dalam lapas kurang lebih sama dengan kehidupan diluar. Perselisihan atau gesekan yang terjadi dapat diatasi dengan baik.

"di dalam lapas memang acapkali terjadi gesekan-gesekan atau benturan-benturan kecil, tapi tidak menimbulkan suatu dampak atau bentuk kerusuhan"
(Agus Imam Taufik)

“perselisihan antar napi pernah terjadi, bahkan bisa dikatakan sering, penyebabnya over kapasitas, berebut air untuk mandi, masalah hutang piutang antar narapidana ga jauh dari masalah-masalah seperti itu...”
(Sarwono)

“gesekan atau perkelahian antar napi biasanya karena over kapasitas, hutang piutang, bahkan sampai hal-hal sepele seperti rebutan air minum, pembagian makanan, omongan yang menyinggung”
(Heru Yuswanto)

Berdasarkan data diatas juga menunjukkan bahwa terjadinya gesekan atau perselisihan antar narapidana lebih banyak disebabkan oleh kondisi peri kehidupan di lapas yang kaku dan serba keterbatasan. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan suasana yang tegang, penuh emosi dan sensitif terhadap segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban narapidana. Kondisi ini tentunya adalah sebagai bentuk konsekuensi dari pidana hilang kemerdekaan yang diderita oleh narapidana. Segala hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan mereka diatur sedemikian rupa oleh peraturan dalam lapas. Berikut adalah jadwal kegiatan harian narapidana Lapas Khusus Narkotika Jakarta yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap narapidana selama menjalani masa pidananya di lapas.

Tabel 3.1

Jadwal Kegiatan Narapidana Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Jam	Kegiatan	Tempat	Penanggung Jawab	Staf Pendukung	Keterangan
04.30	Bangun Pagi, Sholat	Kamar	Rupam	-	-
07.00	Buka Kunci kamar, wash up	Kamar Blok	Rupam	-	-
07.00	Apel Penghuni	Blok	Rupam, KPLP	-	WBP berdiri di dpo kamar masing-masing

07.30	Makan Pagi	Blok	Rupam	Rupam	-
08.00	1. Kegiatan TC - <i>Morning Meeting</i> - <i>Function</i> - <i>Sport</i>	Ruang Konsultasi, Aula Blok, lapangan	Staf Binkemaswat	Rupam	Ptgs Peer Conselor melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	2. Kegiatan Criminon - Training Rutin Criminon - Kursus perbaikan Pembelajaran - Kursus menuju Jalan kebahagiaan - Pengenalan dan penastiganaan tipe tipe kepribadian	Ruang TPP	Staf Binkemaswat	Rupam	Ptgs Supervisor melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3. Kegiatan Non TC - PBB - Penyuluhan Hukum	Lapangan, Ruang TPP	Staf Binkemaswat	KPLP	Kegiatan sesuai jadwal
	4. Kunjungan	Ruang Kunjungan	Tim Kunjungan	KPLP	WBP dan keluarga berada di ruang kunjungan sesuai aturan
	5. Cek Kesehatan	Poliklinik	Staf Poliklinik	KPLP	WBP yang sakit di data dan ditampingi ke poliklinik
	6. Kegiatan Kerja - Taman - Kebersihan Ruang Staff - Bengkel Kerja - Peternakan, perikanan	Lapangan, Gedung kantor, Bengkel Kerja, Lapangan Dalam	Staf Kegiatan Kerja	KPLP, Rupam	Kegiatan sesuai jadwal
	1. Kegiatan Keagamaan - Kegiatan Masjid	Masjid, Gereja,	Staf Binkemaswat	Rupam	WBP berpakaian koku dan peci, WBP berpakaian

	- Kegiatan Gereja - Kegiatan Vihara	Vihara			kemeja
10.00	2. Kegiatan Penyuluhan - Penyuluhan HIV/AIDS - VCT	Ruang Musik, Pofiklinik	PKBI, YPI dan Pokdisus	Rupam	Kegiatan sesuai jadual
12.00	Sholat Dzuhur	Masjid	Staf Bimkemaswat	Rupam	WBP muslim berada di masjid
12.30	Makan Siang	Blok	-	Rupam	WBP makan di kamar masing-masing
13.00	Apel Siang	Blok	-	KPLP	WBP berdiri di kamar masing-masing
14.00	1. Kegiatan TC	Ruang Konsultasi	Staf Bimkemaswat	Rupam	Ptgs Peer Counselor melaksanakan kegiatan sesuai jadual
	2. Kegiatan Criminon	Ruang TPP	Staf Bimkemaswat	Rupam	Ptgs Supervisor melaksanakan kegiatan sesuai jadual
	3. Support Group	Ruang Konsultasi	Staf Bimkemaswat	Rupam	Kegiatan sesuai jadual
15.00	Sholat Ashar	Masjid	Staf Bimkemaswat	Rupam	WBP berpakaian koko dan peci
16.00	Pembagian Makan Malam	Blok	Petugas dapur	Rupam	-
16.30	Wash Up	Blok	Rupam	KPLP	-
17.00	Penguncian Kamar	Blok	Rupam	-	-
18.00	Sholat maghrib	Blok	Rupam	-	WBP sholat di kamar masing-masing
19.00	Sholat Isya'	Blok	Rupam	-	WBP sholat di kamar masing-masing
20.00	Istirahat/Tidur	Blok	Rupam	-	

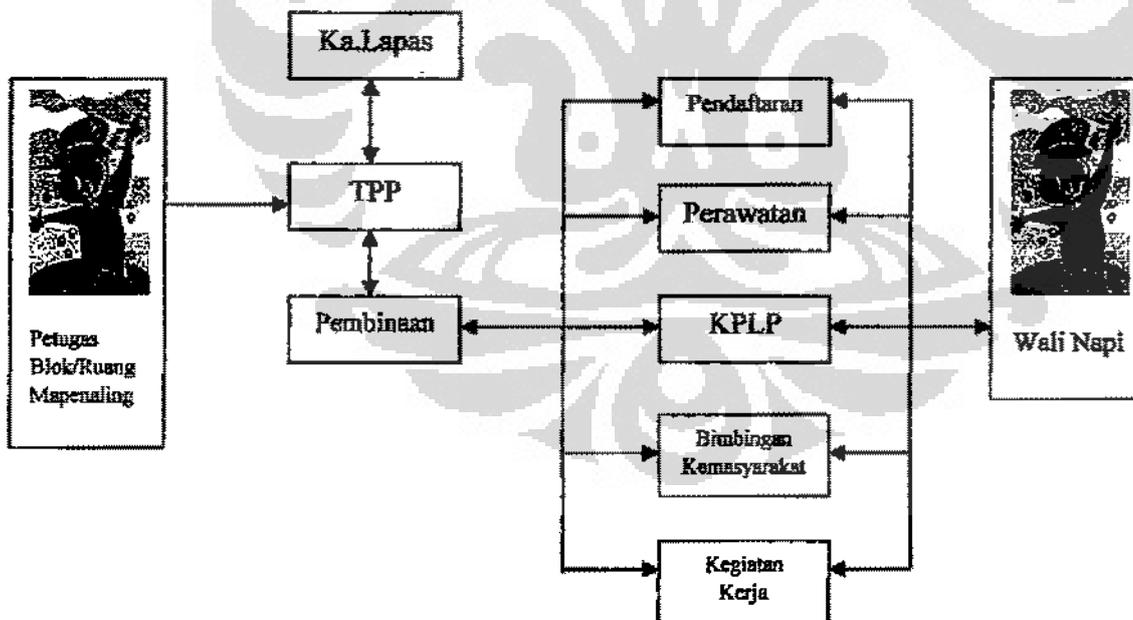
Sumber : Sub Seksi Bimkemaswat Lapas Khusus Narkotika Jakarta, 2009

Jadual kegiatan harian narapidana tersebut berada dibawah koordinasi dan pengawasan Wali Blok. Wali Blok melakukan pengecekan terhadap narapidana yang mengikuti kegiatan, apakah ada narapidana yang tidak mengikuti kegiatan sesuai jadwal, alasan tidak mengikuti kegiatan, narapidana yang sakit, sehingga Wali Blok mengetahui kehidupan narapidana dalam blok yang diawasinya.

Khusus bagi narapidana baru ketika masuk lapas harus memasuki tahap mapenaling (masa pengenalan lingkungan), dimana dalam tahap ini narapidana dikenalkan dengan tata tertib serta hak dan kewajibannya selama menjalani masa pidananya di lapas. Protap mapenaling dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2

Protap Pelaksanaan Mapenaling



Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

Periode Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) dilakukan selama dua sampai tiga minggu, dimana narapidana baru ditempatkan dalam kamar yang sama dan mengikuti kegiatan yang sama, yaitu pengenalan lingkungan lapas. Lingkungan lapas yang harus diketahui dan dipahami oleh narapidana baru adalah peraturan dalam lapas yang menyangkut hak dan kewajibannya sebagai narapidana, kegiatan pembinaan, keamanan dan lainnya. Hal-hal tersebut diwujudkan dengan adanya kegiatan yang terprogram yang dilakukan oleh pihak lapas. Dalam tahapan ini dan setiap kegiatan masing-masing seksi yang hendak memberikan program pembinaan kepada narapidana wajib berkoordinasi dengan Wali Blok, tempat dimana narapidana yang bersangkutan ditempatkan.

“selama dua minggu mapenaling, kita hanya wajib mengikuti kegiatan yang diadakan oleh petugas, pagi kita senam, latihan berberis, terus dilanjutkan pengarahan oleh bapak-bapaknya secara bergantian, ada yang dari KPLP tentang keamanan, tata tertib disinilah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dari register, mereka sampaikan tentang remisi..vonis dan sebagainya....”

(Abdul Rahman *al* Alex)

Selama masa Mapenaling, narapidana juga belum boleh dikunjungi oleh keluarganya, sehingga dalam jangka waktu tersebut narapidana baru difokuskan untuk memahami kondisi lapas tempat ia menjalani pidana.

“selama mapenaling, kita dijelaskan oleh bapak-bapaknya tentang aturan-aturan, hak dan kewajiban kita selama di dalam lapas,..selama mapenaling juga kita tidak boleh dikunjungi oleh keluarga, walaupun keluarga terlanjur datang hanya bisa menitipkan barang keperluan lewat petugas..”

(Marjohan *al* Jack)

Hal ini juga dibenarkan oleh keluarga narapidana yang peneliti temui pada saat jam kunjungan, dengan pernyataan sebagai berikut :

“iya pak...selama dua minggu suami saya dikarantina gak boleh dikunjungi, itu waktu pertama kali dipindah kesini dari Rutan

Salemba..kita ikut aja aturan disini pak, yang penting suami saya baik-baik aja di dalam....”

(Keluarga Narapidana Marjohan *al* Jack)

Hal diatas menggambarkan bahwa perikehidupan narapidana di lapas diatur secara terprogram dalam wujud program pembinaan narapidana, dimana dikenal istilah tahapan pembinaan, yaitu sebagai berikut :

Tahap Pertama :

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya *maksimum security*.

Tahap kedua :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan *medium security*.

Tahap ketiga :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.

Tahap keempat :

Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Apabila ditelaah kalimat diatas, maka sesuai dengan konsep proses pemasyarakatan yang digambarkan sebagai berikut :

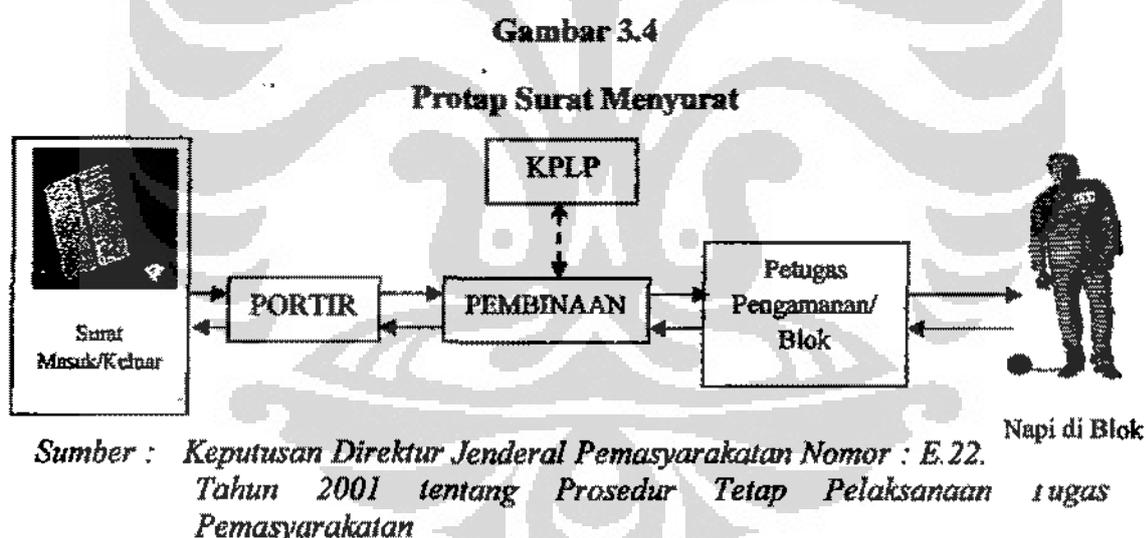
Gambar 3.3**Bagan Proses Pemasyarakatan**

Sumber : Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Adi Sujatno

Gambar diatas menegaskan bahwa Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik dan dapat diterima kembali di masyarakat.

C. Komunikasi antara Wali Blok dengan Narapidana di Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Pidana penjara yang dijalani oleh narapidana adalah pidana hilang kemerdekaan, artinya ada beberapa hak kemerdekaan yang dibatasi karena status pidananya. Salah satu hak yang dibatasi tersebut adalah hak untuk berkomunikasi dengan pihak luar, baik itu keluarga, sahabat, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Mekanisme komunikasi yang boleh dilakukan adalah dalam bentuk surat menyurat, kunjungan dan yang terbaru adalah adanya kebijakan pengadaan wartel khusus lapas bagi narapidana. Berikut prosedur tetap mekanisme surat menyurat dan kunjungan bagi narapidana :



Mengenai hak untuk berhubungan dengan keluarga melalui surat menyurat ini sebagaimana dijelaskan oleh keluarga narapidana berikut ini :

"kalau pas mapenaling ya selain nitip barang keperluan juga sekalian sama surat, kan tidak boleh ketemu, tapi setelah mapenaling kan sudah bisa dikunjungi, kalau kita ga sempat atau ada keperluan ga bisa besuk kan sekarang bisa pake handphone., suami saya kebetulan pake handphone di dalam....."

(Keluarga Narapidana Abdul Rahman *al* Alex)

"katanya sekarang di dalam lapas ada wartel, suami saya kalau kangen telpon lewat wartel, tapi lebih sering pake hape., dan biasanya nelponnya malam hari,..jadi lebih enak ngobrolnya...."

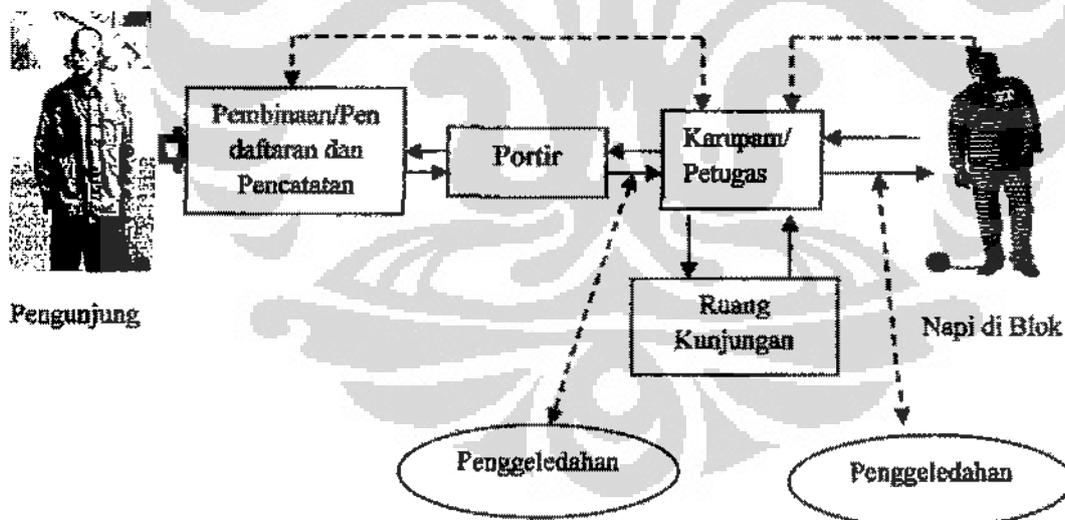
(Keluarga Narapidana Marjohan *al* Jack)

"waktu saya masih disini, keluarga ada di Jakarta, tapi ibu saya sudah tua, jadi saya juga kasian kalau sering besuk, paling hemat ya lewat handphone, emang dilarang tapi masih bisa pake lah kalau disini..."

(Tasyaya Purnama, Mantan Narapidana)

Gambar 3.5

Protap Kunjungan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan



Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

Kedua gambar diatas menunjukkan bahwa hak komunikasi narapidana dengan pihak luar merupakan hak yang dibatasi dan diatur sedemikian rupa sesuai

peraturan yang berlaku. Kedua hak tersebutpun baru bisa didapat oleh narapina setelah mereka memasuki tahap pembinaan 1/3 masa pidana dan menurut sidang Tim Pengamat pemasyarakatan (TPP) telah layak dan dianggap berkelakuan baik.

Berkaitan dengan hubungan komunikasi antara Wali Blok dengan narapidana di Lapas Khusus Narkotika Jakarta, masing-masing informan menyatakan mengetahui tentang wali blok. Indikatornya adalah, masing-masing informan mengetahui ketika mereka memiliki masalah baik dengan diri sendiri, keluarga dan sesama penghuni, mereka harus berkomunikasi dengan petugas yang dalam hal ini adalah Wali Blok.

"kalo ada masalah saya akan melaporkan ke wali, dan wali akan menyikapinya bagaimana tindakan selanjutnya. Peran wali tidak jauh beda dengan orang tua kita yang bisa menaungi atau melindungi kita dan apa kekurangan dan keluhan kita...."

(Marjohan *al* Jack)

"permasalahan dan memperhatikan blok itu sendiri, kebersihan, keamanan lingkungan, kesehatan warga binaan itu tugasnya wali pak....."

(Abdul Rahman *al* Alex)

"kalo ada perkelahian individu, petugas langsung melerai, menjadi penengah kalo memang bisa diselesaikan oleh wali...."

(Samsul Komar *al* Samko)

Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan informan petugas yang menyebutkan tugas pokok dan fungsi dari wali bagi narapidana.

"wali nantinya bertugas akan mendampingi narapidana yang memiliki permasalahan baik di dalam blok atau lainnya, wali harus memiliki loyalitas dan disiplin terhadap tugas"

(Agus Imam Taufik)

"tugas wali yang pertama adalah memonitor perilaku narapidana, termasuk memberikan pengarahan atau pembinaan bagi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di lapas, kemudian menjembatannya jika ada permasalahan baik dengan sesama narapidana maupun dengan pihak lain"
(Sarwono)

"wali adalah petugas pendamping napi, yang dapat berperan sebagai pengganti orang tua atau sebagai teman. Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi narapidana dan merespon keluhan kesah yang disampaikan narapidana dan dicari solusinya, peka terhadap lingkungan untuk mencegah terjadinya gesekan dan perkelahian"

(Heru Yuswanto)

Ketika pertanyaan ditekankan pada ketanggapan petugas khususnya yang bertugas sebagai Wali Blok dalam menampung segala permasalahan, keluhan yang menyangkut hak dan kewajiban narapidana di lapas, informan narapidana menganggap petugas belum optimal.

"peran wali belum optimal, karena kurang adanya komunikasi pertemuan antara warga binaan dengan wali pak..."

(Abdul Rahman *al* Alex)

"belum optimal, karena selama ini tunggu ada laporan dulu dari warga binaan baru wali mengambil tindakan. Seharusnya ada semacam pertemuan-pertemuan atau memperkenalkan wajib hukum, karena disini jarang....seperti sebulan sekali kita dikumpulkan untuk memperkenalkan hukum..."

(Marjohan *al* Jack)

"Kurang peka terhadap lingkungan, kurang agresif, mungkin karena sarana dan prasarannya yang kurang, mungkin kalau ada kamera mereka bisa pantau kita, seharusnya mereka harus lebih mendalami situasi dan kondisi lapangan ke blok"

(Samsul Komar *al* Samko)

"di lapas narkotik ada yang namanya wali, dan nama-namanya ditempel di dinding luar, jadi kita bisa baca, tapi cuma nama aja, karena perannya sendiri kurang maksimal, karena narapidana sendiri yang aktif bertanya tentang misalnya vonis mereka, kapan mereka harus ngurus PB, atau nanya kapan bebas., petugas hanya duduk menunggu di ruangan..."

(Tasyaya Purnama, Mantan Narapidana)

Perihal komunikasi, informan petugas lebih menekankan bahwa narapidana harus lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi sehingga wali dapat memberikan solusi yang tepat. Ketertutupan narapidana ini dijadikan sebagai kendala oleh informan petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wali.

"yang pertama tentu komunikasinya harus lancar, narapidana terbuka apa yang dihadapi, apa yang dialami disampaikan sehingga mengatasi permasalahannya lebih mudah....namun faktanya informasi kurang lengkap karena ketidakterbukaan atau dia tidak mau berbagi, kendala lainnya adalah koordinasi dengan petugas lainnya kurang terkoordinir dengan baik"

(Sarwono).

Sementara informan Agus Imam Taufik menyebutkan bahwa keterbatasan dari sisi petugas disebabkan karena penunjukkan wali bagi narapidana tidak didasarkan pada kriteria dan kapabilitas yang valid dan terukur, artinya sangat tergantung dari pimpinan yang menunjuk untuk menjadi wali. Selain itu juga seorang wali tidak dibekali dengan keilmuan tertentu atau pelatihan/training sebagai wali yang baik.

"kriteria pasti untuk menjadi atau ditunjuk menjadi wali ga ada...,dari staf KPLP juga bisa dari staf lainnya yang penting memiliki loyalitas dan

disiplin yang tinggi. Kalo ketrampilan atau latar belakang khusus tidak ada..”

(Agus Imam Taufik)

Informan Heru Yuswanto menyebutkan bahwa untuk mengakomodir keluhan, permasalahan narapidana diadakan semacam kegiatan pertemuan antara petugas dengan narapidana setiap hari Jumat melalui sub seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat).

”pihak lapas melalui sub seksi bimkemaswat melakukan pelayanan keluhan yang dilakukan secara rutin setiap hari Jumat yang meliputi semua warga binaan”

(Heru Yuswanto).

D. Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Hilangnya kemerdekaan hidup dalam lingkungan yang tertutup dengan dunia luar dan terbatasnya ruang gerak kehidupan narapidana secara nyata mempengaruhi pola tingkah laku mereka dalam keseharian. Perilaku para penghuni kelihatannya cenderung sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya selain dikarenakan sempitnya ruang gerak hidup juga dipengaruhi oleh perubahan situasi lingkungan.

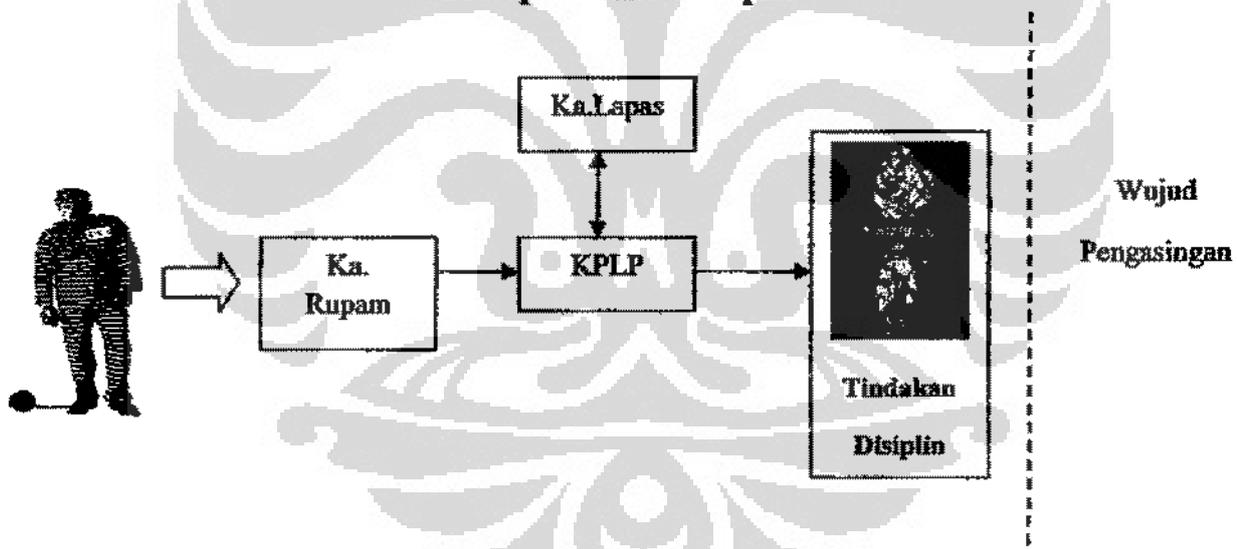
Kondisi tersebut umumnya akan mempengaruhi perilaku individu, dan jika dikaitkan dengan kehidupan para narapidana tersebut, maka perubahan situasi lingkungan kehidupan yang baru di dalam penjara membuat mereka mengalami beragam perubahan perilaku dan keyakinan. Ada narapidana yang mampu

menahan atau mengontrol diri untuk tidak berperilaku agresif hingga masa pidananya berakhir, namun ada juga narapidana yang tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan tersebut dan lalu berperilaku agresif cenderung destruktif sehingga mengganggu narapidana lainnya yang berujung pada perkelahian baik individu maupun kelompok.

Ketika perselisihan, perkelahian dan sebagainya yang berbentuk melanggar aturan dalam lapas, maka yang dilakukan oleh petugas adalah melakukan tindakan disiplin, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.6

Protap Tindakan Disiplin



Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

Tindakan yang dilakukan oleh petugas ketika seorang narapidana melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dalam lapas, adalah memanggil narapidana yang bersangkutan untuk diinterogasi, apabila telah cukup bukti

bentuknya tindakan disiplinya ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan penelitian sebagai berikut :

“jika terjadi perkelahian antar narapidana baik individu maupun misal, petugas langsung mengambil tindakan, mereka yang bermasalah dipanggil ke kantor dan diselesaikan secara kekeluargaan bila ternyata mereka ada yang salah diambil tindakan salah satunya adalah di pamsus (pengamanan khusus) atau di sel”

(Marjohan *al Jack*).

“Mekanisme atau prosedur yang dilakukan apabila terjadi suatu kerusuhan atau perkelahian akan kita panggil, kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan nanti akan dibuatkan BAP yang akan diteruskan dengan pemberian register F bagi yang bersangkutan”

(Agus Imam Taufik).

“kedua pihak yang terlibat kita amankan ke tempat yang steril agar tidak meluas, terus kita cari akar permasalahannya dan secepatnya kita selesaikan dan kalau perlu kita beri sanksi kedua pihak dengan di sel/dipisahkan/diasingkan dari blok sebagai pelajaran selama 12 hari”
(Heru Yuswanto).

“saya pernah menangani sebuah kasus perkelahian antar narapidana. waktu itu menjelang magrib datang seorang narapidana mencari wali bloknnya tapi tidak ada. Terus saya menanyakan ada masalah apa, dia menceritakan bahwa ia habis dipukul dan dikeroyok narapidana lainnya. Karena haru sudah malam saya bilang besok saja ditindaklanjuti. Keesokan harinya saya panggil si pelapor dan saya suruh ceritakan masalah yang sebenarnya. Akhirnya saya panggil dua orang yang terlibat dalam masalah ini yaitu napi AY dan PR. Saya pertemukan mereka bertiga dan saya interogasi untuk cari solusi. Kurang lebih 3 jam akhirnya masalah selesai dan mereka saya damaikan..”

(Sarwono)

Informan Heru Yuswanto selanjutnya menjelaskan beberapa peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta yang diproses oleh petugas :

“peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009, tepatnya pukul 15.00 WIB, yang dialami oleh seorang narapidana dengan inisial AN. Kejadiannya berlangsung dalam kamar yang bersangkutan, narapidana tersebut bertransaksi narkoba dengan narapidana B. Posisi napi AN sebagai perantara dengan pihak luar, dimana transaksi dilakukan dengan menggunakan handphone (HP). Setelah sepakat napi B melakukan pembayaran melalui transfer ke pihak luar dengan jaminan napi AN. ternyata pihak luar (teman AN) setelah pembayaran diterima tidak mengirimkan narkoba yang dipesan melainkan paket yg berisi deterjen, napi B menganggap pihak luar telah melakukan penipuan, kemudian napi B menanyakannya ke napi AN, napi AN tidak sanggup mengembalikan dana yang sudah dikirim napi B dan hanya mampu mengembalikan setengah dari dana yang telah ditransfer. Napi B lalu minta tolong kepada napi C untuk melakukan penagihan, dengan mengajak lima orang rekan lainnya napi C melakukan penagihan, karena napi AN terus berkelit, maka napi C dan rekan-rekan melakukan pengeroyokan terhadap napi A sampai mengalami pendarahan di kepala karena dibenturkan ke tembok, dipukul pakai kayu dan mendapatkan ancaman apabila melapor”.

Kejadian lain :

“Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu 8 Agustus 2009, dimana pada waktu diadakan apel pengecekan penghuni pada pukul 19.00 WIB ternyata ada satu narapidana yang tidak ada di dalam kamarnya. Oleh pihak pengamanan kemudian melakukan penelusuran dan ternyata narapidana tersebut bersembunyi di areal dapur. Setelah diinterogasi terhadap yang bersangkutan didapatkan informasi bahwa dia tidak berani kembali ke kamarnya karena takut dipukuli dan disiksa oleh teman sekamarnya. Penyebabnya adalah narapidana tersebut mempunyai hutang dan belum mampu membayar sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Dua hari sebelumnya dia sudah dipukuli dan disundut rokok karena sudah menjanjikan akan membayar namun tidak terpenuhi”.

Kejadian lain :

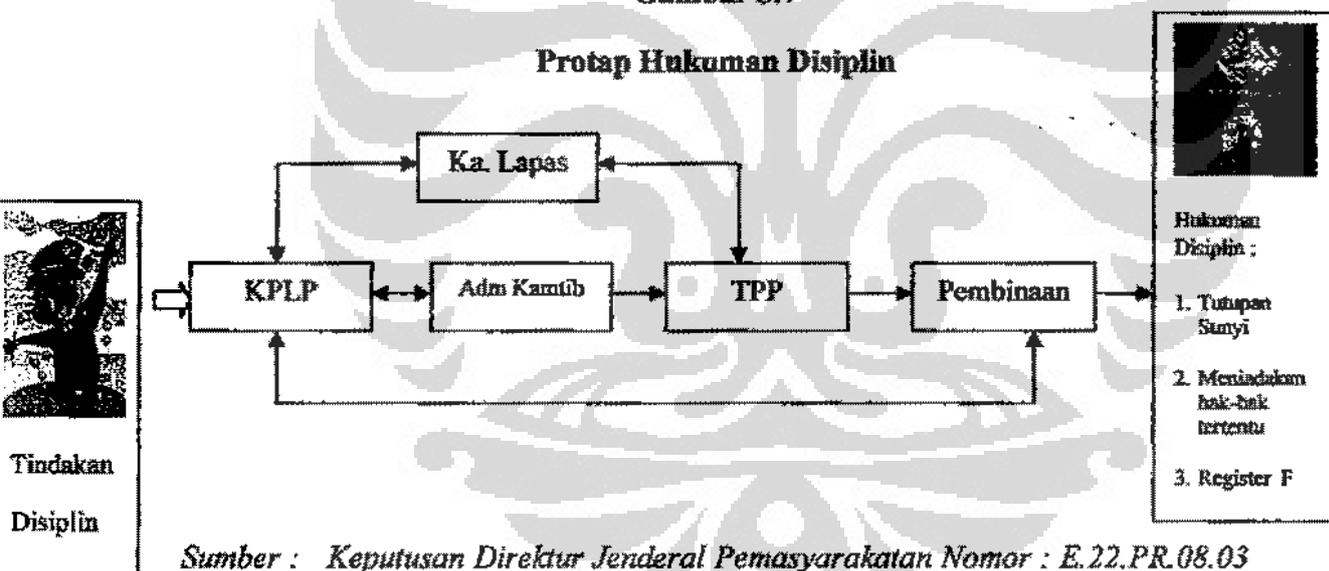
“Pristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2009 pukul 15.30 WIB, kronologis kejadiannya ada narapidana berinisial AS penghuni blok B bermain di kamar napi RB, kemudian napi Awn menanyai AS dan

tanpa alasan yang jelas napi AWN kemudian memukuli dan menendang AS, kejadian ini berlangsung pada pukul 14.45 WIB, AS kemudian mengadakan kejadian tersebut sama AG, mengetahui kejadian tersebut AG kemudian mencari AWN dan ketemu di Blok C kamar 213, kamar tersebut berisi teman-teman AWN, setelah ketemu AWN, AG kemudian memukuli AWN dibantu AS, dalam perselisihan ini AWN mengeluarkan pisau setelah terpukul jatuh oleh AS, AWN akan ditusuk dengan obeng, namun temen AWN dengan inisial ACG membantu AWN dengan memukuli AS, kemudian petugas datang, melerai dan selanjutnya memeriksa yang bersangkutan”.

Berikut bagan protap hukuman disiplin yang merupakan tahapan berikutnya dari tindakan disiplin, dimana hukuman disiplin sanksi yang diberikan tidak hanya substantif tapi juga administratif.

Gambar 3.7

Protap Hukuman Disiplin



Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

Berdasarkan data yang didapat pada saat penelitian, dari saat Lapas Khusus Narkotika Jakarta operasional yaitu tahun 2004 hingga penelitian ini dilakukan, yaitu bulan Juni 2009 jumlah total hukuman disiplin sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) kasus, dengan sanksi tutupan sunyi selama 6 (enam) hari,

meniadakan hak-hak tertentu (remisi, asimilasi CB, PB, CMB, CMK) dan register F.

Tabel 3.2
Jumlah Hukuman Disiplin Lapas Khusus Narkotika Jakarta
2004 s/d 2009

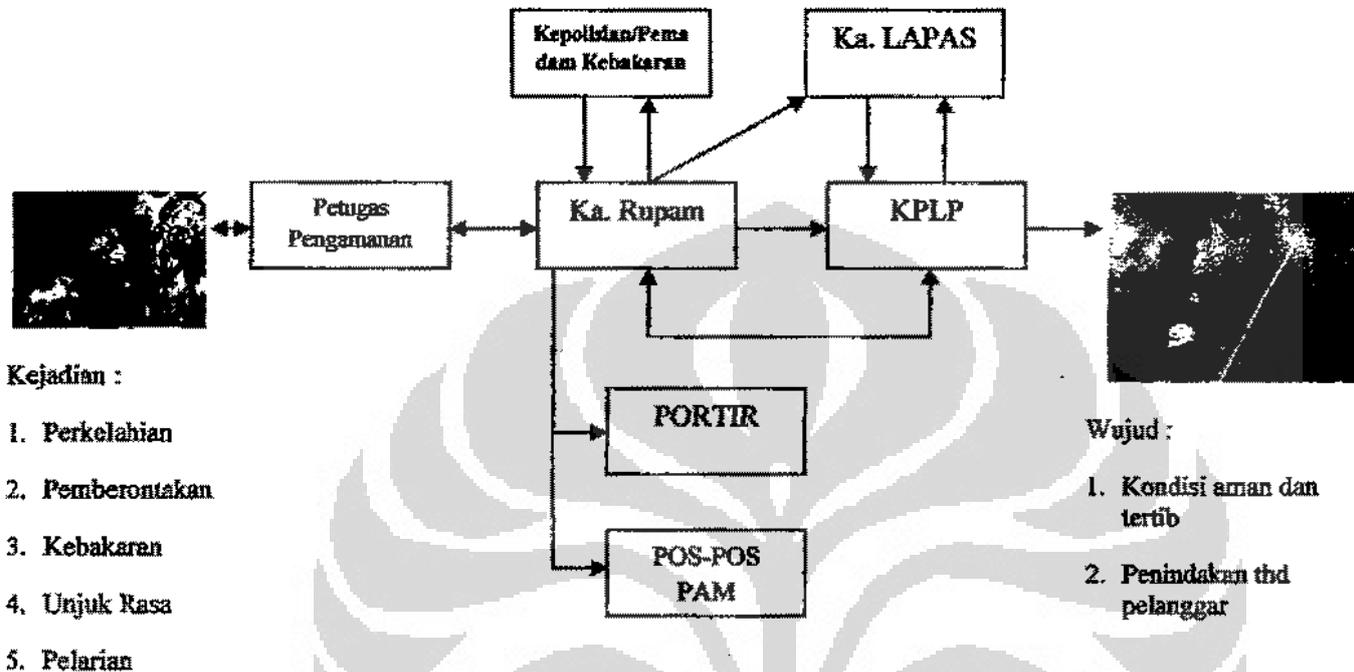
No	Tahun	Jumlah
1.	2004	4
2.	2005	18
3.	2006	65
4.	2007	25
5.	2008	10
6.	2009	1
Total		123

Sumber : Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Khusus Narkotika Jakarta, 2009

Umumnya bentuk pelanggarannya adalah dengan sengaja melanggar tata tertib yaitu telah melakukan transaksi narkoba baik narkotika maupun psikotropika dan penggunaan telepon selular di dalam lapas. Ketika terjadi perkelahian antar narapidana yang mengarah pada kerusuhan massal, maka prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.8

Protap Penanggulangan Gangguan Kamtib



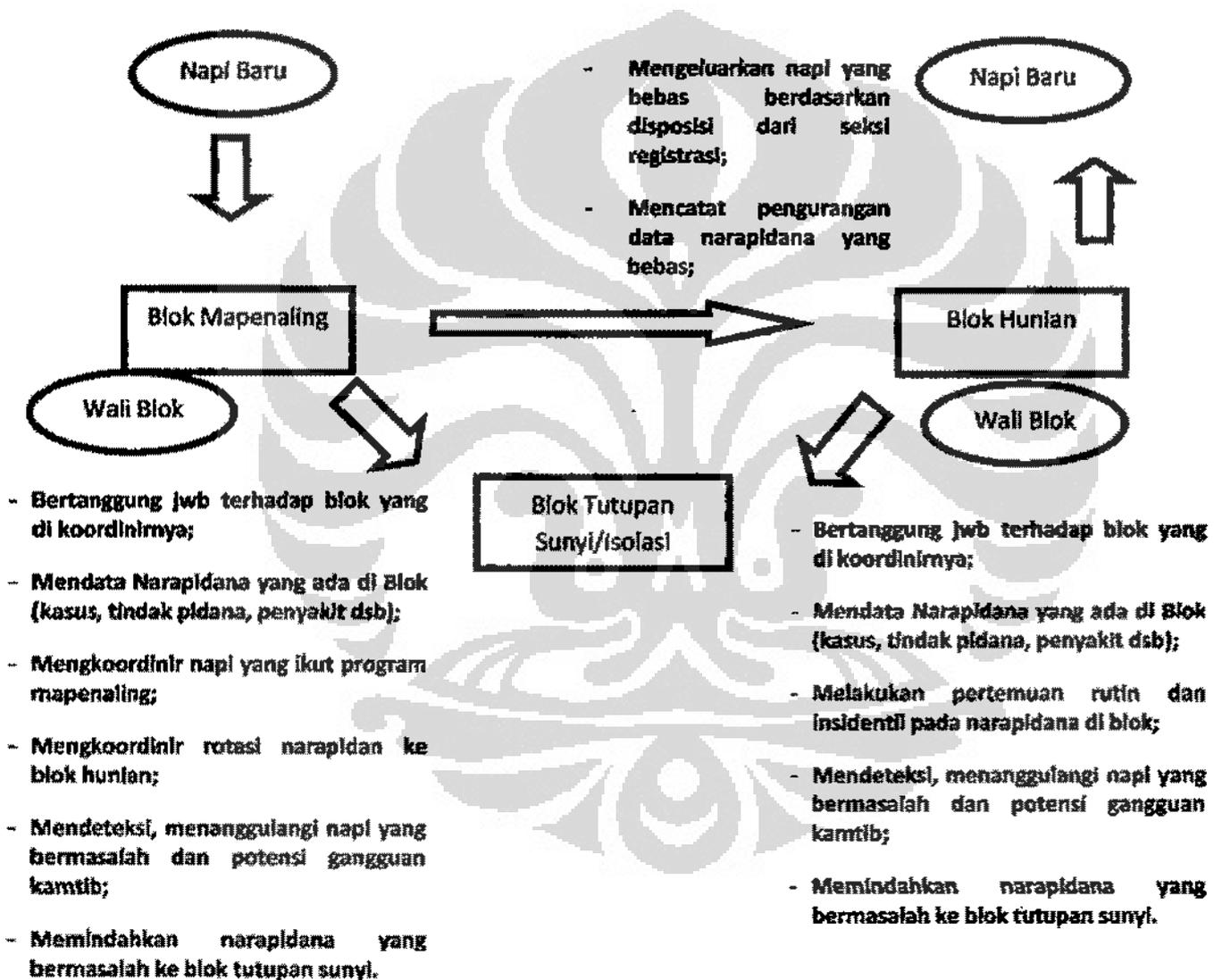
Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan

Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Khusus Narkotika Jakarta hingga penelitian ini dilakukan belum pernah terjadi perkelahian, pemberontakan, unjuk rasa narapidana yang mengarah pada kerusuhan massal. Kejadian kebakaran pernah terjadi pada tahun 2006, namun bukan disebabkan oleh narapidana, melainkan tabung gas di area dapur yang sudah tidak layak pakai yang meledak, tindakan yang dilakukanpun telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demikian juga dengan kasus pelarian, hanya terdapat satu kasus pelarian yaitu kaburnya narapidana Gunawan Santoso pada tahun 2006, tindakan yang sama sesuai dengan prosedur tetap penanganan gangguan kamtib telah dilakukan.

Berkaitan dengan peran Wali Blok di Lapas Khusus Narkotika Jakarta dan didasarkan pada uraian diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.9

Peran Wali Blok di Lapas Khusus Narkotika Jakarta



BAB IV

ANALISIS PERAN WALI BLOK DALAM MENANGGULANGI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS KHUSUS NARKOTIKA JAKARTA

A. Komunikasi antara Wali Blok dengan Narapidana di Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perikehidupan di dalam lapas Wali Blok merupakan unsur petugas yang ditunjuk oleh manajemen lapas dalam rangka memperlancar kegiatan pembinaan narapidana dan keamanan lapas. Wali Blok merupakan unsur petugas yang menjadi koordinator salah satu blok hunian di dalam lapas. Unsur petugas yang ditunjuk adalah yang berasal dari petugas Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) dan dipilih secara internal oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas. Tugasnya adalah sebagai penampung aspirasi permasalahan dalam blok yang dikoordinirnya, umumnya menyangkut tentang pemenuhan hak dan kewajiban narapidana dalam blok hunian. Hal ini misalnya tentang pemenuhan air minum narapidana, pengaturan air mandi, termasuk kebersihan blok hunian.

Wali Blok bertanggung jawab terhadap perikehidupan narapidana dalam blok, jadi ketika terjadi perselisihan antar narapidana dalam satu blok terjadi maka yang bertindak pertama adalah wali blok yang dimaksud. Wali Blok akan mengumpulkan narapidana yang berselisih paham atau berseteru, mencari pemecahannya termasuk tindakan disiplin yang akan diberikan kepada narapidana yang terbukti bersalah.

A.1. Proses Komunikasi antara Wali Blok dengan Narapidana

Dalam sub bab ini peneliti akan menganalisis proses komunikasi antara Wali Blok dengan Narapidana dalam menangani kasus gangguan keamanan dan ketertiban baik yang dilakukan antar individu, individu dengan kelompok atau sebaliknya dan kelompok dengan kelompok. Analisis termasuk juga bagaimana komunikasi verbal dan non verbal yang terjadi antara kedua belah pihak yang berkomunikasi.

- Komunikasi untuk Kasus Kekerasan Individu :

Komunikasi dalam kasus kekerasan individu peneliti analisis sebagai berikut (kasus hal 85 Bab III) :

Motif kekerasan : Hutang piutang

Bentuk kekerasan : Dipukul, disundut dengan rokok

Proses Komunikasi :

1.	Pengirim Pesan dan Isi Pesan (Materi)	:	Informasi dan pertanyaan tentang bagaimana kekerasan terjadi
2.	Simbol/Isyarat	:	Untuk mendapatkan informasi dan jawaban yang akurat, Wali menyampaikan pesan dengan kata-kata, gerakan anggota badan, kepala, mata dan anggota badan lainnya. Dalam konteks inilah komunikasi verbal dan

			<p>non verbal memegang peran penting. Komunikasi verbal yang dilakukan oleh Wali dengan perbendaharaan kata, kecepatan, intonasi suara, <i>timing</i> dan dalam bahasa yang singkat dan jelas, sehingga informasi yang didapat tentang terjadinya kekerasan didapatkan yaitu masalah hutang piutang. Bahasa verbal yang diucapkan wali misalnya "<i>ayo ceritakan semuanya, biar jelas..</i>" Untuk komunikasi non verbal karena dalam konteks "interogasi" maka ekspresi wajah, kontak mata, suara dan gerak Wali lebih menunjukkan posisi sebagai seorang penguasa, yaitu dengan berkacak pinggang, dan dengan suara yang tegas dan keras.</p>
3.	Media/Penghubung	:	Media dalam kasus penyelesaian kekerasan individual dilakukan secara langsung tanpa adanya media perantara komunikasi.
4.	Mengartikan Kode/Isyarat	:	Komunikasi verbal dan non verbal yang dilakukan oleh Wali kemudian diartikan oleh narapidana melalui indera-nya, untuk dipahami dan dimengerti.

5.	Penerima Pesan	:	Narapidana dalam hal ini sebagai penerima pesan akan mengirimkan sinyal atau kode tanda mengerti atau tidak mengerti pertanyaan yang diajukan Wali. Isyarat ini berbentuk anggukan, atau diam saja.
6.	Umpan Balik (<i>Feedback</i>)	:	Umpan balik dalam kasus ini untuk memperjelas dan mempertegas apakah pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh penerima pesan dalam wujud informasi yang didapat sesuai dengan keinginan pengirim pesan. Dengan demikian jelas bahwa narapidana sebagai pelaku kekerasan dan korban kekerasan, motif kekerasan dan bentuk kekerasan, sehingga wali bisa dengan objektif menentukan bentuk tindakan disiplin/hukuman disiplin yang akan diberikan.
7.	Gangguan	:	Dalam proses interogasi gangguan komunikasi yang paling umum adalah situasi dan kondisi yang mencekam, dan banyaknya petugas lain yang ikut dalam interogasi, sehingga hal ini akan menimbulkan kesan

			narapidana ketakutan, diintimidasi sehingga jawaban yang dimunculkan sekenanya dan kurang mendalam.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Komunikasi untuk Kasus Kekerasan Individu dengan kelompok :

Komunikasi dalam kasus kekerasan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok peneliti analisis dalam satu bagian karena proses komunikasi yang dilakukan oleh Wali melalui pendekatan yang sama. Kasus yang dianalisis sebagai berikut (kasus hal hal 84 Bab III) :

Motif kekerasan : Hutang piutang narkoba

Bentuk kekerasan : Pengeroyokan

Proses Komunikasi :

1.	Pengirim Pesan dan Isi Pesan (Materi)	:	Informasi dan pertanyaan tentang bagaimana kekerasan terjadi
2.	Simbol/Isyarat	:	Komunikasi Verbal dilakukan dengan kata-kata yang keras dan kasar, karena kekerasan yang terjadi sudah mengarah pada gangguan kamtib yang cukup serius, komunikasi verbal dilakukan juga dengan bentakan dan ancaman untuk mendapatkan informasi.

			<p>Komunikasi non verbal dengan berkacak pinggang, sambil memegang tongkat pemukul, dengan ekspresi wajah yang marah. Hal ini dikarenakan kondisi ini menimbulkan persepsi Wali belum optimal melaksanakan tugasnya, karena tidak mampu mendeteksi akan terjadinya kekerasan.</p>
3.	Media/Penghubung	:	<p>Media dalam kasus penyelesaian kekerasan individual dilakukan secara langsung tanpa adanya media perantara komunikasi.</p>
4.	Mengartikan Kode/Isyarat	:	<p>Komunikasi verbal dan non verbal yang dilakukan oleh Wali kemudian diartikan oleh narapidana melalui indera-nya, untuk dipahami dan dimengerti.</p>
5.	Penerima Pesan	:	<p>Narapidana dalam hal ini sebagai penerima pesan akan mengirimkan sinyal atau kode tanda mengerti atau tidak mengerti pertanyaan yang diajukan Wali. Isyarat ini berbentuk anggukan, atau diam saja.</p>
6.	Umpan Balik (<i>Feedback</i>)	:	<p>Umpan balik dalam kasus ini untuk memperjelas dan mempertegas apakah pesan</p>

		<p>yang disampaikan diterima dengan baik oleh penerima pesan dalam wujud informasi yang didapat sesuai dengan keinginan pengirim pesan. Dengan demikian jelas bahwa narapidana sebagai pelaku kekerasan dan korban kekerasan, motif kekerasan dan bentuk kekerasan, sehingga wali bisa dengan objektif menentukan bentuk tindakan disiplin/hukuman disiplin yang akan diberikan. Dalam kasus kekerasan yang sudah mengarah pada gangguan kamtin yang serius, maka selain dilakukan tindakan tutupan sunyi, narapidana yang terlibat juga dikenakan Register F (register pelanggaran), dimana dalam kurun waktu tertentu ditiadakan hak-haknya seperti remisi, asimilasi dan PB.</p>
7.	Gangguan	: Dalam proses interogasi gangguan komunikasi yang paling umum adalah situasi dan kondisi yang mencekam, dan banyaknya petugas lain yang ikut dalam interogasi, sehingga hal ini akan menimbulkan kesan

			narapidana ketakutan, diintimidasi sehingga jawaban yang dimunculkan sekenanya dan kurang mendalam.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Komunikasi untuk Kasus Kekerasan Kelompok dengan kelompok :

Komunikasi dalam kasus kekerasan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok peneliti analisis dalam satu bagian karena proses komunikasi yang dilakukan oleh Wali melalui pendekatan yang sama. Kasus yang dianalisis sebagai berikut (kasus hal hal 85 Bab III) :

Motif kekerasan : Selisih paham

Bentuk kekerasan : Dipukul menggunakan alat pisau dan pengeroyokan

Proses Komunikasi :

1.	Pengirim Pesan dan Isi Pesan (Materi)	:	Informasi dan pertanyaan tentang bagaimana kekerasan terjadi
2.	Simbol/Isyarat	:	Komunikasi Verbal dilakukan dengan kata-kata yang keras dan kasar, karena kekerasan yang terjadi sudah mengarah pada gangguan kamtib yang cukup serius, komunikasi verbal dilakukan juga dengan bentakan dan ancaman untuk mendapatkan informasi.

			<p>Komunikasi non verbal dengan berkacak pinggang, sambil memegang tongkat pemukul, dengan ekspresi wajah yang marah. Hal ini dikarenakan kondisi ini menimbulkan persepsi Wali belum optimal melaksanakan tugasnya, karena tidak mampu mendeteksi akan terjadinya kekerasan.</p>
3.	Media/Penghubung	:	<p>Media dalam kasus penyelesaian kekerasan individual dilakukan secara langsung tanpa adanya media perantara komunikasi.</p>
4.	Mengartikan Kode/Isyarat	:	<p>Komunikasi verbal dan non verbal yang dilakukan oleh Wali kemudian diartikan oleh narapidana melalui indera-nya, untuk dipahami dan dimengerti.</p>
5.	Penerima Pesan	:	<p>Narapidana dalam hal ini sebagai penerima pesan akan mengirimkan sinyal atau kode tanda mengerti atau tidak mengerti pertanyaan yang diajukan Wali. Isyarat ini berbentuk anggukan, atau diam saja.</p>
6.	Umpan Balik (<i>Feedback</i>)	:	<p>Umpan balik dalam kasus ini untuk memperjelas dan mempertegas apakah pesan</p>

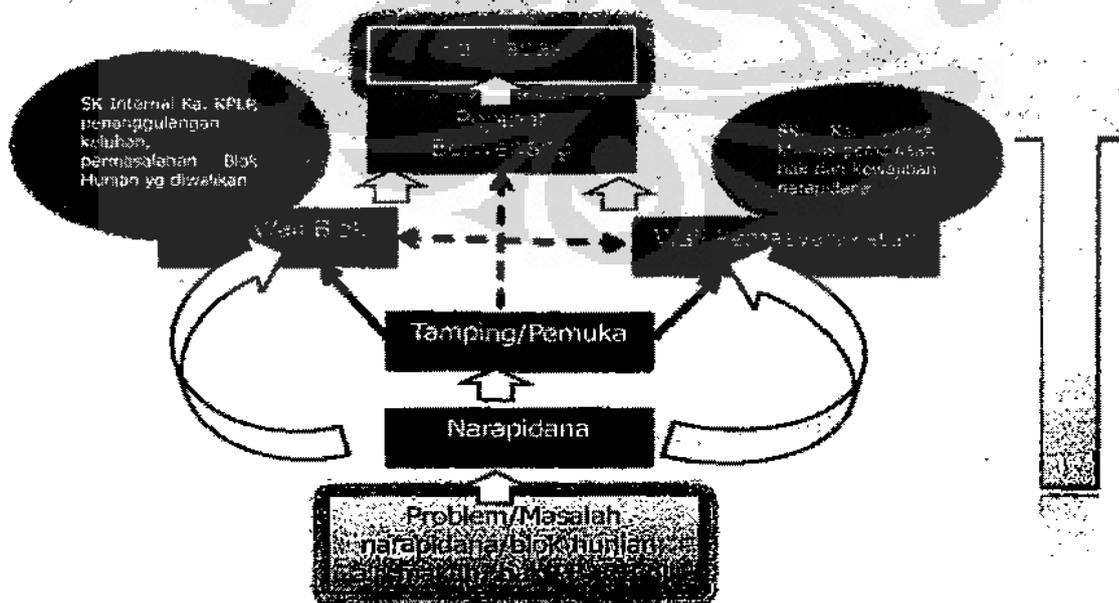
		<p>yang disampaikan diterima dengan baik oleh penerima pesan dalam wujud informasi yang didapat sesuai dengan keinginan pengirim pesan. Dengan demikian jelas bahwa narapidana sebagai pelaku kekerasan dan korban kekerasan, motif kekerasan dan bentuk kekerasan, sehingga wali bisa dengan objektif menentukan bentuk tindakan disiplin/hukuman disiplin yang akan diberikan. Dalam kasus kekerasan yang sudah mengarah pada gangguan kamtin yang serius, maka selain dilakukan tindakan tutupan sunyi, narapidana yang terlibat juga dikenakan Register F (register pelanggaran), dimana dalam kurun waktu tertentu ditiadakan hak-haknya seperti remisi, asimilasi dan PB.</p>
7.	Gangguan	: Dalam proses interogasi gangguan komunikasi yang paling umum adalah situasi dan kondisi yang mencekam, dan banyaknya petugas lain yang ikut dalam interogasi, sehingga hal ini akan menimbulkan kesan

		narapidana ketakutan, diintimidasi sehingga jawaban yang dimunculkan sekenanya dan kurang mendalam.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A.2. Alur Komunikasi Narapidana dengan Wali Blok

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat digambarkan alur komunikasi antara Wali Blok dengan narapidana dalam menanggulangi permasalahan yang berpotensi menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas.

Gambar 4.1
Alur Komunikasi Wali dengan Narapidana



Gambar diatas dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut :

Ketika seorang narapidana menghadapi atau memiliki permasalahan, maka narapidana yang bersangkutan dapat menyampaikan terlebih dahulu melalui Tamping atau Pemuka narapidana, yaitu mereka yang dipercaya mengurus dan mengkoordinir narapidana lainnya dan membantu petugas dalam pekerjaannya. Tamping/Pemuka kemudian akan melanjutkannya kepada Wali yang berwenang. Apabila permasalahan yang dikemukakan menyangkut masalah bok hunian seperti kebersihan blok atau adanya perselisihan dengan narapidana lain, maka hal itu disampaikan kepada Wali Blok, dimana Wali Blok selanjutnya akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pejabat berwenang (hingga Ka.lapas).

Ketika problem yang disampaikan oleh narapidana menyangkut hak-haknya sebagai narapidana, misalnya tentang terhambatnya pengurusan hak Pembebasan Bersyarat (PB) atau hak remisi, maka hal itu disampaikan melalui Wali Pemasarakatan. Wali selanjutnya akan mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan dan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang (hingga Ka.Lapas), untuk kemudian diberikan solusi dari permasalahan yang disampaikan.

Pada gambar diatas juga dijelaskan bahwa apabila mekanisme komunikasi antara narapidana dengan Tamping/Pemuka tidak berlangsung dengan baik atau terhambat, maka narapidana yang bersangkutan bisa langsung menyampaikannya kepada Wali yang berwenang. Jalur koordinasi juga harus dilakukan baik oleh Wali Blok maupun Wali Pemasarakatan, sebab seringkali terjadi narapidana

salah melaporkan permasalahan yang seharusnya dilaporkan kepada Wali Pemasarakatan tapi dilaporkan kepada Wali Blok atau sebaliknya. Hal ini berhubungan dengan faktor gangguan dalam komunikasi, sehingga penerima pesan salah menafsirkan pesan yang diterimanya. Sehingga dalam kondisi ini diperlukan adanya hubungan komunikasi yang baik antara Wali Blok dan Wali Pemasarakatan.

Adanya koordinasi antara Wali Blok dan Wali Pemasarakatan menunjukkan bahwa komunikasi telah berfungsi dengan baik. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Robbins (1996 :310) yang menyebutkan 4 (empat) fungsi komunikasi, yaitu :

- Komunikasi menjalankan *fungsi kontrol* yaitu jika komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam kelompok atau organisasi. Setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh para karyawan.

Dalam fungsi ini dapat kita lihat ketika Wali Blok dan Wali Pemasarakatan melakukan arahan dan instruksi kepada narapidana untuk mengikuti aturan yang berlaku di dalam lapas, menjaga keamanan dan ketertiban serta tekun mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diadakan pihak lapas. Dengan demikian fungsi Wali adalah mengontrol narapidana yang berada dibawah koordinasinya sekaligus menjadi tempat atau wadah narapidana menyampaikan keluhan dan permasalahan yang dihadapi untuk diselesaikan.

- Komunikasi membantu *perkembangan motivasi* dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu dibawah standar.

Fungsi ini terlihat ketika ada narapidana yang bermasalah, wali memberikan motivasi dan semangat untuk bangkit kembali dengan mengadakan konseling terhadap narapidana yang bermasalah dan dicatat dalam laporan perkembangan pembinaan narapidana untuk kemudian dievaluasi. Pada tingkatan wali, fungsi perkembangan motivasi dilakukan oleh pejabat berwenang termasuk Kepala Lapas untuk menjelaskan dan memotivasi wali untuk bekerja sesuai dengan standar kinerjanya, sehingga program pembinaan yang dilakukan melalui wali dapat terlaksana dengan baik.

- Komunikasi dapat digunakan sebagai *pengungkapan emosional* dari setiap karyawan dengan jalan menggunakan komunikasi tersebut untuk menunjukkan kekecewaan atau rasa puas mereka terhadap perusahaan.

Fungsi ini diperlukan ketika suatu kondisi memerlukan sebuah penghargaan (*reward*) ataupun hukuman (*punishment*). Penghargaan dan hukuman diberikan oleh unsur petugas yaitu wali, pejabat berwenang dan Kepala Lapas. Hal ini juga berlaku di kalangan petugas dalam rangka memberikan sebuah penekanan terhadap adanya *reward and punishment* dalam sebuah pekerjaan.

- Komunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data guna mengenali dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Fungsi ini dapat berhubungan dengan peran komunikasi untuk mempermudah *pengambilan keputusan*.

Fungsi komunikasi dalam point ini merupakan kumpulan fungsi-fungsi sebelumnya, dimana komunikasi yang terjadi antara narapidana dengan wali dijadikan sebagai bahan evaluasi dari sebuah program pembinaan dan situasi keamanan di dalam lapas. Identifikasi masalah melalui komunikasi dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya yang akan diambil, sehingga keputusan yang diambil merupakan kesimpulan yang dapat dipahami dan dimengerti oleh masing-masing pihak.

Uraian diatas menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dalam manajemen lembaga pemasyarakatan. Komunikasi menjadi faktor yang sangat vital, dimana tanpa adanya komunikasi narapidana dan wali tidak tahu apa yang harus dilakukannya, apa yang dilakukan atasannya, atasan tidak akan mendapat masukan dari bawahan, serta atasan juga tidak akan dapat menyampaikan instruksi kepada bawahannya. Koordinasi kerja tidak mungkin terjadi, dan organisasi mungkin akan ambruk jika tidak ada komunikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu dari komunikasi akan mempengaruhi jalannya organisasi.

Pentingnya komunikasi di dalam lapas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2

Pentingnya Komunikasi di dalam Lapas



B. Peran Wali Blok dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Dalam Sistem Pemasyarakatan terdapat (3) tiga pilar utama keberhasilan pelaksanaannya, yaitu masyarakat, petugas, dan narapidana yang mana ketiganya harus saling terkait dan saling menjaga keseimbangan didalam memecahkan suatu permasalahan yang ada khususnya mewujudkan berhasilnya program pembinaan yang ada di lapas, secara integral dan gotong royong terjalin antara narapidana, masyarakat dan petugas pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan berasumsi bahwa WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) (salah satu diantaranya ialah narapidana) bukan saja obyek melainkan subyek. Sebagai manusia yang tidak berbeda dari manusia lainnya maka sewaktu-waktu ia dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah

faktor-faktor yang dapat menyebabkan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Oleh sebab itu eksistensi pemidanaan diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa pada hakekatnya perbuatan pelanggaran hukum narapidana adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dengan masyarakatnya (re-integrasi hidup, kehidupan, dan penghidupan).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sistem Pemasyarakatan mengenal dua jenis program pembinaan dan pembimbingan yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Kedua jenis program pembinaan ini diintegrasikan secara terpadu sebagai upaya peningkatan kualitas narapidana (khususnya wanita), menyangkut aspek : ketaqwaan kepada Tuhan YME, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, re-integrasi sehat dengan masyarakat (yang terkait dengan program pem-binaan kepribadian), serta

keterampilan kerja dan latihan kerja / produksi (yang terkait dengan program pembinaan kemandirian).

Hal ini berarti bahwa kepemimpinan dari seorang Kalapas dengan seluruh petugas, berkewajiban menjadikan Lapas sebagai **LEMDIK** dan Lapas sebagai **LEMBANG**; yang bermakna bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu :

- a). Sebagai Lembaga Pendidikan (**LEMDIK**) yang melaksanakan program pembinaan kepribadian.
- b). Sebagai Lembaga Pembangunan (**LEMBANG**) yang melaksanakan program pembinaan kemandirian.

Kedua fungsi tersebut diatas dapat terwujud dengan adanya jalinan komunikasi yang baik antara petugas dengan narapidana dan tentunya juga masyarakat karena kedua fungsi diatas juga memerlukan peran serta masyarakat (swasta, pemerintah, kelompok, perorangan) sebagai unsur penting keberhasilan program pembinaan di lapas. Artinya, petugas dalam hal ini Wali Blok harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga mampu mendeteksi masalah yang kemungkinan akan muncul dalam lapas sehingga langkah antisipasi dapat ditentukan dan disampaikan dengan komunikasi yang baik pula.

Dengan kondisi penghuni yang 99% merupakan narapidana penyalahguna narkoba/psikotropika, maka petugas dituntut untuk bekerja lebih keras lagi terutama menghadapi perilaku adiksi (kecanduan) narapidana penyalahguna

narkotika/psikotropika dan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada. Kondisi kelebihan daya tampung, minimnya jumlah petugas dan minimnya sarana prasarana pengamanan menjadi faktor laten terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas.

Peran Wali Blok dalam upaya menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban adalah untuk mendeteksi akan adanya gangguan keamanan dan ketertiban dengan melalui mekanisme komunikasi antara Wali Blok dengan narapidana. ketika seorang Wali Blok mendeteksi akan terjadinya suatu perkelahian, gesekan antar narapidana maka ia mengkomunikasikan hal tersebut dengan pejabat berwenang dan Ka. Lapas. Ketika suatu gangguan keamanan dan ketertiban terjadi, maka tindakan yang dilakukan oleh petugas adalah identifikasi permasalahan, melakukan pemanggilan terhadap narapidana yang bermasalah dan selanjutnya melakukan tindakan disiplin dan hukuman disiplin.

C. Kendala-Kendala Pelaksanaan Peran Wali Blok dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta

Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi, eksistensi Lapas adalah merupakan suatu "alat penguasa" yang dibentuk dengan tujuan agar setiap anggota masyarakat yang telah melanggar peraturan/hukum yang ada di masyarakat (dan oleh karena itu ia dianggap mempunyai perilaku "menyimpang") dapat dibina agar yang bersangkutan dapat hidup di masyarakat secara "normal". Dalam arti setelah menjalani pidananya, ia dapat ikut aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan secara positif.

Apabila diperhatikan secara seksama, tujuan tersebut diatas sebenarnya sesuatu hal yang wajar, karena fungsi yang demikian notabene adalah merupakan upaya men-*sosialisasi*-kan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian eksistensi Lapas adalah juga mengemban tugas dan tanggungjawab *institusi sosial* yang ada di masyarakat, seperti keluarga, sekolah, alim ulama dan lain sebagainya. Malahan lebih ekstrim lagi, dapat dikatakan bahwa eksistensi lapas tidak akan pernah ada, apabila *institusi sosial* yang disebutkan dimuka, dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu dapat men-*sosialisasi*-kan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat secara sempurna. Sehingga dengan demikian semua warga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik pula. Pada gilirannya hal ini akan dapat menciptakan suasana yang aman dan tertib di masyarakat, karena tidak ada lagi seorang pun warga masyarakat yang melanggar hukum. Dengan perkataan lain, dapat disimpulkan bahwa eksistensi lapas sebenarnya tidak diperlukan, seandainya *institusi-institusi sosial* tersebut dapat melaksanakan fungsinya secara efektif. Ditinjau dari sudut pandang ini, secara ideal Lapas diharapkan dapat berperan untuk mengatasi kegagalan-kegagalan yang dialami oleh keluarga, alim ulama, sekolah dan lain sebagainya dalam membina anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran (penyimpangan) tersebut.

Namun bersamaan dengan itu, lapas juga dibebani peranan untuk melayani kepentingan masyarakat lainnya, yakni bagaimana caranya agar “dampak hukuman” tersebut harus dapat mempengaruhi sedemikian rupa, agar anggota masyarakat yang lain (yang belum melanggar hukum) merasa takut untuk

melakukakan pelanggaran. Hal ini berarti bahwa secara “visual” pelaksanaan hukuman harus “mengerikan” dan membuat orang “takut” untuk berbuat kejahatan (*deterrence effect*).

Disamping itu, hukuman juga sekaligus harus dapat memenuhi harapan dan tuntutan dari pihak yang menjadi korban kejahatan, yang biasanya akan menuntut ditegakkannya keadilan. Biasanya secara subyektif rasa keadilan itu oleh masyarakat awam dipersepsi sebagai pemberian “pembalasan” yang setimpal kepada si pelaku kejahatan. Hal yang demikian dapat dimengerti karena secara naluriah dan fitrah manusia memiliki *instink* untuk mempertahankan dan melindungi suatu cara hidup yang berakar dalam pikiran masyarakat berdasarkan emosi-emosi yang bersifat kolektif. Kesadaran ini membuat mereka menjadi takut terhadap kejahatan dan selanjutnya menuntut diadakan suatu perwujudan balas dendam terhadap pelaku kejahatan.

Uraian diatas menjelaskan secara sistem fungsi dan peran lapas dalam kondisi yang dilematis, yaitu harus menempatkan fungsi pembinaan dan pemidanaan sekaligus dalam satu tempat dan waktu yang sama. Permasalahan ini kemudian dapat dipecah dan diuraikan dalam faktor kendala peran Wali dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Faktor Kendala Sumber Daya Manusia Petugas

Sebagaimana diketahui bahwa tugas Wali Blok merupakan tugas yang tidak ringan, karena ia menjadi penyambung lidah kebijakan Ka. Lapas untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ada dalam lapas, sekaligus juga menjadi

penampung aspirasi dari keluhan-keluhan narapidana tentang peri kehidupan dalam lapas.

Faktor kendala sumber daya manusia yang akan peneliti uraikan adalah lebih fokus pada sisi kualitas petugas yakni dalam hal ini adalah Wali Blok .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja wali masih belum optimal. Indikator kurang optimal tersebut adalah sebagai berikut :

- Kriteria Penunjukan Wali Tidak Jelas dan Tidak Terukur

Proses rekrutmen dan penunjukan wali pada kenyataannya tidak dilakukan secara jelas dan terukur sehingga dalam menjalankan tugasnya wali kurang optimal. Penunjukan Wali Blok oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) lebih ditekankan pada kepentingan keamanan sehingga petugas yang ditunjuk sebagai wali didasarkan pada petugas yang dianggap oleh Ka. KPLP mampu meredam adanya gangguan keamanan dan ketertiban dalam blok hunian, tidak didasarkan pada latar belakang pendidikan yang spesifik, tidak melalui mekanisme test kecakapan dan kemampuan.

- Tidak Adanya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Khusus bagi Wali

Selain perekrutan dan penunjukan yang tidak didasarkan pada ukuran yang baku dan terukur, Wali Blok juga tidak mendapatkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) khusus mengenai penanganan narapidana baik dari pendekatan keamanan (*security approach*) maupun pendekatan pembinaan (*treatment approach*),

sehingga Wali Blok dalam menjalankan tugasnya hanya berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas masyarakat secara umum.

Pendidikan khusus bagi Wali Blok diperlukan dalam rangka mengikuti perkembangan pembinaan narapidana dari sisi praktis dan teoritis, sebab perkembangan pembinaan narapidana selalu mengalami perkembangan cara pandang dan pendekatan, sehingga petugas tidak terbelenggu dalam paradigma lama dan berwawasan sempit tentang penanganan narapidana, apalagi narapidana di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta 99% adalah penyalahguna narkoba/psikotropika, dimana narapidana dengan kasus tersebut juga memiliki spesifikasi dalam penanganannya.

- **Komunikasi antara Wali dengan Narapidana Berjalan Satu Arah (*One Way Communication*)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur komunikasi antara Wali Blok dengan narapidana berjalan secara vertikal dan satu arah (*one way communication*) secara *bottom up*. Narapidana apabila memiliki masalah dan ingin menyampaikan keluhan harus terlebih dahulu melewati mekanisme Tamping/Pemuka untuk kemudian disampaikan kepada Wali Blok yang bersangkutan.

Wali Blok dalam penelitian digambarkan sebagai sosok petugas yang tidak secara aktif menanyakan dan mendalami masalah narapidana, lebih bersifat menunggu laporan dari sebuah kejadian atau masalah, sehingga komunikasi yang terjalin tidak efektif untuk menyelesaikan masalah, apalagi penyampaian masalah disertai dengan tidak seajarnya kedudukan antara penyampai pesan dengan

penerima pesan. Penerima pesan diposisikan lebih rendah daripada pencrma pesan, sehingga laporan yang disampaikan tidak mendalam dan yang menerima laporanpun enggan untuk mendalaminya.

- **Mekanisme Penyelesaian Masalah lebih condong pada Pendekatan Keamanan (*Security Approach*)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian masalah, misalnya untuk kasus narapidana yang berkelahi lebih kepada penanganan pendekatan keamanan, narapidana yang bermasalah diinterogasi dalam kondisi yang tertekan dan diwarnai dengan tindak kekerasan oleh petugas, sehingga pengakuan yang muncul lebih kepada karena tidak tahan akan tekanan dan kekerasan yang dialami. Wali Blok dalam hal ini tidak optimal berperan karena ketika narapidana bermasalah, wali langsung menyerahkannya kepada pihak keamanan (KPLP) tanpa rekomendasi apapun.

Berdasarkan hasil penelitian tesis bahwa tindakan yang dilakukan ketika seorang narapidana bermasalah berbentuk tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Wujudnya berupa tutupan sunyi, meniadakan hak-hak tertentu misalnya hak remisi dan register F (register pelanggaran tata tertib). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian melalui pendekatan pembinaan dan pendalaman masalah narapidana tidak dilakukan oleh para Wali Blok dan terkesan dilupakan dan lebih memilih mekanisme penyelesaian yang cepat dengan pendekatan keamanan.

Secara luas menganalisis faktor kendala sumber daya manusia dalam organisasi mencakup manajemen sumber daya manusia dan faktor manusianya

sendiri. Leavitt (1992 : 21) menguraikan secara organisasi struktur organisasi harus diperhatikan dalam kerangka menuju organisasi yang baik. struktur organisasi menyangkut modifikasi dan pengaturan sistem internal, seperti acuan kerja, ukuran dan komposisi kelompok kerja, sistem komunikasi, hubungan-hubungan tanggung jawab atau wewenang. Pendekatan struktural dibagi menjadi tiga kelompok yang terdiri dari *Pertama* melalui aplikasi prinsip-prinsip perancangan organisasi klasik. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki penciptaan pembagian kerja yang tepat dari tanggung jawab jabatan para anggota organisasi, perubahan rentang manajemen, deskripsi jabatan dan sebagainya. *Kedua* desentralisasi. Hal ini didasarkan pada penciptaan satuan-satuan organisasi yang lebih kecil dan dapat berdiri sendiri dan memutuskan perhatian pada kegiatan yang berorientasi tinggi. Hasilnya perbaikan prestasi kerja. *Ketiga* modifikasi aliran kerja dalam organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa aliran kerja dan pengelompokan keahlian yang tepat akan berakibat kenaikan produktifitas secara langsung dan cenderung memperbaiki semangat dan kepuasan kerja.

Pendekatan struktural yang baik akan berdampak positif pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. secara langsung perilaku karyawan melalui pemusatan pada keterampilan sikap, persepsi dan pengharapan mereka, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan efektif.

Hal diatas berarti dengan struktur organisasi yang baik, maka ada aturan main yang jelas bagi Wali Blok dalam menjalankan tugasnya membina

narapidana, aturan yang jelas ini termasuk dalam hal perekrutan Wali sehingga melahirkan Wali Blok yang secara kualitas mampu melaksanakan tugas dan berprestasi dalam tugasnya yang pada akhirnya meningkatkan produktifitas organisasi.

2. Sarana Prasarana

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pemidanaan sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana. kedua fungsi ini diharapkan dalam berjalan seiring dalam rangka mewujudkan peri kehidupan lapas yang aman dan tertib. Dalam pelaksanaan tugasnya petugas dilengkapi oleh sarana prasarana, baik sarana prasarana keamanan maupun sarana prasarana pembinaan.

Khusus dalam menjalankan tugas sebagai Wali Blok jumlah petugas yang sedikit terkendala oleh banyaknya beban kerja yang dijalankan sementara fasilitas pendukung kegiatan sangat minim. Hal ini misalnya untuk memantau peri kehidupan narapidana dalam blok hunian idealnya bisa dilakukan pemantauam dengan menggunakan kamera, kemudian sosialisasi aturan ataupun program yang menyangkut narapidana juga bisa dilakukan dengan *famplet* atau pengumuman yang dipasang di tempat-tempat yang strategis, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak selalu harus dilakukan secara langsung tapi melalui media-media lain yang dianggap efektif dalam hal penyampaian program.

Dalam konteks ini peneliti menganalisis pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi tugas secara khusus dan organisasi secara umum. Menurut Leavitt (1992 : 21) Penggunaan sarana prasarana yang berorientasi teknologi dan

didasarkan pada kebutuhan pekerjaan akan membawa konsekuensi diubahnya teknik-teknik lama dalam pekerjaan.

Dalam kasus peran Wali Blok, kendala sarana prasarana sebenarnya bukanlah kendala pokok dalam pelaksanaan komunikasi antara wali dengan narapidana, sebab pada kenyataannya kualitas petugas menjadi hal yang sangat penting untuk dibenahi baik dari sisi perekrutan maupun pengembangan sumber daya manusia. Petugas yang berkualitas secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak positif terhadap pengadaan sarana prasarana yang ada, petugas yang berkualitas akan mampu memecahkan permasalahan yang menyangkut narapidana karena secara sadar yang mereka tangani adalah mahluk sosial yang dinamis bukan benda mati yang gampang untuk diarahkan dan dipindahkan.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan terdahulu, maka dalam bab ini peneliti menguraikan beberapa kesimpulan yang berupa inti seluruh pembahasan. Kemudian berdasarkan kesimpulan itu pula, peneliti mencoba mengemukakan beberapa saran/rekomendasi sebagai penunjang pemecahan masalah peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta.

A. Kesimpulan

1. Dalam kaitannya dengan peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta belum terlaksana dengan optimal. Indikatornya adalah :

- Komunikasi yang terjalin masih satu arah, yaitu dari atas ke bawah (*top down*) untuk menyampaikan pesan aturan dalam lapas, penyuluhan hukum dan sebagainya serta dari bawah ke atas (*bottom up*) untuk penyampaian masalah narapidana baik yang menyangkut hak-hak narapidana maupun fasilitas dalam blok.
- Dalam penyelesaian suatu permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban Wali Blok hanya bertindak sebagai penengah saja, tindakan penyelesaian yang dilakukan lebih condong pada pendekatan keamanan

Universitas Indonesia

(*security approach*) yaitu narapidana yang bermasalah ditindak dan mendapatkan hukuman disiplin.

- Wali Blok tidak proaktif terhadap masalah kekinian narapidana dan kurang peka dalam mendeteksi permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan narapidana dan bloknya.
2. Dalam menjalankan perannya, Wali Blok dihadapkan pada dua kendala pokok, yaitu :
- Kendala sumber daya manusia yang terpenting adalah kualitas petugas yang ditunjuk sebagai Wali Blok, selain kriteria penunjukkan yang tidak jelas dan terukur juga ketika mereka diberikan tugas tidak diberikan pelatihan-pelatihan khusus yang membuat mereka cakap dalam menjalankan tugas sehingga sangat wajar penyelesaian masalah yang mengemuka ketika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban pendekatan yang dipilih adalah pendekatan keamanan (*security approach*).
 - Kendala sarana prasarana, yakni menyangkut sarana prasarana pengamanan yang masih manual dan belum berorientasi pada teknologi dan *mindset* komunikasi Wali Blok dalam berkomunikasi yang tidak memanfaatkan sarana prasarana teknologi.

B. Saran/Rekomendasi

Dalam konteks peran Wali Blok dalam upaya menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas, peneliti akan mengemukakan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Harus ada *Standar Operational Procedure* (SOP) yang baku dan terukur tentang hubungan dan komunikasi antar narapidana dengan Wali Blok, sehingga petugas memiliki kemampuan dan kapasitas yang sama dalam berkomunikasi dengan narapidana, termasuk komunikasi dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Harus ada kriteria khusus dan terukur terhadap penunjukan Wali Blok. Sehingga petugas yang nantinya ditunjuk paham benar akan tugas pokok dan fungsinya sebagai Wali yang harus mampu menjembatani, menampung dan menyelesaikan permasalahan/keluhan narapidana baik terhadap kondisi pribadinya maupun kehidupan di lapas secara umum;
3. Petugas harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus dalam hal komunikasi dengan narapidana, termasuk teknik-teknik komunikasi dalam hal pengungkapan masalah, dan lainnya yang berkaitan dengan komunikasi, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak terjadi petugas salah mengidentifikasi permasalahan atau salah dalam memberikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan narapidana;

4. Sarana prasarana pengamanan dalam lapas yang berorientasi pada teknologi kekinian menjadi sebuah keharusan, sehingga hal ini perlu dianggarkan secara khusus oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban dapat terdeteksi lebih awal (misalnya dengan kamera yang ditempatkan di blok hunian).
5. Wali Blok dan petugas secara umumnya idealnya adalah *role model* bagi narapidana dalam berperilaku selama menjalani masa pidana di lapas, sehingga diharapkan secara kualitas petugas memiliki kemampuan yang sama dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam membina narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu, 1982.
- Ann Marriner, Torney, *Guide to Nursing management and Leadership*, Mosby year book Inc, 1996.
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. (Disunting dan diantar oleh Paulus Wirutomo). Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Bilton, Tony, Kevin Bonnet, Philip Jones, Michelle Stanworth, Ken Sheard, dan Andrew Webster. *Introductory Sociology*. Hong Kong: The Macmillan Press, Ltd., 1981.
- Bruce A. Chadwick, Howard M. Bhar and Stan L. Albrect; *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* diterjemahkan oleh Sulistia ML, Yan Mujianto, Ahmad Sofwan dan Suhardjito, IKIP, Semarang Press, 1990.
- Corkle, Richard C, Mc, Terance D, Mithe and Kriss A Drass, *Crime and Delinquency Vol 41A*, New York : Devisition of SAGE Publications, Inc, 1995.
- Creswell, John W. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches, Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, (Kata Pengantar : Parsudi Suparlan), Jakarta, KIK Press, 2002.
- Davis, K., and Newstorm, J.W. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. 8th edition. Singapore: McGraw – Hill, 1989.
- Davies, Croall & Tyler. *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System In England and Wales*. London: Longman, 1995.
- Elaine.L.Monica, *Kepemimpinan dan Management Keperawatan ,pendekatan berdasarkan pengalaman*, Penerbit buku kedokteran EGC 1998
- Farley, John E., *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall, 1992.
- Hendropuspito, D., OC. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989.

- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam*, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993.
- Irving Goffman, *Asylum; Essay on the Social of Mental Patients & Others Inmates*, New Jersey: Prenti Hall, Eglewood cliffs, 1992.
- Leavitt, J.H., *Psikologi Manajemen*, Alih Bahasa Zarkasi, M., Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992
- Merton, Robert. *Social Theory and Social Structure, 2nd ed.*. New York: Free Press, hlm. 41-45, sebagaimana dikutip dalam John E. Farley. 1992. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall, 1968.
- Onong Uchjana Effendi, *Kepemimpinan dan Komunikasi*, Bandung, Alumni, 1997.
- Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. (alih bahasa: Pujaatmaka). Jakarta: PT Prenhallindo, 1996.
- Roger. B. Ellis Robert, J Gates and Neil kenwarthy, *Interpersonal communication in Nursing Theory and Practice*, Churcill Livingstone, 1995
- Richard W. Snarr. *Introduction To Corrections*. Dubuque: Brown & Benchmark Publisher, 1996., hal. 65.
- Ricard C, Mc. Corke, Terance D, Mietheand Kriss A Drass, *Crime and Deliquency Vol 41 A*, New York; Devision of SAGEPublication, Inc, 1995.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan)*, Balai Pustaka, Jakarta 2001.
- Thomas, W. Charles, *Correction in America; Problem of the Past and the Present Vol VII*, London, New Delhi : New Park Beverly Hills, 1987.
- Tubagus Rony N, *Catatan Kriminalitas*, Jakarta, Jayabaya Universitas, 2000.

2. Lain-lain/Peraturan/Tesis/Makalah/Jurnal

- Crowding, Social Control, and Prison Violence: Evidence from the Post-Ruiz Years in Texas* Author(s): Sheldon Ekland-Olson Source: *Law & Society Review*, Vol. 20, No. 3 (1986), pp. 389-421 Published by: Blackwell

Publishing on behalf of the Law and Society Association Stable URL:
<http://www.jstor.org/stable/3053581>

Sumber Data Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal
Pernasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM RI, Januari 2008.

Slamet. Prihantara, Dampak Kelebihan Daya Tampung Dan Pengamanan Di
Rutan Jakarta Pusat, Tesis, Universitas Indonesia, 2005.

Samsun, Kebijakan dan Manajemen Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Antar
Etnis Narapidana, Tesis, Universitas Indonesia, 2005.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pernasyarakatan, Buku 6
Bidang Pembinaan, Direktorat Jenderal Pernasyarakatan, Jakarta, 2000.

Dalil Adi Subroto, *Pembinaan Narapidana sebagai sarana Merealisasika
Tujuan Pidana LAPAS*, disampaikan pada Seminar Nasional
Pernasyarakatan Kerjasama Departemen Pidana, Departemen Acara dan
Laboratorium Fakultas Hukum UII, Yoyakarta, 24 juli 1995.

1. Pedoman Wawancara :

a. Ka. Lapas/Petugas : (wawancara disesuaikan dengan konteks dan informan)

- Bagaimana Pola pengamanan di lapas ini, apakah sama dengan lapas2 lain atau ada yg khusus atau spesifik yg membedakannya dgn lapas lain?
- Apakah sistem/pola pengamanan yang diterapkan telah sesuai dengan kondisi lapas?
- Apakah pernah terjadi gesekan, perkelahian hingga kerusuhan di lapas ini?
- Apa yang menjadi penyebab hal tersebut?
- Apa mekanisme atau prosedur yang dilakukan apabila terjadi hal tersebut?
- Lapas merupakan komunitas yang unik dengan segala problema yang ada di dalamnya sangat rentan terjadinya konflik, perkelahian, kerusuhan. Apa yg dilakukan oleh pihak lapas untuk mencegah atau meminimalisir hal tersebut?
- Di lapas dikenal adanya wali, apa yg dimaksud dengan wali narapidana tersebut?
- Wali narapidana adalah petugas, apa kriteria dan kapabilitas yg harus dimiliki oleh seorang wali narapidana?
- Apa tugas pokok dan fungsi seorang wali blok dan wali pemsayarakatan?
- Selain mekanisme wali apa saja mekanisme lain yg dilakukan pihak lapas untuk mengetahui keluhan/permasalahan yang menyangkut hak dan kewajiban di lapas?
- Ketika ada temuan yang mengisyaratkan akan ada gangguan kamtib oleh narapidana apa yang dilakukan pihak lapas?
- Menurut anda apa solusi dan mekanisme, pola komunikasi yang harus dijalin antara narapidana dan petugas?

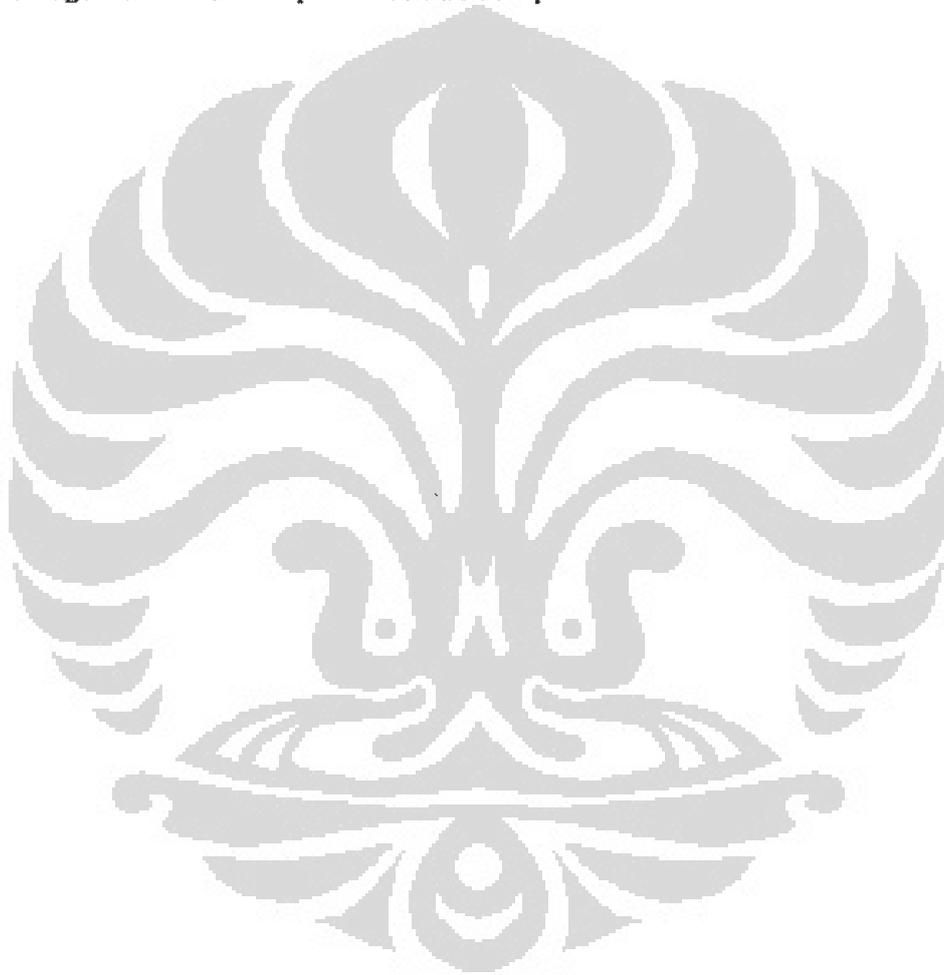
b. Narapidana

1. Biodata :

- Nama Lengkap/alias :
- Tindak Pidana :
- Hukuman/Vonis :
- Eksplasi :
- Lama Menjalani Pidana di Lapas Narkotika Jakarta :

2. Bagaimana hubungan anda dengan sesama narapidana/tahanan?
3. Apakah pernah terjadi perselisihan, pertengkarang antara narapidana/tahanan?
4. Menurut anda apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkarang?
5. Pernahkah terjadi atau akan terjadi perkelahian antar geng, suku yang mengarah pada kerusuhan?
6. Ketika terjadi perkelahian, apa yang dilakukan oleh petugas?

7. Ketika anda merasa tidak puas dengan perlakuan petugas atau hak anda sebagai narapidana, apa yang anda lakukan?
8. Apakah anda tahu ada wali blok?
9. Apakah anda tahu ada wali pemasyarakatan?
10. Apakah anda tahu tugas mereka sebagai wali?
11. Menurut anda apakah peran mereka sebagai wali telah optimal?
12. Menurut anda pola komunikasi seperti apa yang harus dijalin antara narapidana dan tahanan agar keluhan2 narapidana ada solusinya?



HASIL WAWANCARA

SUMBER I

Nama lengkap Samsul Komar als Samko

Terpidana narkotika , hukuman 5 Tahun (ekspirasi 2012)

Selama menjalani pidana di Lapas narkotika jakarta selama 2 tahun 3 bulan

PERTANYAAN

1. Bagaimana hubungan anda dengan sesama narapidana atau tahanan?
"biasa-biasa saja harmonis, tapi yah kadang-kadang kehidupan pasti ada perselisihan"
2. Apa pernah terjadi perselisihan, pertengkaran antar narapidana?
"pernah"
3. Menurut anda apa yang menjadi penyebab perselisihan?
"kadang-kadaaaaang yang menjadi penyelisihnya keadaan suasana"
4. Suasana?
"suasanaaa... lingkungan yang apa...yah.. yang kadang-kadang bikin otak kita tuh jadi ga berpikir jadi lebih, egoisnya itu jadi lebih di utama in...ketimbang yang baik-baiknya"
5. Terus apa lagi penyebabnya?
"karena terlalu banyak juga mungkin, orang-orang yang ada di dalam blok yah..."
6. Over kapasitas yah?
"iya..."
7. Terus apa lagi?
"kurangnya hiburan"
8. Sudah ga ada lagi?
"ga ada lagi cukup"
9. Pernahkah terjadi atau akan terjadinya perkelahian antar gank, suku yang mengarah kepada kerusuhan?
" ngga..pernah, saya belum pernah mengalami"
10. Belum pernah mengalami?
"belum"
11. Kalo gejala kearah kesana pernah mengalami tidak?
"kalo gejala iyaaa pernah,tapi eeng petugas itu sudah langsung antisipasi, jadi langsung mengambil tindakan"
12. Ketika terjadinya perkelahian apa yang dilakukan oleh petugas?
" eemm..kalo perkelahian individu, petugas langsung melerai, menjadi penengah kalo memang bias diselesaikan yah...langsung diselesaikan permasalahannya, tapi kalo tidak bisa diselesaikan yah yang melakukan keributan itu dimasukan kee.. ruang sel tahanan kusus"

13. Ketika anda merasa tidak puas dengan perlakuan petugas atau hak anda sebagai narapidana, apa yang anda lakukan?ketika anda tidak puas?
"ketika saya tidak puas, saya rasa nggaa...ngga ada rasa kayak gitu tidak puas ataupun kurang puas, semuanya baik-baik aja ngga ada.Kalo hubungan sama petugas apapun yah memang itu sudah peraturan yang berlaku disini, jadi.. ga ada istilah kata puas atau tidak puas"
14. Apa anda tau ada Wali Blok?
"tau"
15. Apa anda tau ada Wali Pemasarakatan?
"tauu"
16. Apa anda tau tugas mereka sebagai Wali?
"nnggg..kurang banyak tau tapi yah setidaknya...."
17. Secara pokok aja?maksudnya yang anda ketahui apa aja?
"secara pokok yah tau..."
18. Apa?
"dia harus lebih peka sama lingkungan yang di...pegangnya"
19. Menurut anda apakah peran mereka sebagai Wali telah optimal?
"kalo menurut saya pribadi kurang"
20. Kenapa?
"mereka kurang agresif"
21. Yah kenapa ?
"mungkin karenaaaa...sarana juga yah sarana dan prasarana yang ada di sini tuh kurrang, mungkin kalo ada kamera mereka bisa pantau melalui kamera atau apa. Seharusnya mereka itu kan biasa harus lebih nnggg...mendalami situasi kondisi lapangan ke blok"
22. Menurut anda pola komunikasi seperti apa yang harus dijalani narapidana dan tahanan agar keluhan-keluhan narapidana ada solusinya?
"sering diii adainnya pertemuan-pertemuan pengarahan, penyuluhan, itu tapi secara bersama yah mau pun di blok atau pun di ruang pertemuan khusus"
23. Acara itu sudah pernah ada belum?
"yah.. sekarang-sekarang ini sudah mulai agak ada,cuman untuk mengarahnya arahnya kemana itu belum begitu jelas"
24. Hasilnya juga gimana hasilnya?
"hasilnya yah belum, belum ada. Tapi kalo untuk kekompaknya sudah suu...dah ada"

SUMBER II

Nama Abdurahman als Alex

Pidana 14 tahun ekspirasi 2018, lama menjalani pidana di Lapas Narkotika 5 tahun

PERTANYAAN

1. Bagaimana hubungan anda dengan sesama narapidana?
"baik-baik saja pak selama ini"
2. Apakah pernah terjadi perselisihan anda dengan mungkin dengan satu kamar anda dengan warga yang lain?
"pemah...pernah perselisihan antar mulut aja pak tidak sesuai pendapat"
3. Apakah pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara narapidana di lingkungan blok?
"pemah.."
4. Seberapa sering kah itu?
"yah sering di bilang sering pak"
5. Menurut anda apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan?
"yah antara kapasitas di LP ini sudah melebihi batas, terus utang piutang pak, makanan antara makanan berebutan makanan jadi perkelahian, berebutan lapak, pada becanda becanda gitu jadi berkelahi"
6. Tingkat emosi gimana? maksudnya tingkat stress? apa itu juga bias jadi satu faktor juga? bisa?
"bisa pak"
7. Pernahkah terjadi atau akan terjadi perkelahian antar geng, suku yang mengarah pada kerusuhan?
"pemah"
8. Berapa kali itu dalam setahun?
"setahun dua kali pak"
9. Ketika terjadi perkelahian apa yang dilakukan seorang petugas?
"mengamankan masing-masing suku pak, meleraikan, mengademkan gitu mendamaikan pak"
10. Ketika anda merasa tidak puas dengan perlakuan petugas atau hak anda sebagai narapidana, apa yang anda lakukan?
"yah saya memberitahu unek-unek saya ke Wali blok itu sendiri"
11. Apa yang anda lakukan kepada Wali Blok itu?
"melaporkan kejadian yang dilakukan petugas, salah satu petugas ama saya"
12. Apakah anda tau ada Wali Blok?
"tau pak"
13. Apakah anda tau ada Wali Pemasarakatan?
"tau"
14. Bagaimana tugas seorang Wali, apakah anda juga mengetahuinya?
"mengetahui pak"
15. Apa yang anda ketahui tentang seorang Wali?

“memperhatikan blok itu sendiri dari kebersihan, keamanan, lingkungan, kesehatan warga binaan, yah memperhatikan betul-betul blok itu pak”

16. Menurut anda apakah peran mereka sebagai wali telah optimal ?“ Belum, karena kurang adanya, .. komunikasi pertemuan antara warga binaan dengan wali pak.
17. Menurut anda pola komunikasi seperti apa yang harus dijalin antara napi dengan petugas?
“ diadakan pertemuan seminggu sekali antara narapidana dengan wali blok, jadi keluhan-keluhan napi bisa ketampung semua oleh wali blok, dan selama ini belum ada kegiatan itu.



SUMBER KE III

Nama : Mardjohan als jack.

Pidana : 18 tahun(narkotika)

Ekspirasi :2022

Lama menjalani pidana 5 tahun

PERTANYAAN

1. Bagaimana hubungan anda dengan sesama narapidana?
"baik"
2. Apakah anda pernah mengalami suatu perselisihan di kamar, di blok atau dimana?
"pernah, pada umumnya nnggg...selisih pendapat aja pak, dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan"
3. Apakah pernah terjadinya perselisihan, pertengkaran antara narapidana di dalam blok atau di satu kamar?
"pernah"
4. Seberapa sering itu terjadi?
"nnggg...sering terkadang permasalahan-permasalahan kecil bisa menjadi satu permasalahan gitu,tapi kita pada umumnya itu mengambil tindakan untuk menyelesaikannya"
5. Oo..berarti setatus anda sebagai apa?
"di blok saya dipercayakan sebagai pemuka"
6. Pemuka itu apa?
"pemuka yang nggg...mewakili warga binaan blok"
7. Sebagai wakil petugas gitu yah?membantu petugas?
"yah"
8. Pernahkah terjadi atau akan terjadi perkelahian antar geng atau suku yang mengarah pada kerusuhan?
"pernah"
9. Jika terjadi perkelahian antar narapidana baik itu individu atau secara masal apa yang dilakukan oleh seorang petugas pada saat itu?
"mereka langsung mengambil tindakan untuk keamanan dan nngg... dan mereka yang bermasalah di panggil semuanya ke kantor dan diselesaikan secara kekeluargaan bila ternyata mereka ada yang salah diambil tindakan nngg...salah satunya mungkin di pamsus atau di sel"
10. Ketika misalnya yah mungkin yah di dalam atau di blok mungkin ada yang merasa tidak puas sama perlakuan petugas mungkin hak anda yang tidak terpenuhi, apa yang anda lakukan?
"ngg...saya akan melaporkan ke Wali, dan Wali akan menyikapi bagaimana tindakan selanjutnya"
11. Apa anda tau ngg...seorang Wali?apa anda tau nggg apa di blok-blok itu ada Wali?
"tau"
12. Apa anda tau juga ada yang disebut dengan Wali Pemasyarakatan?

“tau”

13. Apa anda tau juga tugas bagi seorang Wali? yang anda ketahui peran seorang Wali itu seperti apa?
“peran seorang Wali itu yah tidak jauh beda dengan orang tua kita yang bisa menaungi atau melindungi kita dan apa kekurangan dan keluhan-keluhan kita dia harus bisa tanggap begitu dengan permasalahan-permasalahan di dalam blok dengan warga-warga, dan bila ada keributan atau perselisihan itu kita ambil dengan sikap, mereka kita kumpulkan dan kita panggil Wali nah Wali yang mengambil keputusan”
14. Oh jadi selama ini ngg.. tunggu ada laporan dulu dari warga ke Wali baru Wali mengambil tindakan, seperti itu? selama ini yang sudah berjalan?
“yah selama ini yang sudah berjalan seperti itu, jadi tunggu informasi dulu dari warga atau pemuka baru Wali ambil tindakan”
15. Menurut anda apakah peran mereka sebagai Wali telah optimal?
“belum”
16. Mengapa belum?
“karena di sini saya perhatikan ngg.. kurang ngg.. untuk ngg... warga binaan itu kurang optimalnya kita belum ada ngg.. semacam pertemuan-pertemuan atau memperkenalkan wajib hukum, karena di sini jarang ngg.. kita ada... ngg.. apa sih seperti, apa sebulan sekali kita dikumpulkan untuk memperkenalkan hukum, karena kekurangan kita karena kita disini nih semuanya....”
17. Dari segi pengawasan gimana peran seorang Wali sudah optimal atau gimana?
“ngg... masih kurang”
18. Sebenarnya Wali tiap blok itu ada berapa orang?
“tiap blok itu satu”
19. Dan tiap blok itu jumlahnya berapa orang narapidana?
“jumlahnya 300 kurang lebih 300”
20. Jadi menurut anda pola komunikasi seperti apa yang.. yang bisa terjalin dengan baik antara narapidana dengan petugas untuk menampung keluh-keluhan narapidana narapidana supaya ada solusinya?
“ ngg... hhh salah satunya itu kita harus ada memperbanyak pertemuan-pertemuan, jadi ngg.. apa keluhan atau unek-unek warga binaan bisa bisa dicurahkan disana dan bisa diselesaikan dan bisa ditemukan solusinya”.

Nama Agus Imam Taufik

Jabatan sebagai wali blok

PERTANYAAN

1. Bagaimana pola pengamanan di Lapas ini, apakah sama dengan Lapas-lapas lain atau ada yang khusus atau spesifik yang membedakannya dengan Lapas lain?
"pada dasarnya secara keseluruhan sama, kita disini memakai system pengamanan system maksimum sekuriti, yang mebedakan mungkin disini hanya yang lebih sepesifik karena narapidana di sini kasus narkoba, jadi system pengamanannya lebih ditekankan pada system maksimum sekuriti"
2. Apakah system atau pola pengamanan yang diterapkan telah sesuai dengan kondisi Lapas saat ini?
"yah sangat ideal sekali dengan tingkat hunian atau jumlah warga binaan yang sudah over kapasitas system pengamanan yang dengan system maksimum sekuriti ini sangat ideal dengan kondisi yang saat ini"
3. Apakah itu sudah berjalan sesuai yang diharapkan?
"secara optimal akan kita coba sesuai dengan system yang sudah ada"
4. Berarti dari menurut anda belum cukup optimal yah?
"belum..belum sepenuhnya optimal, tapi akan kita upayakan"
5. Apakah pernah dalam lingkungan blok ini pada saat bertugas terjadi gesekan atau perkelahian hingga terjadinya kerusuhan di dalam sini?
"terjadinya gesekan-gesekan atau benturan-benturan kecil itu, tapi ngga sampai menimbulkan suatu dampak atau bentuk kerusuhan"
6. Apa yang menjadi penyebab hal tersebut?
"yah kembali tadi, itu karena tingkat hunian atau jumlah warga binaan yang sudah over kapsity yah, dengan kondisi kamar atau blok yang tidak sesuai dengan jumlah penghuni"
7. Ada lagi?
"rata-rata itu"
8. Apakah mekanisme atau prosedur yang dilakukan apabila terjadi suatu kerusuhan atau perkelahian? mekanisme seorang anda sebagai komandan Rupam dalam menangani kerusuhan tersebut dengan adanya perkelahian baik itu individu maupun secara berkelompok?
"yah mungkin seperti biasa bila terjadi benturan-benturan yang ngg...akan menimbulkan kerusuhan mungkin akan kita panggil kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan nanti akan kita buat BAP yang akan diteruskan dengan pemberian register F bagi yang bersangkutan"
9. Langkah-langkah awal apa yang dilakukan dalam artian untuk mencegah dalam artian jika terjadi perkelahian terus langkah awal itu apa yang dilakukan?
"yah kita melakukan pendekatan kepada warga binaan, kita..kita ngg... cari sebab apa yang dasar mereka membuat seperti itu, kita tau sumber masalahnya apa, baru kita nanti akan panggil kira-kira orang-orang yang akan menentukan masalah atau biang yang akan menimbulkan masalah"

10. Baik Lapas merupakan komunitas yang unik dengan segala problemanya dan itu sangat rentan terjadinya konflik, perkelahian, dan kerusuhan. Apa yang dilakukan oleh pihak Lapas untuk mencegah atau meminimalisir hal tersebut?

"dengan jumlah petugas yang sekarang ini sangat tidak ideal dibandingkan dengan jumlah napi atau warga binaan kita lebih menekankan kepada pola pendekatan kepada warga binaan, kita coba ngg... tanamkan kepada warga binaan kita ngg.. berikan mereka bantuan ataupun yang sekiranya mereka harapkan yang sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku"

11. Di Lapas kita kenal adanya Wali, apa yang dimaksud dengan Wali narapidana?

"Wali bertugas dia nantinya akan mendampingi nggg... setiap ada permasalahan yang terjadi didalam blok tersebut atau meng akomodir setiap ada masukan yang ditujukan kepada pihak Lapas"

12. Wali narapidana adalah petugas, apakah ada criteria dan kapabilitas yang harus dimiliki oleh seorang wali narapidana?

"yah tentu harusnya mereka juga disamping mereka juga ngg... dari staf KPLP juga bisa dari staf lain tentunya memiliki loyalitas terhadap tingkat kedisiplinan tugas"

13. Terus apakah dia harus mempunyai keterampilan atau latar belakang khusus?

"Nggga ada, tidak ada yang spesifik"

14. Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus berupa treatment dalam menghadapi napi?

"belum, belum ada"

15. Apakah menurut anda peran wali ini sudah optimal di dalam tugas di blok?

"sejauh ini sudah berjalan dengan baik namun kalo dikatakan optimal belum sampai kearah sana"

16. Selain mekanisme Wali apa saja mekanisme lain yang dilakukan pihak Lapas untuk mengetahui keluhan atau permasalahan yang menyangkut hak dan kewajiban di Lapas?

"yang pasti kita akan terus membuka diri, ngg... membuka komunikasi antara warga binaan dengan petugas salah satunya mungkin dengan adanya forum yang di Lapas Narkotika ini dibuat untuk setiap hari jumat di situ warga binaan bisa menyampaikan alasan atau keluhan yang mereka alami".

NAMA SARWONO

JABATAN STAF KPLP LAPAS NARKOTIKA JAKARTA

WALI BLOK A, SELAMA 1 TAHUN

PERTANYAAN

1. Bagaimana hubungan yang anda ciptakan dengan narapidana yang anda damping?
"kalau yang selama ini sudah berjalan adalah pola komunikasinya dari wali lebih istilahnya lebih dominan mmm...ke pemuka untuk ke pemuka blok, kemudian untuk warga-warga yang lain kebanyakan pola yang terjadi dari mereka memberikan informasi atau masukan langsung ke Wali dan selebihnya kebanyakan dari Wali untuk ke warga binaan itu melalui pemukanya, jadi lebih bersifat dari bawah ke atas"
2. Apakah pernah terjadi perselisihan antar narapidana di blok yang anda bombing?
"itu pasti pernah terjadi"
3. Apa itu bisa dikatakan sering?
"bisa dikatakan sering"
4. Menurut anda apa yang menjadi penyebab perselisihan?
"perselisihan itu banyak hal salah satunya adalah masalah yang ditimbulkan oleh over kapasitas seperti berebut air untuk mandi, kemudian masalah utang piutang, dan saya kira kebanyakan ndak jauh dari situ"
5. Pernahkah terjadi atau akan terjadinya perkelahian antar geng atau suku yang mengarah kepada kerusuhan?
"yang selama saya ketahui untuk mengarah perkelahian suku atau geng belum pernah terjadi"
6. Tapi kalo akan terjadi, pernah? dalam artian yaa.. baru ada gejala?
"kalo gejala itu menurut saya itu sebetulnya itu baru isu cuman nngg...waktu diteliti lebih jauh tidak terbukti gitu"
7. Jika terjadinya perkelahian atau perselisihan itu apa yang dilakukan oleh seorang Wali? seorang petugas sebagai seorang Wali?
" yang pertama adalah mengamankan dari yang berkelahi tadi, kemudian dilakukan introgasi, kemudian bila memang salah dilakukan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahan"
8. Menurut anda sebenarnya apakah anda mengetahui tugas fungsi merupakan dari seorang Wali blok?
"menurut saya tugas Wali diantaranya yang pertama adalah memonitor prilaku narapidana nngg...termasuk memberikan pengarahan atau pembinaan bagi prilaku-prilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di lapas, kemudian yang selanjutnya menjembatani jika ada permasalahan-permasalahan yang di alami narapidana, baik sesama narapidana maupun dengan pihak lain"
9. Disinikan ada (2) dua yah berarti di LP kita artinya ada 2 Wali, Wali blok dan Wali Pemasarakatan, nah apa yang anda ketahui perbedaan antara dua Wali ini?
"kalo Wali blok itu menurut saya tugasnya lebih sempit dalam artian dia mengurus misal nya Wali blok A berarti dia Cuma bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan atau apapun berkaitan

dengan blok A, kalo Wali Pemasaryaktan menurut saya lebih lebih seorang Wali pemsaryakatan bisa mempunyai semacam anak bimbingan dari blok A,B, C, atau dengan kata lain tidak terbatas dengan satu blok dan cakupannya dia bisa lebih besar dari seorang Wali blok"

10. Menurut anda apakah peranan seorang Wali mempunyai peranan yang sangat penting?
"menurut saya penting, contohnya misalnya narapidana mempunyai keluhan atau segala macam permasalahan bisa disampaikan kepada Wali kemudian untuk diteruskan kepada pihak yang berkepentingan atau untuk menyelesaikan masalah yang terjadi"
11. Jadi menurut anda sangat berguna peran seorang Wali?
"yah menurut saya begitu"
12. Dalam menjalankan peran anda, bentuk hubungan seperti apa yang anda ciptakan untuk menciptakan suatu hubungan yang diharapkan dengan warga binaan?
"yang pertama tentu komunikasinya harus lancar, narapidana terbuka apa yang dihadapi, apa yang dialami disampaikan sehingga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi lebih mudah begitu"
13. Dalam anda menjalankan peranan sebagai seorang Wali anda mendapatkan kendala-kendala yang dalam artian?
"kendala yang dihadapi pertama dalam dari segi pola komunikasi dari warga binaan ada yang dari segi informasi kurang lengkap karena ke tidak terbuka atau dia tidak mau berbagi, kemudian kendala yang dihadapi yang lain biasanya koordinasi dengan petugas yang lain dari bagian yang lain kurang terkoordinir dengan baik"
14. Dengan sarana prasarana sendiri gimana? pelatihan-pelatihan yang diberikan sebagai seorang Wali?
"Untuk kegiatan dengan Wali pelatihan atau apa dengan Wali untuk sekarang ini ga ada"
15. Maksudnya dalam artian treatment-treatment yang diberikan bagaimana cara nya mengatasi masalah seperti mungkin ada yang stress atau segala macam itu?
"oo..petugas tidak dibekali"
16. Berarti selama ini kriteria atau pun kapabilitas seorang Wali itu seperti apa untuk dijadikan patokan atau ada kriteria khusus?
"selama ini Kriteria tidak ada kriteria"
17. Jadi menurut anda peranan Wali sudah berjalan optimal di Lapas ini?
"kalo menurut saya untuk beberapa saat terakhir ini peran Wali sudah meningkat cuman untuk kedepan tentu harus di tingkatkan yaitu yang agak untuk saat ini adalah pelayanan dari napi seperti program memperbanyak program PB jadi napi di bantu jika ada kendala, keluhan dibantu terus dari segi keluhan-keluhan yang lain seperti makanan dan sebagainya dari Wali juga membantu lah istilah nya pelayanan jauh lebih baik lah".

Nama : Heru Yuswanto

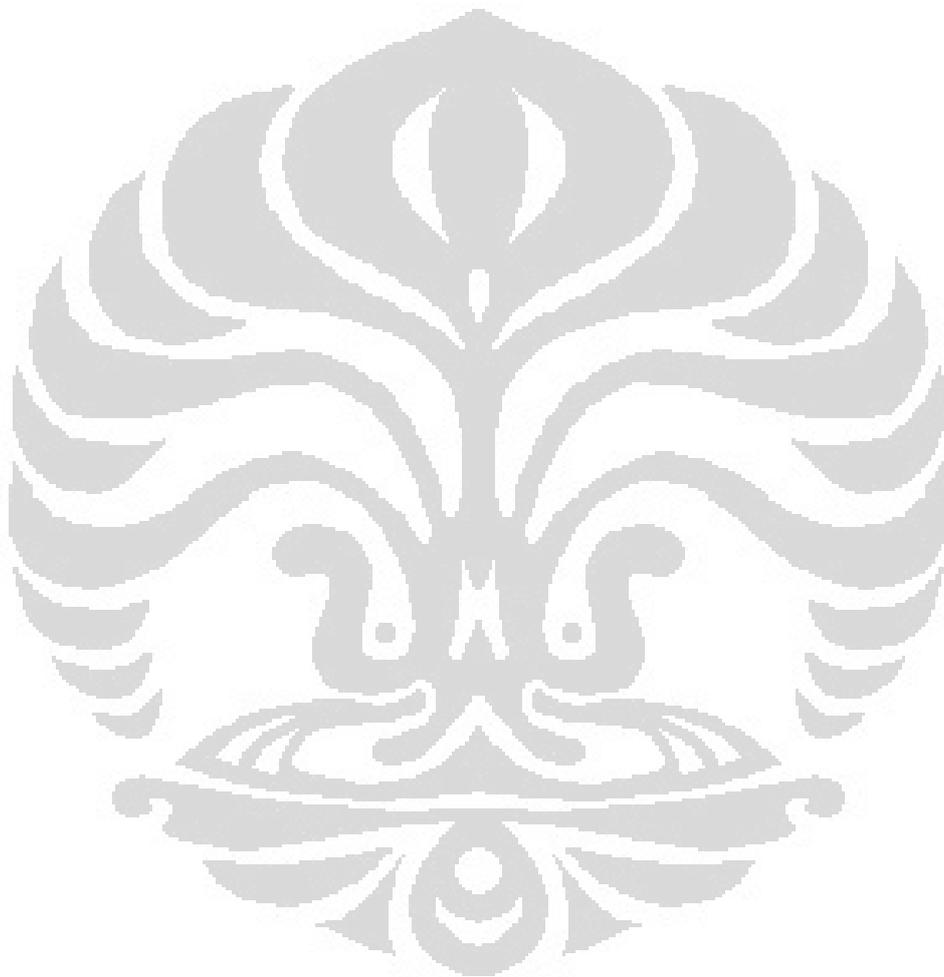
Jabatan : Ka. KPLP

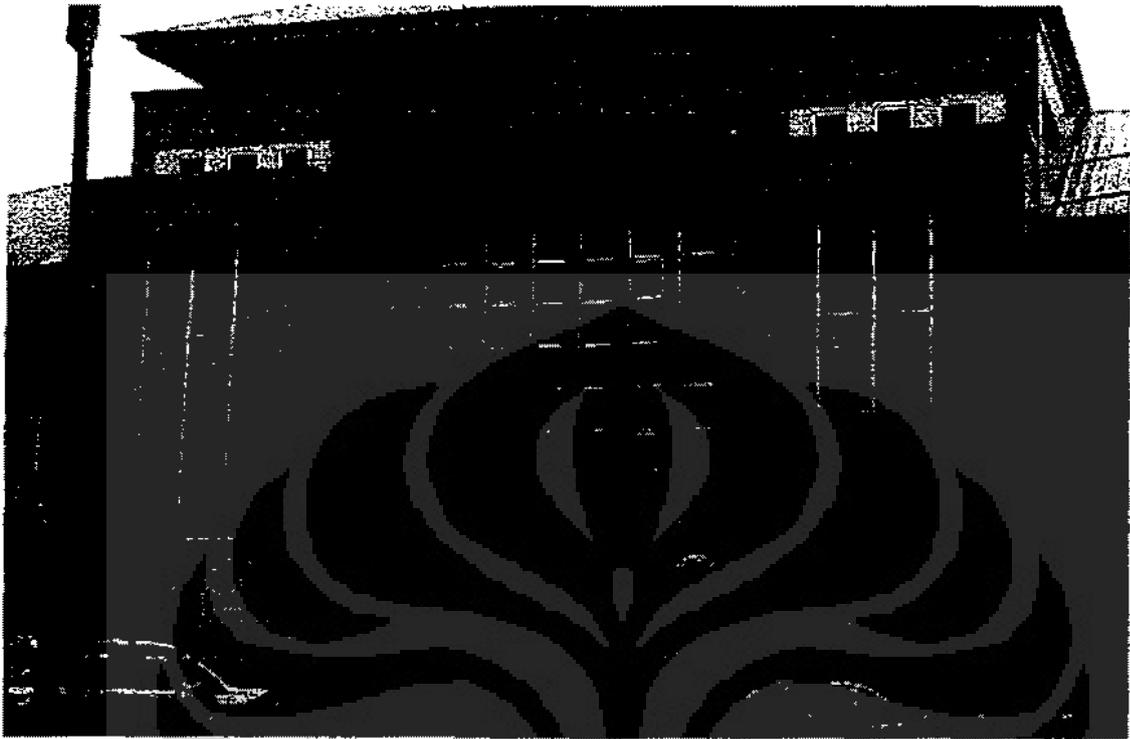
PERTANYAAN

1. Bagaimana pola di Lapas ini, apakah sama dengan Lapas-lapas lain atau ada yang khusus atau spesifik yang membedakan dengan Lapas lain?
"pola pengaman di Lapas ini adalah maksimum sekuriti, pengamanan berlapis yang pada umumnya hampir sama dengan Lapas yang lain, terutama di daerah DKI, jadi tidak ada yang spesifik kecuali narapidananya yang sebagian besar kasus narkoba".
2. Apakah system atau pola pengamanan yang diterapkan telah sesuai dengan kondisi Lapas?
"ya, tapi kalo ditinjau dari jumlah pebghuni, petugas yang ada belum memadai".
3. Apakah pernah terjadi gesekan, perkelahian hingga kerusuhan di Lapas ini?
"kalo gesekan dan perkelahian merupakan suatu yang lumrah di penjara, jadi bisa dikatakan sering, namun kalo kerusuhan belum pernah terjadi dan kalo bisa jangan sampai terjadi".
4. Apa yang menjadi penyebab hal tersebut?
"over kapasitas, masalah hutang piutang, bahkan sampai hal-hal sepele seperti rebutan air minum, pembagian makanan, omongan yang menyinggung".
5. Apa mekanisme atau prosedur yang dilakukan jika terjadi hal tersebut?
"kedua pihak yang terlibat perkelahian kita amankan ketempat yang steril agar tidak meluas, terus kita cari akar permasalahannya dan secepatnya kita selesaikan dan kalo perlu kita beri sanksi kedua pihak dengan di sel/dipisahkan/diasingkan dari blok sebagai pelajaran selama 12 hari".
6. Lapas merupakan komunitas yang unik dengan segala problema yang ada didalamnya sangat rentan terjadinya konflik, perkelahian, kerusuhan. Apa yang dilakukan oleh pihak Lapas untuk mencegah atau meminimalisir hal tersebut?
"semaksimal mungkin meredakan akar yang akan menjadi masalah dengan menggunakan peran Wali yang selalu standby di blok setiap hari guna mengantisipasi adanya gesekan secara cepat.
7. Di Lapas di kenal adanya Wali, apa yang di maksud dengan Wali narapidana tersebut?
"Wali adalah petugas pendamping napi, yang dapat berperan sebagai pengganti orang tua atau sebagai teman".
8. Wali narapidana adalah petugas, apa criteria dan kapabilitas yang harus di miliki oleh seorang Wali narapidana?
"sebagai Wali harus mempunyai kemampuan untuk mengayomi warganya serta mendengarkan keluhan kesah napi dan di cari solusinya".
9. Apa tugas pokok dan fungsi seorang Wali blok dan Wali pemasyarakatan?
"mendampingi narapidana dan merspon keluhan kesah yang disampaikan napi dan di cari solusinya, serta peka terhadap lingkungan untuk mencegah terjadinya gesekan dan perkelahian".
10. Selain mekanisme Wali apa saja mekanisme lain yang dilakukan pihak Lapas untuk mengetahui keluhan/permasalahan yang menyangkut hak dan kewajiban di Lapas?

“pihak Lapas melalui bidang Bimpas melakukan pelayanan keluhan yang dilakukan secara rutin setiap hari jumat yang meliputi semua warga binaan”.

11.





LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA JAKARTA



LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA JAKARTA



BLOK A



BLOK B



BLOK C



SUASANA SALAH SATU BLOK



WALI BLOK SEDANG KONTROL



BLOK SEL TUNA TERTIB



NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PELANGGARAN TATA TERTIB

DENAH LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA JAKARTA

